



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN
ANTAR KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI BANTEN**

TESIS

TRIAS DEWI YUNISTI

NPM. 0906655074

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN
ANTAR KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI BANTEN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Ekonomi**

TRIAS DEWI YUNISTI

NPM 0906655074

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH
JAKARTA
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme saya akan bertanggungjawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, 19 Juli 2012



Trias Dewi Yunisti

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Trias Dewi Yunisti

NPM : 0906655074

Tanda Tangan:



Tanggal : 19 Juli 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Trias Dewi Yunisti

NPM : 0906655074

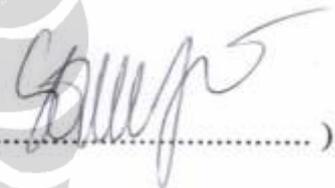
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik

Judul Tesis : Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/ Kota Di
Provinsi Banten

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Sonny Harry B. Harmadi

()

Penguji I : Arindra A. Zainal, Ph.D

()

Penguji II : Titissari Rumbogo, S.E, M.T., M.Sc.

()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 19 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokaatuh..

Alhamdulillahirobbil'alamin..segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

- Eyang Kung, Bakas, Uti dan Niai...orang tuaku.. yang sudah sepenuh hati memberikan semangat dan dukungan serta doanya, sehingga Allah memberikan ridhoNya.
- Keluargaku tercinta... Papa, Kakak Fia, Abang Rais, yang telah memberikan seluruh waktu dan perhatiannya.. Makasih ya Pa... karena bantuan Papa data penelitian jadi lengkap, Kakak Fia dan Abang Rais..terimakasih ya anak mama yang Soleh dan Solehah..yang selalu setia menemani mama kuliah, semoga dimudahkan dalam meraih cita-cita ya nak..Amin.
- Bapak Dr. Sonny Harry B. Harmadi selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan, saran, support dan bantuannya dalam pembuatan tesis ini, terimakasih banyak ya pak... semoga karir Bapak semakin sukses. Amin.
- Bapak Arindra A. Zainal, Ph.D dan Ibu Titissari Rumbogo, S.E, M.T.M.Sc selaku Dosen Penguji, Terimakasih banyak atas saran dan bantuan yang telah diberikan sehingga tesis ini dapat selesai pada waktunya.
- Iwed.. Otnit.. Pepeh Ided ..dan mas Afif.. terimakasih atas support dan doanya, Semangat, Fokus, Ikhlas ya..
- Pak Wo Hasan & Mama Anggi, Pak Wo Ucup & Mama Nuk, Pak Ono & Yune, Mama Ani & Bang Iwan, Tante Dilla & Mr.J, Kak Ija & Mama Tri... ponakanku semua... terimakasih ya atas doa dan dukungannya...

- Teman-teman Subbag Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, terimakasih atas supportnya.. semoga kedepan bisa menjadi tim yang makin solid ya. Amin.
- Venty, Ummu dan Mira.... terimakasih banyak ya... atas semua bantuan dan kerjasamanya, semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam meraih cita-cita kita.Amin
- Mbak Ratna.... terimakasih sudah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk selalu siap jadi teman diskusiku.... semoga karirnya semakin sukses ya mbak. Amin
- Mbak Nur, Mbak Warni, Mbak Siti..Pak Haris, Pak Triman, Mas Dwi... terimakasih ya atas bantuan dan kerjasamanya..
- Mbak Clara.. terimakasih atas saran-sarannya.., Mr. Irsan & Goolda Selamat ya..Temen- temen kuliah Angkatan XXII Sore.. ayo terus semangat... sukses selalu untuk kita semua. Amin.
- Pemerintah Daerah Provinsi Banten.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan doanya, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhoNya untuk kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarokatuh.

Jakarta, 19 Juli 2012

Trias Dewi Yunisti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Trias Dewi Yunisti

NPM : 0906655074

Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik

Departemen : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi

Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty - Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/ Kota Di Provinsi Banten”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Juli 2012

Yang menyatakan



(Trias Dewi Yunisti)

ABSTRAK

Nama : Trias Dewi Yunisti
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Analisis Ketimpangan Pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Sejak berdiri pada tahun 2000, Provinsi Banten terus melakukan pembenahan dalam segala bidang, selain pembangunan infrastrukturnya juga pembangunan dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Sumber daya manusia sebagai modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan, selain juga sebagai pelaku utama dalam pembangunan.

Adanya perbedaan kondisi dan latar belakang wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten dapat menjadi salah satu penyebab ketimpangan itu terjadi. Sebagian wilayahnya yang berbatasan langsung dan menjadi daerah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta menyebabkan ketimpangan semakin melebar. Karena itu, Pemerintah Provinsi Banten harus segera mengambil langkah-langkah kebijakan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publiknya baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya.

Dalam setiap proses pembangunan, ketimpangan tentu akan terjadi, tidak terkecuali dalam pembangunan di Provinsi Banten. Untuk itu pemerataan dalam hal kesempatan kerja dan mobilisasi penduduk harus segera dilaksanakan agar ketimpangan dapat diminimalisasi.

Kata kunci:

Ketimpangan Pembangunan, Pendidikan, Kesehatan, Indeks Theil, Indeks Williamson

ABSTRACT

Name : Trias Dewi Yunisti
Study Program : Master of Planning and Public Policy
Title : Analysis of Development Disparities between Districts /
Municipalities in the Province of Banten

Since its establishment in 2000 in Banten Province continues to make improvements in all areas, but also the construction of the infrastructure in terms of improving the quality of human resources. Human resources as a capital base in the conduct of development, as well as the main actors in development.

Of differences in background conditions and the district / town in Banten province may be one cause of imbalance that happens. Most of the area immediately adjacent to the buffer zone and the capital city of Jakarta lead to widening inequality. Therefore, the government of Banten province should immediately take steps to improve the policy for good quality public services in education, health and other sectors.

In any development in the Province of Banten. For that equity in terms of employment and mobilization of population should begin immediately, so that imbalances can continue to be minimized.

Keyword:

Inequality of Human Development, Education, Health, Theil index, Williamson index.

DAFTAR ISI

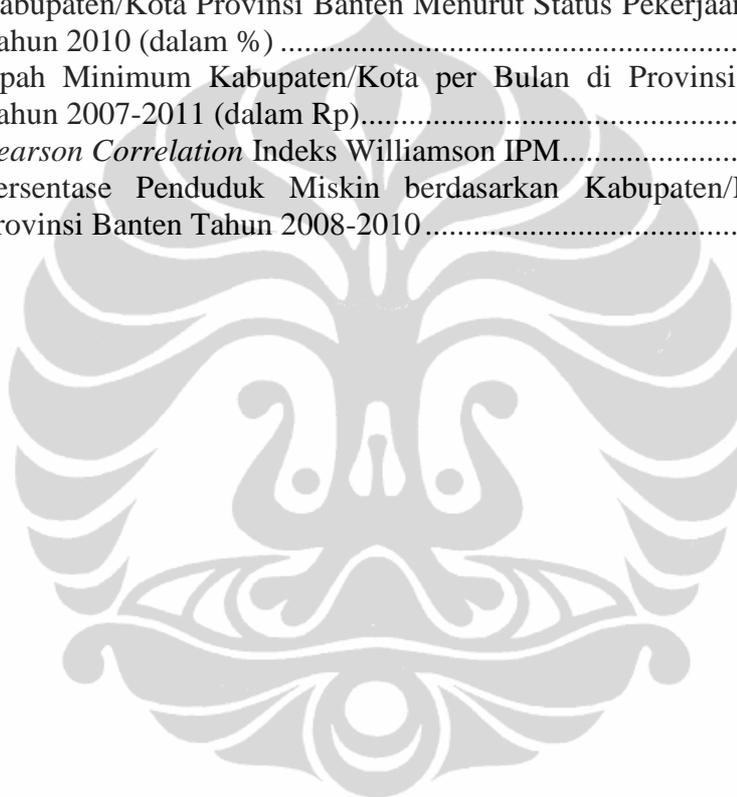
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIATISME.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xiv
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	15
1.3. Tujuan Penelitian.....	17
1.4. Manfaat Penelitian	17
1.5. Ruang Lingkup Penulisan	18
1.6. Sistematika Penulisan	18
1.7. Alur Berpikir	20
2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pembangunan Ekonomi.....	20
2.2. Pertumbuhan Ekonomi Regional	26
2.3. Pembangunan Manusia	28
2.4. Disparitas Pembangunan	30
2.4.1. Ketimpangan Ekonomi	32
2.4.2. Ketimpangan Sosial	32
2.5. Ukuran Ketimpangan	37
2.6. Hubungan Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Manusia	42
2.7. Penelitian Terdahulu.....	43
3. METODE PENELITIAN	
3.1. Sumber Data	47
3.2. Metode Pengumpulan Data	47
3.3. Definisi Operasional Variabel	47
3.4. Teknik Analisis Data	48
3.4.1. Indeks Williamson.....	49
3.4.2. Indeks Theil	50
3.4.3. Tipologi Klaasen.....	52
3.4.4. <i>Pearson Correlation</i>	53

4. GAMBARAN UMUM WILAYAH BANTEN	
4.1. Sejarah Provinsi Banten	55
4.2. Kondisi Geografis dan Administratif	56
4.3. Kependudukan	66
4.4. Kondisi Perekonomian	67
4.4.1. Pertumbuhan Ekonomi	67
4.4.2. Kemiskinan	70
4.4.3. Ketenagakerjaan	72
4.5. Pembangunan Manusia	73
5. ANALISIS DATA	
5.1. Hasil Perhitungan Indeks Williamson	78
5.2. Hasil Perhitungan Indeks Theil	87
5.2.1. Kelompok Kabupaten/-Kota	88
5.2.2. Kelompok Utara-Selatan	91
5.2.3. Kelompok Maju-Bukan Maju	92
5.2.4. Ketimpangan Kemiskinan	94
5.3. Hubungan Ketimpangan IPM, AMH, AHH, RLS, IDB	96
5.4. Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan.....	97
6. KESIMPULAN DAN SARAN	100
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	xv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Pembentukan Daerah Otonom Baru di Indonesia Tahun 1999-2009.....	4
Tabel 1.2.	Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2005 – 2011(% y on y).....	7
Tabel 1.3	Nilai Ekspor Total dan Ekspor Sektor Industri Provinsi Banten Tahun 2007-2010 (dalam rupiah).....	7
Tabel 1.4	Distribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi banten Tahun 2010 (dalam %).....	8
Tabel 1.5	Distribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010 (dalam %).....	9
Tabel 1.6	Persebaran Industri Pengolahan Sedang dan Kecil Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi banten Tahun 2007-2010.....	10
Tabel 1.7	Persebaran Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2007-2010.....	11
Tabel 1.8.	Perkembangan Gini Rasio Provinsi Banten Pada Tahun 2006-2009	12
Tabel 1.9.	Persebaran sekolah berdasarkan Tingkat dan Jenis di Provinsi Banten Tahun 2010.....	13
Tabel 1.10.	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Provinsi Banten Berdasarkan Kabupaten/Kota Pada Tahun 2008-2010.....	14
Tabel 1.11	Jumlah Dokter di Rumah Sakit dan Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010.....	14
Tabel 1.12	Sarana Penyalur Obat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010.....	15
Tabel 4.1	Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Provinsi Banten Tahun 2010.....	58
Tabel 4.2	Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota.....	66
Tabel 4.3.	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten, Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah).....	68
Tabel 4.4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Provinsi Banten ADH Konstan 2000 Menurut Kabupaten/ Kota (persen).....	69
Tabel 4.5.	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2002 – 2010.....	70
Tabel.4.6.	Persentase Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2002 – 2010.....	71
Tabel 4.7	Persentase Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten tahun 2007-2010.....	72
Tabel. 4.8	Perkembangan IPM di Provinsi Banten Tahun 1999-2010.....	73
Tabel 4.9.	Perkembangan Indikator Provinsi Banten Tahun 1999-2010.....	73
Tabel 5.1.	Perhitungan Indeks Williamson Provinsi Banten Tahun 2002-2010.....	78
Tabel 5.2	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2002-2010.....	80

Tabel 5.3	Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2002-2010.....	82
Tabel 5.4	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Provinsi Banten Berdasarkan Kabupaten/Kota Pada Tahun 2008-2010.....	85
Tabel 5.5	Rasio Murid-Guru Provinsi Banten Tahun 2008-2010	86
Tabel 5.6	Hasil Perhitungan Theil Indeks Provinsi Banten Tahun 2002-2010 .	88
Tabel. 5.7	Nilai Indeks Theil di Provinsi Banten tahun 2002-2010 Berdasarkan Pengelompokan Wilayah Utara-Selatan.....	91
Tabel 5.8	Nilai Indeks Theil di Provinsi Banten tahun 2002-2010 Berdasarkan Pengelompokan Daerah Maju-Bukan Maju	93
Tabel 5.9	Persentase Penduduk Usia 15 tahun keatas yang Bekerja di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2010 (dalam %)	95
Tabel 5.10	Upah Minimum Kabupaten/Kota per Bulan di Provinsi Banten Tahun 2007-2011 (dalam Rp).....	96
Tabel 5.11.	<i>Pearson Correlation</i> Indeks Williamson IPM.....	97
Tabel 5.12.	Persentase Penduduk Miskin berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2008-2010.....	99



DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Provinsi Banten.....	56
Grafik 1.1	Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2005 – 2011 (dalam %)	7
Grafik 1.2	Nilai Ekspor Total dan Ekspor Sektor Industri Provinsi Banten Tahun 2007-2011 (dalam rupiah).....	8
Grafik 1.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2007-2010 (dalam %).....	9
Grafik 1.4.	Perkembangan Indeks Gini Provinsi Banten Tahun 2002-2009	13
Grafik 4.1	Perkembangan Indeks Kesehatan (Angka Harapan Hidup)	75
Grafik 4.2.	Perkembangan Indeks Angka Melek Huruf di Provinsi Banten.....	75
Grafik 4.3.	Gambaran Perkembangan Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Banten	76
Grafik 4.4	Gambaran Perkembangan Indeks Daya Beli Masyarakat Di Provinsi Banten Tahun 1999-2010	77
Grafik 5.1	Gambaran Perkembangan Ketimpangan IPM di Provinsi Banten Tahun 2002-2010 dengan Perhitungan Indeks Williamson	79
Grafik 5.2.	Gambaran Perkembangan Ketimpangan AHH di Provinsi Banten Tahun 2002-2010 dengan Perhitungan Indeks Williamson	81
Grafik 5.3	Gambaran Perkembangan Ketimpangan AMH di Provinsi Banten Tahun 2002-2010 dengan Perhitungan Indeks Williamson	83
Grafik 5.4.	Gambaran Perkembangan Ketimpangan RLS di Provinsi Banten Tahun 2002-2010 dengan Perhitungan Indeks Williamson	84
Grafik 5.5	Gambaran Perkembangan Ketimpangan IDB di Provinsi Banten Tahun 2002-2010 dengan Perhitungan Indeks Williamson	87
Grafik. 5.6	Gambaran Perkembangan Indeks Theil Total di Provinsi Banten Tahun 2002-2010.....	89
Grafik 5.7	Gambaran Perkembangan Indeks Theil <i>Wihthin</i> dan Theil <i>Between</i> di Provinsi Banten Tahun 2002-2010	90
Grafik 5.8	Gambaran Perkembangan Indeks Theil Total di Provinsi Banten Berdasarkan Kelompok Daerah Utara dan Selatan tahun 2002-2010	92
Grafik 5.9.	Gambaran Perkembangan Ketimpangan Kemiskinan di Provinsi Banten dengan Perhitungan Indeks Theil	94
Grafik5.10	Indeks Theil Total PDRB dan Kemiskinan di Provinsi Banten, Tahun 2002-2010.....	98

BAB 1

PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar perlu dilakukannya penelitian, perumusan pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, sistematika penulisan laporan penelitian secara keseluruhan, dan alur berpikir penelitian ini.

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri dari banyak wilayah daratan yang tersekat-sekat oleh wilayah perairan, mengharuskan Indonesia untuk menerapkan sistem pemerintahan yang paling cocok dan sesuai dengan karakter tersebut. Sistem desentralisasi dianggap sebagai sistem yang paling masuk akal dan memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia karena akan melahirkan bentuk-bentuk pemerintahan baru yang berada pada level wilayah yang lebih rendah. Dengan pemerintahan yang terbentuk pada level wilayah yang lebih rendah tersebut, berbagai urusan dan tanggung jawab daerah dapat dikelola dengan fokus dan sesuai potensi masing-masing daerah.

Terkait dengan alasan mengapa desentralisasi dipilih untuk menjadi sistem pemerintahan suatu negara, Syarif (2000) dalam Syafrizal (2008, hal 230) menyebutkan bahwa terdapat setidaknya tiga alasan pokok mengapa desentralisasi diperlukan, *pertama* adalah *political equality*, *kedua* adalah *local accountability*, dan *ketiga* adalah *local responsiveness*. *Political equality* terkait dengan alasan otonomi daerah sebagai peningkat kesetaraan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah. Adapun alasan *local accountability* adalah terkait dengan peningkatan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah. Terakhir, *local responsiveness* adalah alasan yang terkait dengan peningkatan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masalah-masalah sosial-ekonomi yang terjadi di daerahnya. Ketiga unsur ini adalah unsur yang sangat penting bagi peningkatan upaya pembangunan dan kesejahteraan sosial di daerah.

Di Indonesia, sistem desentralisasi dijawantahkan melalui UU No 22/1999 yang telah diubah melalui UU No 32/2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang mensyaratkan adanya sebuah sistem otonomi daerah dan daerah otonom yang terbagi-bagi berdasarkan wilayah yurisdiksi dan administrasi. Selama 12 tahun perjalanan otonomi daerah di Indonesia, telah lahir 205 daerah otonom baru yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota (Subdit Otonomi Daerah Kemendagri, 2010). Jumlah ini akan semakin bertambah seiring dengan proses pemekaran daerah yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dalam tabel 1.1 dapat kita lihat perkembangan pembentukan daerah otonom baru di Indonesia pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2009.

Pembentukan daerah otonom (desentralisasi administrasi¹ dan politik²) dilihat sebagai salah satu aspek penting untuk menjalankan desentralisasi yang selanjutnya akan melahirkan desentralisasi fiskal dan desentralisasi ekonomi, sehingga tercipta mobilitas ekonomi ke daerah-daerah baru. Jackson (2008) dalam Tarigan (2010) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah melihat pemekaran wilayah sebagai upaya untuk secara cepat keluar dari keterpurukan.

Ada beberapa pertimbangan yang mendasari semangat membentuk daerah baru, antara lain a) *preference of homogeneity*³; b) *fiscal spoil*; c) *bureaucratic and political rent seeking*⁴; dan d) *administrative dispersion*⁵. (Jackson, 2008 dalam Tarigan 2010). Dari beberapa hal yang disebutkan Jackson (2008) sebagai alasan yang mendasari pemekaran wilayah, *fiscal spoil* menjadi salah satu alasan yang paling menguatkan motif pemekaran wilayah. *Fiscal spoil* adalah insentif untuk memekarkan diri karena mendapatkan DAU/DAK. Dengan adanya jaminan dana transfer, khususnya DAU, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menghasilkan keyakinan bahwa daerah tersebut akan dibiayai⁶. Jaminan tersebut

¹ Desentralisasi administrasi adalah “pelimpahan wewenang yang dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik “ (Sidik, 2002).

² Desentralisasi politik adalah memberikan kekuasaan lebih pada rakyat atau perwakilannya dalam penentuan keputusan public (Zen,2010).

³ Keinginan untuk membentuk wilayah baru seiring dengan semakin menguatnya kecenderungan pengelompokkan etnis pada wilayah lama.

⁴ Alasan politik dimana dengan adanya wilayah baru akan memunculkan wilayah kekuasaan politik baru sehingga aspirasi politik masyarakat jauh lebih dekat.

⁵ Mengatasi rentang kendali pemerintahan.

⁶ Pembiayaan tersebut melalui alokasi untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) maupun peluang kesempatan kerja melalui peningkatan jumlah staf pemerintah daerah.

diharapkan juga berdampak terhadap meningkatnya aktivitas perekonomian, baik melalui belanja langsung pegawai maupun pembelanjaan barang dan jasa dari aktivitas pemerintahan. Dalam kacamata ini, akumulasi aktivitas ekonomi diharapkan berimplikasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum.

Selain desentralisasi fiskal, desentralisasi juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola ekonomi daerahnya melalui desentralisasi ekonomi. Desentralisasi ekonomi ditandai melalui penyerahan kewenangan dan tanggung jawab pembangunan ekonomi daerah kepada pemerintah sebagai pengelola ekonomi daerah daerah dan masyarakat setempat sebagai aktor ekonomi. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Arsyad (1999, hal 108). Beliau mengemukakan bahwa "*Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.* Melalui pendapatnya tersebut, Arsyad (1999) ingin menekankan bahwa kegiatan pembangunan ekonomi daerah tidak lepas dari setidaknya tiga unsur utama. *Pertama*, unsur potensi atau kekayaan daerah sebagai modal dasar pembangunan, *kedua*, unsur Pemerintah daerah sebagai penanggung jawab sekaligus pelaksana kegiatan ekonomi daerah, serta *ketiga* unsur swasta sebagai mitra pemerintah atau sebagai *stakeholder* kegiatan ekonomi daerah. Ketiganya akan menentukan arah dan proses pembangunan ekonomi pada daerahnya masing-masing.

Tabel 1.1 Perkembangan Pembentukan Daerah Otonom Baru di Indonesia Tahun 1999-2009

No.	Propinsi	Jumlah Daerah Otonom Baru			
		Provinsi	Kabupaten	Kota	Total
1	NAD	0	10	3	13
2	Sumatera Utara	0	12	2	14
3	Sumatera Barat	0	4	1	5
4	Riau	0	6	1	7
5	Jambi	0	4	1	5
6	Sumatera Selatan	0	5	3	8
7	Bengkulu	0	6	0	6
8	Lampung	0	6	1	7
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	4	0	5
10	Kepulauan Riau	1	4	2	7
11	DKI Jakarta	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	1	4	5
13	Jawa Tengah	0	0	0	0
14	Banten	1	0	3	4
15	Jawa Timur	0	0	1	1
16	DI Yogyakarta	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0
18	NTB	0	2	1	3
19	NTT	0	8	0	8
20	Kalimantan Barat	0	6	1	7
21	Kalimantan Tengah	0	8	0	8
22	Kalimantan Selatan	0	2	1	3
23	Kalimantan Timur	0	6	1	7
24	Sulawesi Utara	0	8	2	10
25	Sulawesi Tengah	0	6	0	6
26	Sulawesi Selatan	0	3	1	4
27	Sulawesi Tenggara	0	6	1	7
28	Gorontalo	1	4	0	5
29	Sulawesi Barat	1	2	0	3
30	Maluku	0	7	1	8
31	Maluku Utara	1	5	2	8
32	Papua	0	22	0	22
33	Papua Barat	1	7	1	9
Total		7	164	34	205

Sumber: Subdit Monitoring dan Evaluasi, Ditjen Otda

Permasalahan yang kemudian lahir adalah bahwa desentralisasi ini seringkali berjalan tidak sesuai dengan yang diinginkan karena akan melahirkan dampak adanya perbedaan hasil pembangunan baik secara ekonomi maupun nonekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan dalam unsur kegiatan ekonomi, baik dari sisi potensi daerah, kualitas pemerintah dalam menata kelola ekonomi daerah, maupun keterlibatan *stakeholder* dalam aktivitas ekonomi, dan juga adanya perbedaan dalam sumber daya alam, sumber daya manusia, dan latar belakang daerah.

Dari sisi potensi daerah, keuntungan kompetitif daerah berupa berlimpahnya potensi sumber daya alam maupun non-sumber-daya-alam terkadang berbeda satu sama lain. Daerah yang berlimpah sumber daya alam akan relatif lebih diuntungkan karena memiliki kesempatan untuk lebih memanfaatkan potensi tersebut sejauh untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dari sisi kemampuan Pemerintah Daerah dalam menata kelola ekonomi daerah, pemerintah yang dapat menciptakan kebijakan-kebijakan inovatif tentu akan lebih mampu membangun perkenomian daerahnya daripada pemerintah daerah yang hanya mengandalkan dana perimbangan Pemerintah Pusat dan cara-cara lama membangun ekonomi.

Dari sisi keterlibatan *stakeholder*, keterlibatan masyarakat daerah, pengusaha domestik, dan investor asing tentu akan semakin meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus menciptakan iklim yang kondusif bagi investor agar investasi ke daerah semakin meningkat. Sementara dari segi Sumber Daya Manusia baik ditinjau dari segi pendidikan maupun kesehatan tentu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu daerah. Kualitas masyarakat yang baik tentu akan menjadi modal dasar bagi keberhasilan pembangunan, dan sebaliknya jika kualitas SDM rendah malah akan menjadi penghambat dalam pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus mampu mengelola SDM yang dimiliki sehingga berdaya guna dan mampu membantu keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Bagi daerah yang tidak dapat menciptakan kondisi tersebut, kesempatan daerahnya untuk membangun perekonomian tentu akan terhambat dibandingkan dengan daerah yang secara progresif membangun ketiga unsur tersebut. Perbedaan

kondisi inilah yang melahirkan perbedaan kondisi ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Terkait dengan kesenjangan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya, banyak ahli yang menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu data yang memperlihatkan kondisi perbedaan pertumbuhan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Data PDRB digunakan karena menunjukkan produktivitas ekonomi suatu daerah. Suatu daerah dikatakan makmur apabila nilai PDRB per kapita semakin tinggi. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita suatu daerah, maka pertumbuhan ekonominya dianggap semakin tinggi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tidak serta merta diiringi oleh distribusi pendapatan yang merata kepada seluruh masyarakat daerah tersebut. Inilah kemudian yang menciptakan kesenjangan ekonomi dalam suatu daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kesenjangan atau ketimpangan ekonomi adalah kondisi yang digambarkan oleh ketidakmerataan hasil pertumbuhan ekonomi suatu daerah kepada masyarakat daerah tersebut.

Salah satu daerah yang merupakan daerah hasil pemekaran adalah Provinsi Banten. Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2000 dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Banten sendiri memiliki delapan kabupaten/kota dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda baik dari segi ekonomi maupun non ekonomi (sosial & budaya) karenanya wajar jika terdapat ketimpangan antar wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Banten.

Sebagai provinsi yang baru 12 Tahun berdiri, Banten masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintahannya, salah satunya adalah masalah ketimpangan (ekonomi dan non-ekonomi). Sebagai salah satu wilayah penyangga ibukota, laju pertumbuhan ekonomi Banten memang tidak terbilang spesial. Meskipun beberapa kali pertumbuhan ekonomi Banten pernah berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun dua tahun belakangan ini laju pertumbuhan ekonomi Banten kembali mengalami penurunan dan berada di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel. 1.2. Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2005 – 2010 (% y on y)

Wilayah	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Provinsi Banten	5.88	5.57	6.04	5.77	4.69	5.94
Nasional	5.6	5.51	6.32	6.1	4.58	6.10

Sumber: BPS Provinsi Banten, BPS - Statistik Indonesia.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terjadi kondisi fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi Banten sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Pada tahun 2005 dan 2006, pertumbuhan ekonomi Banten berada di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu sebesar 5,88 dari 5,6 pada 2005 dan 5,57 dari 5,51 pada tahun 2007. Namun pada tahun 2007 sampai dengan 2010, laju pertumbuhan ekonomi Banten cenderung menurun, sehingga pada tahun 2010 jika dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional, Banten hanya menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,94 dari 6,10 pada 2010.

Menurunnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Banten dan Nasional pada tahun 2008 – 2009 dipengaruhi oleh krisis ekonomi global sehingga mempengaruhi nilai ekspor yang sebagian besar mendominasi sektor industri pengolahan yang merupakan sektor terbesar dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan PDRB Provinsi Banten. Seperti tabel dibawah ini, ekspor total dan ekspor sektor industri pada tahun 2009 mengalami penurunan.

Tabel 1.3 Nilai Ekspor Total dan Ekspor Sektor Industri Provinsi Banten Tahun 2007-2010 (dalam rupiah)

	2007	2008	2009	2010
Total	6,202.00	6,971.91	5,806.38	8,365.21
Industri	6,072.57	6,781.70	5,567.00	7,754.53

Sumber: BPS Provinsi Banten

Selain menurunnya pertumbuhan ekonomi Banten juga terjadi ketimpangan laju pertumbuhan ekonomi antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya Seperti yang diketahui, bahwa selama 12 tahun berdiri

Provinsi Banten memiliki 8 kabupaten/kota yang dibatasi oleh wilayah yurisdiksi dan administrasi. Ke delapan kabupaten/kota tersebut tidak serta merta menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sama. Laju pertumbuhan kabupaten/kota berfluktuasi (lihat tabel 1.4) sehingga pertumbuhan yang ada merupakan pertumbuhan yang belum optimal.

Tabel 1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2007-2010 (dalam %)

Kab/Kota	2007	2008	2009	2010
Kab. Pandenglang	4.48	4.29	4.21	6.77
Kab. Lebak	4.90	4.06	4.10	4.15
Kab. Tangerang	6.61	6.17	5.29	6.71
Kab. Serang	5.12	4.41	3.18	4.15
Tangerang	6.86	6.37	5.74	6.68
Cilegon	5.48	5.02	4.83	5.26
Serang			5.44	7.63
Tangsel				8.70

Sumber: BPS Provinsi Banten

Pada kenyataannya, terdapat beberapa daerah yang mendominasi kegiatan ekonomi Banten karena menjadi pusat kegiatan ekonomi. Disparitas ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Banten dapat terlihat, salah satunya melalui tabel distribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Provinsi Banten seperti yang terlihat di bawah ini. Industri pengolahan masih didominasi oleh Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon. Sedangkan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak masih didukung sektor pertanian (sektor bahan mentah) yang merupakan tahap pertama dalam pembangunan (Clark, 1939). Dan hanya 2 kota yang sudah ada di tahap akhir pembangunan menurut hipotesis Clark (tahap sektor jasa), yaitu Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang.

Tabel 1. 5 Distribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010 (dalam %)

Kab/kota	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kabupaten									
Pandeglang	30.32	0.07	10.47	2.66	4.83	23.49	7.90	5.81	14.45
Lebak	34.23	1.39	9.10	0.56	4.01	25.77	9.91	4.45	10.58
Tangerang	10.54	0.10	53.08	10.88	0.82	9.65	11.14	0.35	3.44
Serang	15.67	0.08	59.55	4.62	2.57	8.15	3.63	2.61	3.12
Kota									
Tangerang	0.15	0.00	45.49	0.67	2.29	32.84	12.25	3.53	2.78
Cilegon	2.20	0.07	55.13	7.57	0.58	19.29	9.24	4.14	1.79
Serang	8.68	0.02	4.48	1.53	20.26	24.00	6.62	10.03	24.38
Tangsel	0.77	0.02	14.44	3.27	7.40	32.16	14.81	12.88	14.24

Keterangan:

1 : Pertanian, Peternakan, Kehutanan, & Perikanan

2 : Pertambangan & Penggalian

3 : Industri Pengolahan

4 : Listrik, Gas & Air Bersih

5 : Konstruksi

6 : Perdagangan, Hotel & Restoran

7 : Pengangkutan & Komunikasi

8 : Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan

9 : Jasa-Jasa

Sumber: BPS, telah diolah kembali

Empat dari 8 kabupaten/kota di Banten sangat bergantung pada sektor manufaktur. Letaknya sebagai salah satu daerah penyangga ibukota memang secara ekonomi menguntungkan Banten. Sampai dengan saat ini terdapat beberapa industri pengolahan yang menempatkan pabriknya di Provinsi Banten, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1.6 Persebaran Industri Pengolahan Sedang dan Kecil Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2007-2010

Kab/ Kota	2007	2008	2009	2010
Kabupaten				
Pandeglang	9	17	20	13
Lebak	13	13	11	12
Tangerang	882	782	750	749
Serang	117	162	144	144
Kota				
Tangerang	687	670	610	611
Cilegon	72	69	72	72
Serang	6	14	15	19
Tangerang Selatan	-	77	73	73
Banten	1,786	1,804	1,695	1,693

Sumber: Banten Dalam Angka 2011

Dari tabel 1.6 di atas dapat terlihat bahwa persebaran Industri Pengolahan di Provinsi Banten hanya terpusat pada beberapa wilayah, yaitu Kabupaten Tangerang dengan 749 buah industri pengolahan, Kota Tangerang dengan 611, dan Kota Serang dengan 144 buah industri pengolahan pada tahun 2010. Adapun kabupaten/kota lainnya hanya ditempati sedikit Industri Pengolahan. Kota Cilegon yang 55,13% pendapatannya berasal dari industri manufaktur ternyata hanya memiliki sedikit industri pengolahan. Hal ini dapat disebabkan besarnya kapasitas dari masing-masing industri pengolahan yang berada di Kota Cilegon.

Seperti yang telah diketahui (lihat tabel 1.5), industri pengolahan merupakan kegiatan ekonomi yang menyumbang PDRB terbesar untuk Provinsi Banten. Di satu sisi, terdapatnya industri pengolahan di suatu daerah juga akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Ketidakmerataan persebaran industri pengolahan ini juga menyebabkan ketidakmerataan jumlah tenaga kerja yang diserap pada suatu kabupaten/kota. Di Provinsi Banten, penyerapan tenaga kerja paling banyak dimiliki oleh ketiga kabupaten/kota dengan jumlah industri pengolahan terbanyak, yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Cilegon seperti yang terlihat pada tabel 1.7.

Tabel 1.7 Persebaran Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2007-2010

Kab/ Kota	2007	2008	2009	2010
Kab				
Pandeglang	552	1,641	1,170	1,309
Lebak	953	1,289	1,335	1,348
Tangerang	210,561	180,918	177,941	177,714
Serang	80,889	65,889	63,889	64,536
Kota				
Tangerang	171,658	183,803	180,319	180,708
Cilegon	21,075	21,946	20,806	20,783
Serang	330	713	765	856
Tangerang Selatan	-	27,924	27,540	27,601
Banten	486,018	484,123	473,765	474,855

Sumber: BPS Provinsi Banten

Tingkat ketimpangan ekonomi pada Provinsi Banten yang diukur dengan menggunakan indeks Gini pada 8 kabupaten/kota yang ada juga dapat menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masih terjadi.

Berdasarkan tabel 1.6, tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2009, tingkat ketimpangan mencapai 0,35 naik sekitar 12,9% dari tahun 2006 (0.310) dan meningkat sebesar 6% dari indeks gini pada tahun 2002 (0.330). Jika kondisi ini dibiarkan, tingkat ketimpangan akan semakin meningkat dan memungkinkan untuk mencapai rasio lebih dari 0,4 (tergolong tinggi).

Tabel 1.8. Perkembangan Gini Rasio Provinsi Banten Pada Tahun 2006-2009

KAB/ KOTA	2002	2006	2007	2008	2009
Kabupaten					
Pandeglang	0.288	0.210	0.230	0.220	0.210
Lebak	0.286	0.260	0.220	0.240	0.200
Tangerang	0.257	0.310	0.250	0.230	0.320
Serang	0.275	0.290	0.270	0.240	0.230
Kota					
Tangerang	0.202	0.230	0.220	0.210	0.330
Cilegon	0.262	0.260	0.270	0.250	0.290
Serang	-	-	-	-	0.310
Tangsel	-	-	-	-	
BANTEN	0.330	0.310	0.290	0.300	0.350

Sumber: telah diolah kembali dari berbagai sumber

Tampak dari tabel 1.8 diatas bahwa perkembangan Indeks Gini Provinsi Banten sejak awal terbentuknya mengalami penurunan diawal-awal tahun sampai dengan tahun 2007 dan mulai meningkat kembali sejak tahun 2008 hingga tahun 2009. Terjadi peningkatan Indeks Gini dari tahun 2007 ke 2009 dikarenakan penurunan jumlah industri pengolah Banten yang menyebabkan ekspor industri menurun sehingga terjadi penurunan PDRB Provinsi Banten.

Tingkat pendidikan mayoritas masyarakat suatu daerah akan menentukan kondisi ekonomi mayoritas masyarakat di daerah tersebut. Sebaliknya, tingkat ekonomi pun akan mempengaruhi ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan ketersediaan sarana pendidikan, yaitu jumlah gedung sekolah pada 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Berdasarkan tabel jumlah sekolah di kabupaten/kota di Provinsi Banten pada tahun 2010 di bawah dapat terlihat bahwa secara keseluruhan sarana gedung sekolah sudah tersebar di seluruh wilayah Provinsi Banten. Untuk Tingkat Sekolah Dasar (SD), dapat dikatakan bahwa persebaran sekolah cukup merata dan banyak di seluruh kabupaten/kota. Untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), jumlah sekolah terbanyak dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang,

Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang. Namun yang paling terlihat adalah pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dimana keberadaan SMA negeri masih sangat terbatas khususnya pada Kota Serang, Cilegon, dan Kabupaten Pandeglang.

Tabel 1.9. Persebaran sekolah berdasarkan Tingkat dan Jenis di Provinsi Banten Tahun 2010

Kabupaten/Kota	Jenis Sekolah					
	SD		SMP		SMA	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Pandeglang	875	12	120	36	17	15
Lebak	765	11	156	33	26	24
Tangerang	760	137	75	196	29	88
Serang	706	14	90	71	25	36
Tangerang	390	127	28	149	15	67
Cilegon	159	24	13	24	5	13
Serang	227	15	34	37	6	20
Tangerang Selatan	209	84	18	104	11	44

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2011

Selain berdasarkan jumlah sarana sekolah yang ada di Provinsi Banten, Kesenjangan pendidikan juga dapat dilihat dari Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf. Rata-rata Lama sekolah adalah indeks yang menggambarkan lamanya masa belajar mayoritas masyarakat daerah tersebut dalam hitungan tahun. Jika merunut pada UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), seharusnya lama sekolah minimum bagi masyarakat Indonesia adalah 9 tahun.

Tabel 1.10. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Yang Ditamatkan Di Provinsi Banten Tahun 2010

Kab/kota	< SD	SD	SLTP	SLTA	DI/II	D III - Univ
Pandeglang	29.25	41.48	15.11	10.99	0.59	2.58
Lebak	33.81	45.95	11.99	6.89	0.20	1.16
Serang	21.56	26.86	22.77	23.15	0.40	5.26
Tangerang	29.14	37.49	17.48	13.77	0.58	1.54
Tangerang	13.88	19.07	21.69	36.10	0.66	8.60
Cilegon	15.06	23.05	21.26	33.12	0.80	6.71
Serang	22.97	30.92	17.34	20.11	0.60	8.06
Tangerang Selatan	13.74	17.75	17.68	34.18	1.13	15.52
Banten	22.25	29.48	18.92	22.66	0.58	6.11

Sumber: Banten Dalam Angka 2011

Ketimpangan sosial juga dapat dilihat dari sisi kesehatan masyarakat di suatu daerah. Kesehatan menjadi salah satu faktor dalam proses pembentukan modal insani, yaitu proses peningkatan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan seluruh penduduk negara yang bersangkutan (Jhingan,2003). Proses ini mencakup kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial lainnya.

Tabel 1.11 Jumlah Dokter di Rumah Sakit dan Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010

Kab/kota	Rumah Sakit				Puskesmas			
	Dokter Umum	Dokter Ahli	Dokter Gigi	Total	Dokter Umum	Dokter Ahli	Dokter Gigi	Total
Pandeglang	45	15	11	71	45	-	11	56
Lebak	59	34	27	120	59	-	27	86
Serang	264	298	112	674	136	3	70	209
Tangerang	69	26	25	120	39	-	20	59
Tangerang	317	642	172	1131	79	-	63	142
Cilegon	98	76	29	203	25	-	18	43
Serang	20	66	24	110	27	-	15	42
Tangerang Selatan	43	3	31	77	43	3	31	77
Banten	915	1160	431	2506	453	6	255	714

Sumber: Banten Dalam Angka 2011

Dari tabel 1.11 dapat dilihat lebih banyak dokter di rumah sakit daripada di puskesmas. Artinya, masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk

berobat. Selain itu ada ketidaksesuaian pemenuhan kebutuhan antara kepadatan penduduk dengan jumlah dokter yang tersedia. Kota Tangerang Selatan yang berkepadatan kedua tertinggi setelah Kota Tangerang hanya memiliki 77 dokter di Rumah Sakit dan 77 dokter di puskesmas. Untuk kepadatan 5.597 orang per km², 77 dokter sangatlah kurang. Begitu juga dengan daerah lain, jumlah dokter yang tersedia tidak cukup untuk mengobati apalagi merawat masyarakat agar hidup sehat.

Tabel 1.12 Sarana Penyalur Obat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010

Kab/kota	Industri Farmasi	Industri Kecil Obat lainnya	Pedagang Besar Farmasi	Apotik	Toko Obat	Rumah Sakit	Jumlah
Pandeglang	-	2	-	35	11	1	49
Lebak	-	-	1	27	17	3	48
Serang	15	54	21	183	54	11	338
Tangerang	4	3	10	28	17	3	65
Tangerang	10	82	22	230	60	23	418
Cilegon	-	3	1	50	6	5	65
Serang	-	4	8	45	21	5	83
Tangerang Selatan	1	36	18	215	60	18	348
Banten	30	184	81	813	246	69	1414

Sumber: Banten Dalam Angka 2011

Data sarana penyalur obat rendahnya industri farmasi yang akan berakibat rendahnya inovasi untuk penemuan obat-obat baru. Sangat sedikitnya sarana penyalur obat menunjukkan rentatnya masyarakat akan penyakit.

Jika kondisi tersebut dibiarkan, di masa yang akan datang tingkat kesenjangan akan semakin lebar karena pendidikan, kesehatan, tingkat kesejahteraan, dan tingkat ekonomi saling terkait. Oleh karena hal tersebut, perlu dilakukan tindakan agar kesenjangan ekonomi dan sosial di Provinsi Banten dapat diminimalisasi. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan mencari tahu gambaran kesenjangan ekonomi dan sosial Provinsi Banten.

Terdapat hubungan yang positif antara tingkat PDRB per kapita dengan tingkat kesejahteraan sosial, bila PDRB per kapita meningkat maka daya beli

masyarakat akan naik, kesempatan kerja dan perekonomian akan semakin membaik sehingga gizi, kesehatan, pendidikan, dan kebebasan memilih pekerjaan dan masa depan kondisinya meningkat (Manurung, 2008).

1.2. Rumusan Masalah

Selain dari sisi ketimpangan ekonomi (dilihat dari PDRB), penelitian ini juga akan melihat ketimpangan dari sisi non-ekonomi atau sisi sosialnya yaitu melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan. Hal ini karena manusia sebagai pelaku utama dalam pembangunan, sehingga kualitas manusia menjadi salah satu modal dasar keberhasilan suatu pembangunan yang harus diperhatikan. Dalam IPM terdapat beberapa hal yang menjadi indikator pembangunan manusia yaitu dari segi kesehatan dengan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH), dari segi pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH), serta dari segi ekonomi adalah Indeks Daya Beli Masyarakat (IDB).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penelitian ini akan fokus kepada:

1. Bagaimana gambaran ketimpangan pembangunan manusia antar kabupaten/kota di Provinsi Banten, ditinjau dari pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan?
2. Bagaimana korelasi antar indikator yang digunakan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, penelitian diharapkan dapat menjawab pertanyaan masalah penelitian yaitu :

1. Menggambarkan Ketimpangan Pembangunan Manusia dari segi ekonomi (dari segi PDRB Per Kapita) dan segi sosial (dari segi Pendidikan dan Kesehatan) antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
2. Mengetahui variabel apa yang paling timpang (di antara pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan).
3. Mengetahui korelasi antar indikator yang digunakan.
4. Memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan gambaran ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten.

1.4. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa sudut pandang yang menentukan pentingnya dari penelitian ini, yakni :

1. Secara akademik : memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran pada ilmu ekonomi pembangunan khususnya tentang bagaimana *ketimpangan pembangunan manusia yang terjadi di Provinsi Banten*.
2. Secara praktis : memberikan sumbangan pemikiran dan pengalaman bagi lembaga eksekutif dan legislatif di Provinsi Banten, serta bagi daerah lainnya khususnya tentang ketimpangan pendapatan, pendidikan dan kesehatan di Provinsi Banten.

1.5. Ruang Lingkup

Sesuai dengan tujuan penelitian maka akan dibahas dalam ruang lingkup pada konsep ketimpangan pembangunan manusia, dari sisi ekonomi dengan data PDRB per kapita dan dari sisi sosial/non-ekonomi dengan data Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri dari Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah, Indeks Daya Beli, dan tingkat kemiskinan.

Data yang digunakan adalah data tahun 2002 sampai dengan 2010 pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. Pada data tahun 2002-2008, penelitian ini menggunakan data 6 kabupaten/kota dimana Kota Serang masih menjadi bagian dari Kabupaten Serang dan Kota Tangerang Selatan masih menjadi bagian dari Kota Tangerang.

1.6. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, sistematika, dan alur berpikir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengkaji berbagai literatur yang terkait dengan teori yang mendasari penelitian dalam tesis ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang sumber data, metode pengumpulan data, definisi variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH

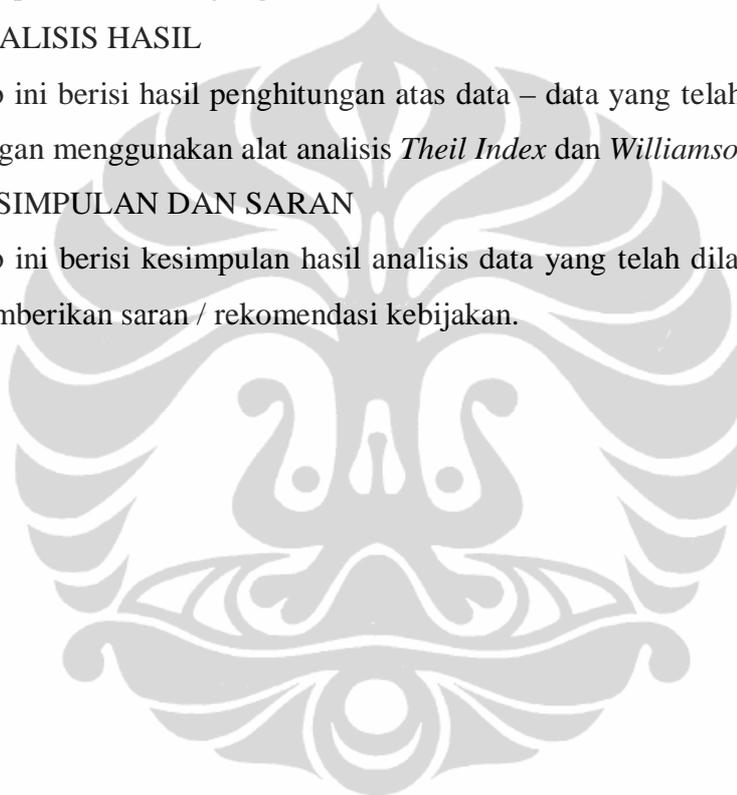
Bab ini akan menjelaskan gambaran umum wilayah Banten dan 8 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Banten.

BAB V ANALISIS HASIL

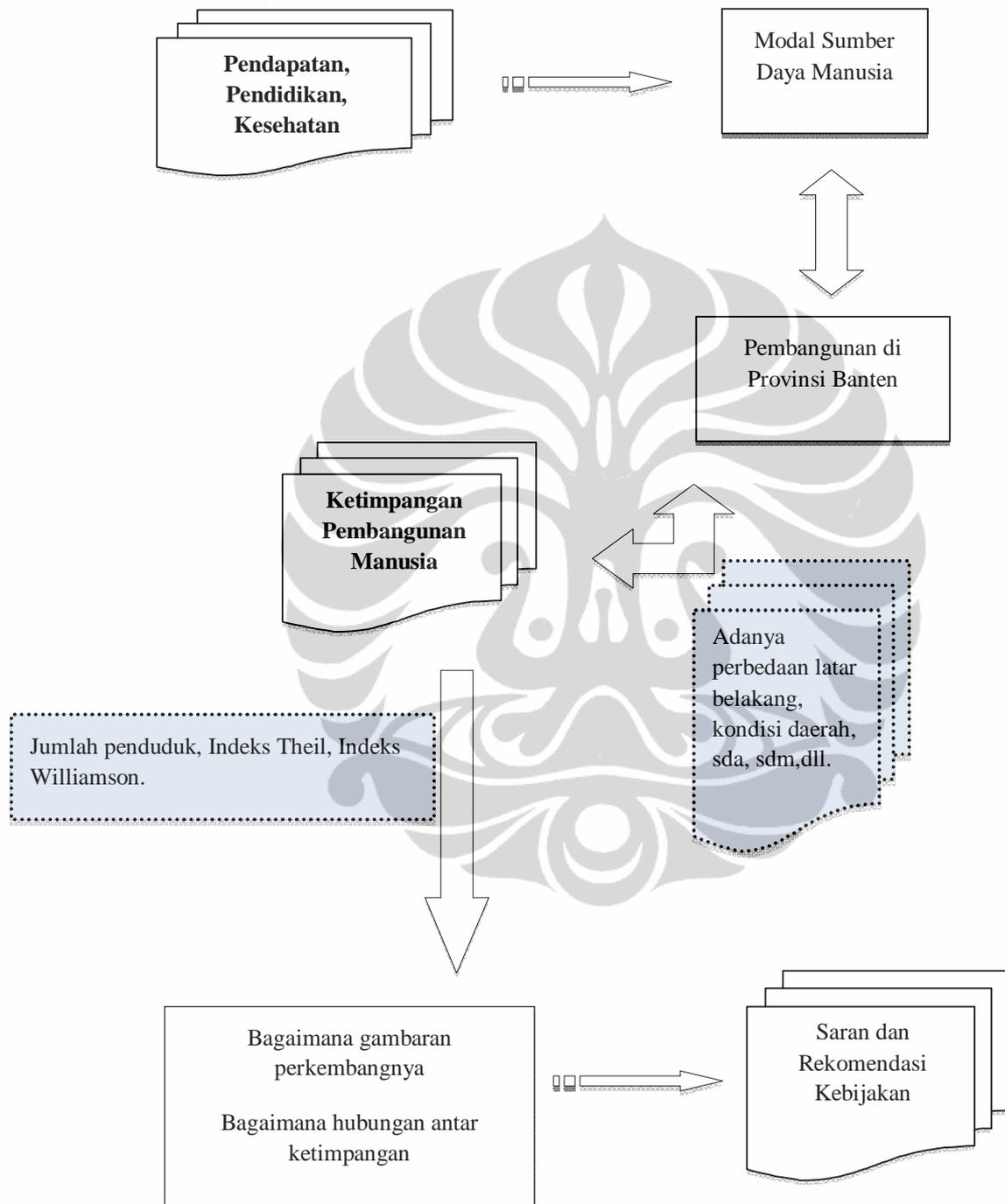
Bab ini berisi hasil penghitungan atas data – data yang telah diperoleh, dengan menggunakan alat analisis *Theil Index* dan *Williamson Index*.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan hasil analisis data yang telah dilakukan, dan memberikan saran / rekomendasi kebijakan.



I.6. Alur Berpikir



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II akan dikaji berbagai literatur yang terkait dengan ketimpangan ekonomi dan sosial. Berbagai pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kerangka berpikir untuk membahas pertanyaan penelitian yang diajukan.

2.1 Pembangunan Ekonomi

Penerapan otonomi daerah yang ditandai dengan desentralisasi pada wilayah Indonesia menyebabkan peningkatan pembangunan regional. Sistem desentralisasi yang menyerahkan kewenangan pada daerah menjadikan masing-masing daerah akan berusaha meningkatkan pembangunan di daerahnya masing-masing. Pembangunan regional tidak hanya terbatas pada satu aspek, namun meliputi berbagai aspek dalam masyarakat, baik aspek ekonomi maupun non ekonomi. Menurut Jhingan (2003) pembangunan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber alam, sumber daya manusia, modal, usaha, teknologi sebagai faktor ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik, sikap budaya, nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang, sebagai faktor non-ekonomi.

Faktor ekonomi, yaitu:

- (i) Sumber Alam. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber alam atau tanah, mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber laut. Namun kekayaan alam saja belum cukup dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang terpenting adalah pemanfaatannya secara tepat dengan teknologi yang baik sehingga lebih efisien;
- (ii) Akumulasi Modal. Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Pembentukan modal merupakan

investasi dalam bentuk barang – barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional dan pendapatan nasional;

- (iii) Organisasi. Disamping perusahaan swasta, organisasi juga mencakup pemerintah, bank dan lembaga internasional yang ikut terlibat dalam penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi;
- (iv) Kemajuan Teknologi. Perubahan teknologi berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau inovasi baru sehingga mampu meningkatkan produktivitas buruh, modal, dan faktor produksi lainnya;
- (v) Pembagian Kerja dan Skala Produksi. Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas, sehingga membawa ke arah ekonomi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri.

Faktor nonekonomi juga memiliki arti yang penting dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

- (i) **Faktor Sosial.** Jika perkembangan ekonomi ingin berjalan dengan baik, pandangan, nilai, dan lembaga sosial harus diubah. Perubahan hanya mungkin terjadi melalui penyebaran pendidikan dan ilmu pengetahuan. Orang harus menyadari cita-cita dan tujuan hidup mereka sehingga orang harus memiliki kemampuan untuk meraihnya;
- (ii) **Faktor Manusia.** Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah sumber daya manusia tetapi lebih kepada efisiensi mereka, ini yang disebut pembentukan modal insani, dimana proses ini mencakup kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial;
- (iii) **Faktor Politik dan Administrasi.** Pemerintah harus dapat memberikan kondisi administrasi yang bersih dan situasi politik yang stabil, sehingga dapat merangsang dan mendorong kegiatan ekonomi.

Pembangunan regional mengacu pada pertumbuhan dan perubahan di berbagai aspek dalam suatu daerah. Menurut Meier (1995), pembangunan ekonomi merupakan *“suatu proses dimana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang dengan catatan jumlah penduduk yang hidup di bawah “garis kemiskinan*

absolut” tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (dalam Kuncoro, 2010). Karena merupakan suatu proses, pembangunan ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi dan perubahan kelembagaan. Perubahan struktur ekonomi dapat dicontohkan ketika ada perubahan dari pertanian menuju industri atau jasa. Sedangkan perubahan kelembagaan terjadi melalui reformasi kelembagaan itu sendiri.

Arsyad (1999) mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah “*suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut*”. Proses ini mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat dipahami bahwa tujuan dari pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah.

Walaupun definisi mengenai teori pertumbuhan ekonomi telah banyak dikemukakan oleh para ahli, namun belum ada suatu teori yang mampu menjelaskan pembangunan ekonomi secara komprehensif. Meskipun begitu, terdapat beberapa teori yang secara parsial telah mengarahkan pada pemahaman mengenai arti penting dari suatu pembangunan ekonomi daerah.

1. Teori Ekonomi Neo Klasik

Teori ini tidak memiliki dimensi spasial (ruang) yang signifikan, namun teori ekonomi klasik memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah, yakni keseimbangan dan mobilitas faktor produksi. Dengan kata lain, sistem perekonomian akan

mencapai keseimbangan jika modal (dari faktor produksi) dapat mengalir tanpa pembatasan.

2. Teori Basis Ekonomi

Teori ini menyatakan bahwa penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Jika sumber daya lokal yakni tenaga kerja dan bahan baku untuk industri dipasok secara lokal, maka akan tercipta kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja. Namun, model ini didasarkan pada permintaan eksternal dan bukan internal sehingga memiliki ketergantungan terhadap kekuatan pasar baik nasional maupun internasional.

3. Teori Lokasi

Lokasi berperan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan daerah, karena perusahaan umumnya cenderung meminimumkan biaya dengan cara mencari lokasi yang dekat dengan pasar. Variabel lain yang mempengaruhi kualitas suatu lokasi adalah upah tenaga kerja, biaya energi, ketersediaan pemasok, komunikasi, fasilitas-fasilitas pendidikan dan latihan, kualitas pemerintah daerah, serta sanitasi. Meskipun begitu, perkembangan teknologi dan komunikasi telah menjadikan teori ini kurang signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan daerah.

4. Teori Tempat Sentral

Hirarki tempat selalu dianggap keberadaannya oleh teori ini. Jika terdapat suatu tempat sentral, maka tempat sentral tersebut didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya berupa industri dan bahan baku. Dalam konteks masa kini, teori tempat sentral dapat diibaratkan sebagai kota metropolitan dengan kota penyangganya.

5. Teori Kausasi Kumulatif

Konsep dasar dari teori ini adalah buruknya kondisi daerah di sekitar kota. Hal ini didasarkan pada semakin menguatnya kekuatan pasar yang memperparah kesenjangan diantara kota dan daerah. Menurut

Myrdal (1957), fenomena ini disebut dengan *backwash effects*, dimana daerah yang maju lebih unggul dibandingkan daerah yang terbelakang dan akan terus berlanjut.

6. Teori Daya Tarik Industri

Teori ini merupakan model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat yang didasari pada prinsip pemberian subsidi dan insentif. Masyarakat dianggap dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis jika masyarakat diberikan bantuan berupa subsidi dan insentif oleh pemerintah.

Selain teori diatas, ada teori pembangunan lain yang tidak kalah pentingnya, yakni teori pembangunan Rostow. Teori pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh Walt Whitman Rostow adalah salah satu teori yang cukup terkenal dalam kaitannya dengan proses tahapan pembangunan ekonomi. Pada dekade 1950-19660, teori Rostow banyak mempengaruhi pandangan persepsi para ahli ekonomi mengenai strategi pembangunan yang harus dilakukan. Teori yang dikemukakan Rowtow ini lahir dari pengalaman pembangunan yang telah dialami oleh negara-negara Eropa. Dengan mengamati proses pembangunan negara-negara Eropa, maka Rostow memformulasikan pola pembangunan menjadi tahap-tahap evolusi dari suatu pembangunan ekonomi yang dilakukan negara tersebut. Rostow kemudian membagi proses pembangunan ekonomi suatu negara menjadi lima tahap, yaitu: (1) Tahap Perekonomian Tradisional; (2) Tahap Prakondisi tinggal landas; (3) Tahap Tinggal landas; (4) Tahap menuju kedewasaan; (5) Tahap Konsumsi Tinggi (Kuncoro, 1997) .

Tahap 1, **Perekonomian Tradisional**. Pada tahap ini perekonomian pada masyarakat tradisional cenderung bersifat subsisten. Pemanfaatan teknologi dalam sistem produksi masih sangat terbatas. Dengan kata lain, dalam kondisi perekonomian seperti ini sektor pertanian memegang peranan yang cukup penting. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses produksi menyebabkan barang-barang yang

diproduksi sebagian besar adalah komoditas pertanian dan bahan mentah saja.

Tahap 2, **Prakondisi Tinggal Landas**. Tahap kedua dari proses pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh Rostow adalah tahap Prakondisi Tinggal Landas. Kondisi tahap ini pada dasarnya merupakan transisi dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Sektor Industri mulai berkembang di samping sektor pertanian yang masih memegang peranan yang cukup signifikan bagi perekonomian. Pada tahap ini, perekonomian mulai bergerak dinamis, industri-industri bermunculan, perkembangan teknologi yang pesat, dan lembaga keuangan resmi sebagai penggerak dana masyarakat mulai bermunculan, serta terjadi investasi besar-besaran terutama pada industri manufaktur.

Tahap 3, **Tinggal Landas**. Tinggal landas merupakan tahap yang menentukan dalam keseluruhan proses pembangunan dalam keseluruhan pembangunan bagi kehidupan masyarakat. Tahap ini memiliki waktu yang cukup pendek. Dalam tahap ini akan terjadi suatu revolusi industri yang berhubungan erat dengan revolusi metode produksi.

Tahap 4, **Menuju Kedewasaan**. Tahap ini dicirikan dengan penerapan secara efektif teknologi modern terhadap sumber daya yang dimiliki. Tahapan ini merupakan tahapan jangka panjang dimana produksi dilakukan secara swadaya. Pada saat negara mengalami tahapan ini, terdapat tiga perubahan penting yang terjadi. *Pertama*, tenaga kerja berubah dari tidak terdidik menjadi terdidik. *Kedua*, perubahan watak pengusaha dari pekerja keras kasar berubah menjadi manajer efisien yang halus dan sopan. *Ketiga*, masyarakat jenuh terhadap industrialisasi dan menginginkan perubahan lebih jauh.

Tahap 5, **Tahap Konsumsi Masa Tinggi**. Tahap ini adalah tahap yang menentukan keseluruhan proses pembangunan bagi kehidupan masyarakat. Tahap ini berlaku pada masa yang relatif pendek, kira-kira dua dasawarsa. Tahap konsumsi masa tinggi merupakan akhir dari tahapan pembangunan. Pada fase ini terjadi perubahan (*demand side*) dalam sistem produksi yang dianut. Sementara itu terjadi pula pergeseran

ekonomi yang semula lebih banyak menitikberatkan pada sisi produksi kini beralih ke konsumsi.

2.2 Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya ekonominya secara berdaya guna dan berhasil guna demi kesejahteraan masyarakatnya (Alam, 2006 : p.11). Untuk itu diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Pertumbuhan ekonomi ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus diimbangi dengan fungsi distribusi yang melahirkan pemerataan. Namun sayangnya dalam berbagai realita yang ada, pertumbuhan dan pemerataan tidak selalu berjalan beriringan. Walaupun pada beberapa kasus, pertumbuhan ekonomi suatu daerah diikuti dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Namun sebagian besar khususnya di Indonesia, meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak menjadi jaminan bahwa akan terjadi pemerataan.

Penekanan pertumbuhan ekonomi regional lebih dipusatkan pada pengaruh perbedaan karakteristik *space* terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor yang menjadi perhatian utama dalam teori pertumbuhan ekonomi regional adalah keuntungan lokasi, aglomerasi migrasi, dan arus lalu lintas modal antar wilayah. Sedangkan faktor-faktor dalam teori pertumbuhan ekonomi nasional dapat dibagi menjadi tiga macam, yakni : modal, lapangan kerja, dan kemajuan teknologi. Kemampuan daerah untuk tumbuh sangat ditentukan oleh berbagai faktor ekonomi yang satu sama lain sering kali mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut perlu diketahui secara rinci berdasarkan sifat-sifatnya.

Terkait dengan proses pencarian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, terdapat empat jenis model pertumbuhan ekonomi regional yang akan menghasilkan analisis dan kesimpulan tentang faktor penentu pertumbuhan ekonomi regional.

Berikut ini adalah model-model pertumbuhan ekonomi regional yang dimaksud (Syafrizal, 2008: hal 87).

1. Model Basis Ekspor

Model ini mula-mula diperkenalkan oleh Douglas C. North pada tahun 1956. Menurut model ini pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh keuntungan kompetitif (*competitive advantage*) yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Bila suatu daerah tersebut dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang mempunyai keuntungan kompetitif sebagai basis untuk ekspor, maka pertumbuhan daerah yang bersangkutan akan dapat ditingkatkan (Syafrizal, 2008: hal 87).

2. Model *Interregional Income*

Model ini merupakan model yang didapat dari perluasan model basis ekspor dengan memasukkan unsur hubungan ekonomi antar wilayah. Model ini dikembangkan oleh Harry W Richardson (1978). Berbeda dengan model basis ekspor yang mengasumsikan ekspor sebagai *exogenous variable*, pada model *interregional* ini, ekspor dimasukkan ke dalam sistem, yang ditentukan oleh perkembangan kegiatan perdagangan antar wilayah.

3. Model Neo-Klasik

Model ini dipelopori oleh George H Bort (1960) dengan mendasarkan analisisnya pada Teori Ekonomi Non-Klasik. Menurut model ini, kemampuan ekonomi suatu daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Di satu sisi, kegiatan produksi pada suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah itu saja, tetapi juga ditentukan oleh mobilitas tenaga kerja dan monolitas antar daerah (Syafrizal, 2008 hal 95).

4. Model Penyebab Berkumulatif

Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Nikolas Kaldor. Model ini merupakan hasil dari kritik terhadap Model Neo-Klasik. Model ini tidak percaya pemerataan pembangunan antar daerah akan dapat

dicapai dengan sendirinya. Sebaliknya, model ini mempercayai bahwa pemertaan pembanguna hanya akan dapat dikurangi melalui program pemerintah. Apabila hanya diserahkan kepada mekanisme pasar, ketimpangan regional akan terus meningkat seiring dengan peningkatan proses pembangunan.

Pada dasarnya suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Dalam dunia nyata amat sulit untuk melakukan pencatatan jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan. Hal ini terjadi bukan saja karena jenis barang dan jasa yang sangat beragam namun juga karena satuan ukurannya pun berbeda, misalnya, produksi singkong diukur dengan satuan berat, sementara produksi air diukur dengan satuan volume. Karena itu angka yang digunakan dalam menaksir perubahan output adalah nilai moneternya (uang) yang tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB yang digunakan adalah PDB berdasarkan harga konstan sebab PDB harga konstan telah menghilangkan pengaruh perubahan harga. Oleh karena itu, sekalipun angka yang muncul adalah nilai uang dari total output barang dan jasa, perubahan nilai PDB sekaligus menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan yang berarti ada perubahan produksi selama periode pengamatan⁷.

2.3 Pembangunan Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses dalam pencapaian keberhasilan pertumbuhan ekonomi, baik secara kuantitas maupun tingkat kualitasnya, karenanya dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia secara merata di seluruh daerah di Indonesia.

Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan (UNDP), khususnya

⁷ Rahardja P dan Manurung M (2008, h. 129)

pilihan kesehatan serta pilihan pendidikan, dan dapat memenuhi standar hidup layak yang semuanya dapat dicapai dengan peningkatan pendapatan.. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui tiga dimensi dasa, mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak dan masing-masing dimensi direpresentasikan dengan indikator (BPS, 2008)⁸. Dimensi umur panjang dan sehat direperesentasikan oleh indikator Angka Harapan Hidup (AHH); dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh indikator Angka Melek Huruf (AMH) dan rata-rata lamanya sekolah; serta dimensi kehidupan yang layak direpresentasikan oleh indikator kemampuan daya beli (IDB).

Menurut Ramirez dkk, 1998 menyebutkan bahwa ada hubungan timbal balik antara SDM dengan pertumbuhan ekonomi. Studi Ramirez berangkat dari terdapatnya hubungan dua arah (*two way relationship*) antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia, yaitu :

1. Dari pertumbuhan ekonomi ke *human development*.

GNP mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas rumah tangga dan pemerintah, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Dalam membelanjakan pendapatannya, rumah tangga cenderung digunakan untuk barang – barang yang memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia, seperti makanan, air, pendidikan dan kesehatan. Umumnya masyarakat miskin lebih banyak menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan pembangunan manusia tersebut. Pertumbuhan ekonomi mereduksi kemiskinan dengan adanya penciptaan lapangan kerja dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat ini yang memberikan peluang kepada orang miskin untuk memperbaiki pendidikan dan kesehatannya.

Pemerintah memainkan peran alokasi dalam upaya meningkatkan pembangunan manusia, yaitu seberapa besar alokasi pengeluaran untuk sektor pembangunan manusia dan bagaimana proses pengalokasiannya.

⁸ Katalog BPS, IPM tahun 2006-2007.

Sementara peranan organisasi masyarakat dan LSM adalah sebagai faktor pendukung dan pelengkap dalam pembangunan manusia.

2. Dari *human development* ke pertumbuhan ekonomi

SDM yang baik, sehat, dan berpendidikan baik akan memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingginya pembangunan manusia akan mempengaruhi ekonomi melalui peningkatan kemampuan atau kapabilitas masyarakat, sehingga akan meningkatkan kreatifitas dan produktifitas masyarakat.

Jelas bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan faktor utama dalam pembangunan modal SDM. Peningkatan modal SDM akan meningkatkan produktifitas, kemampuan beradaptasi dan menggunakan teknologi dalam produksi sehingga secara mikro akan mendorong produktifitas individu dan secara makro pertumbuhan pembangunan ekonomi suatu daerah. Peningkatan pembangunan manusia akan membutuhkan investasi (modal) yang besar dan diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan.

2.4 Disparitas Pembangunan

Pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan perbaikan distribusi pendapatan bila memenuhi setidaknya dua syarat yaitu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas⁹. Distribusi pendapatan yang baik adalah yang makin merata. Tetapi tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang terjadi adalah pemerataan kemiskinan.

Ketimpangan atau dapat disebut juga dengan disparitas merupakan dampak yang tidak terelakkan dari pembangunan. Perbedaan yang dimiliki masing–masing daerah menjadikan setiap daerah memiliki cara dan kebijakan sendiri dalam memajukan perekonomian daerahnya, sehingga ketimpangan ini mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dalam daerah tersebut. Yang menjadi persoalan bukan perbedaan yang ada antar

⁹ Rahardja P dan Manurung M (2008, h. 135)

daerah tersebut, melainkan adanya kecenderungan melebarnya perbedaan (ketimpangan) yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan pembangunan. Ketimpangan yang terjadi terus menerus dapat menciptakan kemiskinan antar generasi karena rumah tangga yang tidak mampu membiayai kebutuhan hidup anaknya akan menyebabkan anaknya menjadi rumah tangga yang miskin juga (Lusiana, 2008). Dampak negatif yang terjadi saat ada ketimpangan adalah inefisiensi ekonomi serta melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas (Todaro, 2004). Dampak positif dari ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya agar meningkatkan kesejahteraannya dan juga mendorong mobilisasi tenaga kerja dari wilayah yang tinggi ketimpangannya ke daerah dengan ketimpangan rendah.

Ketimpangan dapat dibagi menjadi ketimpangan vertikal dan horizontal. Ketimpangan selain dilihat dari segi ekonomi juga dapat dilihat dari segi sosial (non ekonomi).

Ketimpangan vertikal merujuk pada sebuah ketimpangan yang terjadi antar individu seperti ketimpangan pendapatan, konsumsi, dan kekayaan. Oleh karena itu, alat untuk mengukur ketimpangan vertikal adalah kurva Lorenz dan koefisien Gini. Kedua alat ini dapat memberikan perbandingan antar kelompok pendapatan antar pendidik yang paling miskin dan paling kaya. Ketimpangan ini lebih sering digunakan untuk menggambarkan kondisi ketimpangan disuatu daerah walau tidak dapat menjelaskan mengapa ketimpangan dapat terjadi. Ketimpangan horizontal lah yang mampu menjelaskan ketimpangan vertikal.

Ketimpangan horizontal merujuk pada ketimpangan dari perbandingan kelompok masyarakat berdasarkan suku, ras, agama, gender. Alat yang biasa digunakan adalah indeks Theil. Ketimpangan horizontal dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk mewujudkan potensinya dan menunjukkan adanya kendala dalam pengentasan kemiskinan karena mereka yang miskin sulit memperoleh akses pelayanan publik (Stewart, 2007 dalam Lusiana 2008).

2.4.1. Ketimpangan Ekonomi

Pembangunan regional yang didasarkan pada desentralisasi tidak hanya menimbulkan dampak yang positif, namun juga menimbulkan dampak lain yakni adanya kesenjangan atau disparitas antar daerah. Disparitas antara daerah (atau antar wilayah) merupakan perbedaan tingkat pertumbuhan antara satu daerah dengan daerah yang lain yang disebabkan ketidakmerataannya hasil pembangunan. Perbedaan ini menyebabkan terbaginya daerah-daerah, yakni daerah yang maju secara ekonomi dan yang tertinggal. Fenomena seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara-negara lain.

Salah satu ciri dari disparitas pembangunan adalah adanya ketimpangan ekonomi atau yang biasa dikatakan dengan disparitas pendapatan. Ketika terjadi disparitas pembangunan, umumnya akan terjadi disparitas pendapatan.

2.4.2. Ketimpangan Sosial

Ketimpangan selain dari segi ekonomi juga dapat dilihat dari segi sosial (nonekonomi), yaitu dari sektor pendidikan dan kesehatan. Seperti kita ketahui bahwa faktor penting dalam pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Keduanya adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya. Manusia sebagai salah satu sumber daya yang dapat menjadi modal atau aset dalam pembangunan jika dapat dikelola dengan baik, namun juga akan menjadi beban jika pengelolaannya tidak berjalan dengan baik.

Seperti yang dikatakan Jhingan (2003) bahwa peningkatan GNP per kapita berkaitan erat dengan pengembangan faktor manusia. Inilah yang disebut oleh para ahli ekonomi modern sebagai pembentukan modal insani, yaitu proses peningkatan ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan seluruh penduduk negara yang bersangkutan. Proses ini mencakup kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial pada umumnya.

Pendidikan memiliki peran yang penting terhadap kemajuan suatu bangsa, dimana kualitas pendidikan suatu bangsa akan merepresentasikan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.

Dalam kaitannya dengan pembangunan, posisi pendidikan sangatlah strategis karena bersinggungan langsung dengan pelaku pembangunan, yakni sumber daya manusia (SDM). Jika SDM yang ada memiliki kualitas yang tinggi, pembangunan akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, fokus pembangunan tidak hanya terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terkait peningkatan kualitas SDM. Hal ini didukung oleh Alam (2006), yang menyatakan bahwa fokus utama pembangunan tidak hanya sekedar meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperbesar pendapatan per kapita, dan lain sebagainya, tetapi juga menampakkan hasil pada peningkatan kualitas hidup manusia. Dengan kata lain pembangunan harus diarahkan pada pencapaian tahapan-tahapan kualitas manusia yang dapat diukur, yang diperlihatkan dalam *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Peningkatan kualitas manusia dengan pendidikan tidak hanya bermanfaat bagi SDM itu sendiri, melainkan juga terhadap pertumbuhan ekonomi. SDM yang berkualitas telah memiliki pemahaman yang lebih baik dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun dampak pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah berkembangnya kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, keterampilan, keahlian, kemampuan, dan wawasan mereka agar mampu bekerja lebih produktif, baik secara perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan konsep model *human capital*. Pendidikan juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran sosial, politik dan budaya serta memacu penguasaan dan pendayagunaan teknologi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, hampir semua negara di dunia menempatkan pembangunan pendidikan sebagai kebijakan yang memiliki prioritas tertinggi.

Indonesia juga menempatkan pendidikan sebagai prioritas dalam pembangunan. Hal ini tertuang dalam Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 yang

menyatakan bahwa “*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*”. Pasal ini menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Pernyataan ini diperkuat dengan UU Sisdiknas Pasal 5 No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan “*Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu*”.

Namun pada kenyataannya, tidak semua warga negara dapat menikmati hak dan kewajiban dalam menempuh pendidikan. Telah terjadi disparitas pendidikan khususnya antar wilayah di Indonesia. Adanya disparitas pendidikan antar wilayah ini seringkali menjadi masalah dalam pembangunan. Kondisi disparitas ini muncul karena berbagai hal seperti kondisi geografis yang berbeda-beda, perbedaan sarana dan prasarana pendidikan maupun karena kebijakan pendidikan.

Dimensi pengetahuan penduduk menggunakan dua indikator yaitu AMH (Angka Melek Huruf) dan RLS (Rata-rata Lama Sekolah). AMH adalah angka persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya, sedangkan RLS menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (BPS, 2008)

Angka Melek Huruf penduduk usia 15-24 merupakan salah satu indikator pencapaian MDG's pada tahun 2015. Pada tahun 2015 seluruh penduduk usia 15-24 dimanapun ia berada harus dapat membaca dan menulis. Kelompok penduduk usia sekolah ini adalah kelompok penduduk usia produktif, sebagai sumber daya pembangunan yang seharusnya memiliki pendidikan yang memadai dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Selain dari segi pendidikan, ketimpangan sosial juga dapat dilihat dari tingkat kesehatan masyarakatnya. Pendapatan, pendidikan dan kesehatan saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan pendapatan yang baik diharapkan mampu memperoleh tingkat pendidikan yang baik, sehingga dapat meningkatkan mutu dan produktivitas sumber daya manusia. Tingkat kesehatan yang baik dan tingkat pendidikan yang baik juga akan mendukung kemampuan seorang manusia untuk memperoleh

tingkat pendapatan yang baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya pula. Karenanya ketiga hal tersebut sangat berkaitan satu sama lain dalam proses pembangunan manusia, ketiganya akan memberikan pengaruh pula terhadap proses pembangunan suatu daerah.

Ukuran tingkat kualitas kesehatan dapat dilihat seperti dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan komponen pembentuknya, yaitu Angka Harapan Hidup (*life expectancy*). AHH adalah rata – rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (BPS, 2008). Pada komponen AHH, menurut standar UNDP angka tertinggi sebagai batas untuk penghitungan indeks ini dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun.

World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai sebuah kondisi kurang sejahtera. Menurut BPS, ada dua jenis kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Konsep ini mengacu pada kepemilikan materi terkait standar kelayakan hidup seseorang. Kemiskinan absolut terjadi ketika pendapatan seseorang dibawah garis kemiskinan. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang terjadi karena ada perbedaan relatif tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Menurut PBB, penduduk dikatakan miskin jika memiliki pendapatan kurang dari \$1 per hari dan menurut *World Bank* adalah jika kurang dari \$2 per hari.

Menurut *World Bank*, ada 3 cara untuk mengidentifikasi kemiskinan, yaitu

1. Mendefinisikan indikator kesejahteraan terhadap suatu negara sehingga dapat menentukan garis kemiskinan,
2. Mengumpulkan data kemiskinan untuk menambah informasi garis kemiskinan,
3. Menetapkan standar minimum dari indikator kesejahteraan untuk membedakan kelompok miskin dan non-miskin.

Dalam menentukan kemiskinan, UNDP melihat berdasarkan beberapa ukuran, yaitu

1. *Human Development Index* (HDI) yang meliputi Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), jumlah orang bersekolah, dan pendapatan per kapita.
2. *Gender Related Development Index* yang meliputi rendahnya perbedaan gender,
3. *Gender Empowerment Measure* yang mencakup persentase wanita yang duduk dalam parlemen, perempuan yang menduduki jabatan administratif dan manajer, serta wanita yang bekerja sebagai teknisi dan profesional,
4. *Human Poverty Index* yang mencakup penduduk yang tidak bertahan sampai usia 40 tahun, tingkat buta huruf, akses pada air bersih, akses pada pelayanan kesehatan, dan bayi dengan bobot badan rendah.

Sharp mengutarakan 3 penyebab kemiskinan (dalam Kuncoro, 1997). Pertama, adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, adanya **perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia**. Ketiga, adanya perbedaan akses dalam modal. Semuanya berawal dari teori lingkaran setan kemiskinan, yaitu adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktivitas, pendapatan, tabungan, dan investasi (Nurkse 1953 dalam Kuncoro 1997). Kemiskinan erat berhubungan dengan ketimpangan dan kerentanan, dimana ketimpangan fokus pada distribusi baik pendapatan ataupun konsumsi sedangkan kerentanan adalah resiko menjadi miskin dimasa depan walau sekarang belum miskin (*World Bank*).

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep *basic needs* (kemampuan kebutuhan dasar). Dengan pendekatan ini, kemiskinan

dipandang dari ketidakmampuan di sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.

2.5 Ukuran Ketimpangan

Pengukuran disparitas yang didasarkan pada kriteria Bank Dunia merupakan indikator yang paling umum digunakan (BPS, 1994). Untuk mengukur disparitas, Bank Dunia membagi penduduk dalam tiga kategori, yaitu:

- a. 20% penduduk berpendapatan tinggi
- b. 40% penduduk berpendapatan sedang
- c. 40% penduduk berpendapatan rendah

Berdasarkan pembagian penduduk diatas, Bank Dunia melakukan kriteria dengan menilai distribusi pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpenghasilan terendah. Kriteria dalam disparitas pendapatan antara lain (Bank Dunia dalam Rahardja 20081 :

1. Tinggi, jika 20% penduduk yang berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12% dari bagian pendapatan,
2. Sedang, jika 20% penduduk yang berpenghasilan terendah menerima 12 hingga 16% bagian pendapatan, dan
3. Rendah, jika 20% penduduk yang berpenghasilan terendah menerima lebih dari 16% bagian pendapatan.

Sejumlah cara yang umum digunakan dalam setiap studi tentang ketimpangan yaitu dengan alat ukur ketimpangan¹⁰:

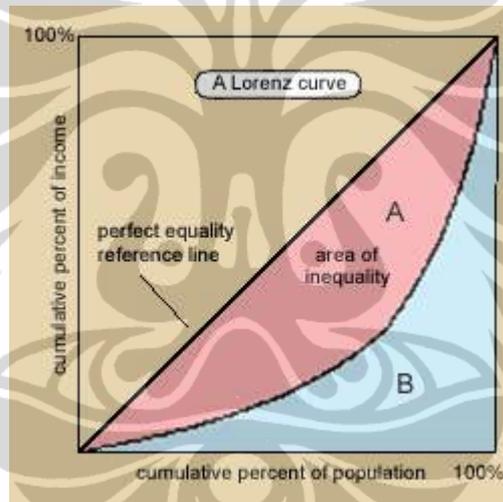
- *Lorenz Curve*, mengukur ketimpangan berdasarkan bentuk kurva distribusi pendapatan.
- *Gini Ratio*, mengukur ketimpangan berdasarkan luas kurva Lorenz.
- *Generalized Entropi Measure (GEM)* atau *Theil Index*,.
- *L Index*, merupakan pengembangan dari *Theil Index*.
- *Williamson Index*, merupakan alat ukur ketimpangan yang menggunakan koefisien variasi.

¹⁰ Daryanto A dan Hafizrianda Y (2010). Model – Model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. Konsep dan Aplikasi. IPB Press. Bogor.

▪ Kurva Lorenz

Kurva Lorenz merupakan kurva dengan bentuk dua dimensi sumbu horizontal menunjukkan kumulatif persentase dari populasi yang mempunyai pendapatan, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan kumulatif persentase dari jumlah pendapatan.

Dalam keadaan pembagian yang merata sempurna, kurva akan berbentuk garis diagonal dengan derajat 45. Lorenz akan selalu *convex* jika rata – rata pendapatan adalah positif sehingga kurva akan *non-decreasing*. Namun, kurva akan *concave* jika rata – rata pendapatan adalah negatif sehingga kurva menjadi *increasing*.



▪ Gini Ratio

Ratio antara daerah ketimpangan dalam kurva *Lorenz curve* dengan daerah ketimpangan sempurna merupakan ukuran ketimpangan pembagian pendapatan yang dikemukakan oleh Gini, yang biasa disebut dengan *Gini Ratio*. Umumnya ukuran *Gini Ratio* yang digunakan adalah :

$$G = \frac{1}{2n^2 - y} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |y_i - y_j|$$

Dimana y adalah pendapatan , y adalah pendapatan rata – rata, n adalah ukuran jumlah penduduk.

Nilai G akan berada pada selang antara 0 sampai 1. Bila $G = 0$ berarti terjadi pemerataan sempurna (yaitu setiap orang mendapat porsi dari pendapatan yang sama), dan bila $G = 1$ maka berarti terjadi ketidakmerataan atau ketimpangan sempurna dalam pendapatan (satu orang / kelompok tertentu disuatu wilayah menikmati semua pendapatan dalam wilayah tersebut)

▪ Theil Index

Dibandingkan dengan ukuran ketimpangan yang lain Theil Index memiliki kelebihan yaitu dapat didekomposisi menjadi ketimpangan dalam kelompok itu sendiri (*Within-Group*) dan ketimpangan antar kelompok itu (*Between-Group*). Dengan demikian kita dapat mengamati dengan lebih jelas bagaimana fenomena ketimpangan terjadi dalam suatu distribusi pendapatan. Dapat saja ketimpangan itu terjadi dalam kelompok tersebut, atau dengan kelompok yang lain (antar kelompok/grup).

Namun meskipun dalam melihat ketimpangan pendapatan indeks Theil mampu memberikan gambaran kondisi ketimpangan yang ada, *Theil index* tidak mampu memecahkan permasalahan instrinsik yang ada dalam ketimpangan pendapatan regional (Akita,2001). Nilai index Theil ini berselang antara 0-1, artinya jika nilai T indeks mendekati 0 (nol) maka ketimpangan sangat kecil atau sebaiknya jika nilai T indeks mendekati 1 maka ketimpangan semakin besar.

Awalnya Theil menyampaikan ukuran ketimpangan sebagai berikut

$$T_p = \sum_i \sum_j \left(\frac{Y_{ij}}{Y} \right) \log \left(\frac{Y_{ij}/Y}{N_{ij}/N} \right)$$

Dimana :

Y_{ij} = Pendapatan Kabupaten/ Kota j di Wilayah i

Y_i = Total Pendapatan Kabupaten/ Kota dalam Wilayah i

Y = Total pendapatan Provinsi

N_{ij} = Jumlah penduduk Kabupaten/ Kota j di wilayah i

N = Total jumlah penduduk Provinsi

Jika T_{pi} adalah ukuran ketimpangan pendapatan antar provinsi maka :

$$T_{pi} = \sum_j \left(\frac{Y_{ij}}{Y_i} \right) \log \left(\frac{Y_{ij}/Y_i}{N_{ij}/N_i} \right)$$

Sehingga Theil Index T pada rumus (2) dapat didekomposisikan menjadi :

$$\begin{aligned} T_p &= \sum_i \left(\frac{Y_i}{Y} \right) T_{pi} + \sum_i \left(\frac{Y_i}{Y} \right) \log \left(\frac{Y_i/Y}{N_i/N} \right) \\ &= \sum_i \left(\frac{Y_i}{Y} \right) T_{pi} + T_{BR} \\ &= T_{WR} + T_{BR} \end{aligned}$$

dimana :

Y_i = Total pendapatan di wilayah i

N_i = Total populasi di wilayah i

Dan ukuran ketimpangan pendapatan antar wilayah adalah:

$$T_{BR} = \sum_i \left(\frac{Y_i}{Y} \right) \log \left(\frac{Y_i / Y}{N_i / N} \right)$$

- **L -Index**

$$L_p = \sum_i \sum_j \left(\frac{N_{ij}}{N} \right) \log \left(\frac{N_{ij} / N}{Y_{ij} / Y} \right)$$

Theil Index L juga dapat didekomposisikan menjadi dua komponen yaitu menjadi :

$$\begin{aligned} L_p &= \sum_i \left(\frac{N_i}{N} \right) L_{pi} + L_{BR} \\ &= L_{WR} + L_{BR} \end{aligned}$$

- **Williamson Index**

Formula ini pada dasarnya sama dengan *Coefficient of Variation* (CV) biasa, yaitu standar deviasi dibagi dengan rata-rata.

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 (f_i/n)}}{\bar{y}}$$

Dimana y_i = PDRB perkapita daerah i
 Y = PDRB perkapita rata – rata seluruh daerah
 F_i = Jumlah penduduk daerah i

n = Jumlah penduduk seluruh daerah

V_w = *Williamson Index*

2.6 Hubungan Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Manusia

Pendidikan dan kesehatan menjadi kunci pembangunan manusia. Karena dengan pendidikan dan kesehatan manusia dapat berproduksi dengan produktif. Sebagai contoh, kemajuan ekonomi negara-negara Arab berdampak pada peningkatan Angka Harapan Hidup dan pengurangan angka kematian ibu dan bayi (Boutayeb, 2006). Walau demikian, Boutayeb (2006) menemukan kesenjangan sosial yang sangat besar dan ketidakadilan kesehatan di antar dan intra negara-negara Arab. Tidak hanya itu, Boutayeb juga memandang masalah di negara Arab dengan lebih kompleks seperti aksesibilitas teknis untuk perawatan kesehatan, tingkat melek huruf, status sosial dan ekonomi yang rendah dari wanita, kualifikasi staf kesehatan, perilaku umum dan interaksi antara pasien dan petugas kesehatan (termasuk korupsi). Penelitian Boutayeb menunjukkan hasil bahwa ada hubungan antara indikator kesehatan dan pembangunan manusia. Di Comoros, Djibouti, Mauritania, Sudan dan Yaman (negara-negara miskin) terlihat memiliki perkembangan manusia yang sama (rendahnya tingkat harapan hidup dan bayi tinggi dan kematian ibu). Di sisi berlawanan, negara kaya (Bahrain, Kuwait, Libya, Qatar, UAE) memiliki pembangunan manusia tinggi dinyatakan dalam tingkat tinggi harapan hidup.

Perkembangan pembangunan manusia sangat tergantung pertumbuhan ekonomi beberapa puluh tahun sebelumnya (*Human Development Report*, 2004 dalam Utami 2007). Pertumbuhan memungkinkan individu untuk mengalokasikan pengeluaran untuk kesehatan, baik secara mikro (ditingkat individu karena kenaikan pendapatan) dan makro (ditingkat pemerintah karena kenaikan kemampuan fiskal). Hal yang sebaliknya juga terjadi. Ketika pendidikan meningkat, di level individu terjadi peningkatan *human capital* sehingga

dapat meningkatkan ekspektasi ulititi seumur hidup yang diwakilkan dengan peningkatan pendapatan dan kepuasan kerja (McCann, 2001).

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Jaoharul Alam pada tahun 2007, tentang “Disparitas Pendapatan dan Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bekasi”, menggunakan teknik analisis *Weighted Coefficient Variation* (CVw) atau Williamson (Iw) dengan nilai indeks berkisar antara nol dan satu. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan alat analisis lain yakni Tipologi Klaasen yang melihat perbandingan antara laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan PDRB per kapita dan regresi panel. Hasil penelitian ini adalah indeks Williamson memperlihatkan indeks yang sangat tinggi dan cenderung meningkat yang memperlihatkan bahwa ketimpangan antar kecamatan sangat tinggi dan cenderung akan terus meningkat. Adapun dari tujuh variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan, hanya ada empat variabel yang berpengaruh yakni variabel PDRB, rasio guru terhadap murid pada tingkat sekolah dasar, kepadatan penduduk dan presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih.

Etharina tahun 2004, tentang “Ketimpangan antar daerah di Indonesia Dimensi Spasial dan Sektoral” menggunakan teknik analisis Koefisien Williamson, *Theil Entropy*, dan Regresi Sederhana. Penelitian ini menggunakan data nilai tambah PDB nasional dengan harga konstan 1993 dan tahun 1989 – 2001, serta PDRB per provinsi menurut lapangan usaha (pertanian, industri dan jasa). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antara Jawa – Luar Jawa dan Kawasan Barat – Timur relatif kecil. Ketimpangan terjadi antara DKI dengan wilayah lain dan antara provinsi kaya dengan miskin. Ketimpangan justru tetap nyata di wilayah itu sendiri baik di Jawa, Luar Jawa, KBI (Kawasan Barat Indonesia) maupun KTI (Kawasan Timur Indonesia). Data dengan migas menunjukkan bahwa ketimpangan semakin menurun, sementara tanpa migas indeks ketimpangan relatif tidak berubah. Saat krisis ekonomi

indeks ketimpangan antar daerah meningkat. Sektor industri menjadi penyebab ketimpangan dan sangat terkonsentrasi di daerah maju. Pertanian tersebar merata di daerah belum berkembang. Sementara di sektor jasa walaupun nilai tambah didominasi oleh DKI Jakarta, namun sektor ini berkembang di daerah dengan pendapatan per kapita di bawah rata-rata nasional. Untuk permasalahan dalam penelitian ini Etharina memberikan saran dengan diberikan kebijakan insentif bagi pelaku ekonomi untuk berinvestasi di daerah miskin dengan tidak meninggalkan sektor pertanian, membangun infrastruktur fisik dan non fisik, dan kerjasama antar daerah, dan membangun daerah dengan potensi dan daya dukung daerah itu sendiri untuk mencegah pemusatan sumber daya ekonomi di daerah tertentu.

Sonny Harry B Harmadi dan Uka Wikarya menulis tentang “*Regional Inequality in Indonesia: Pre and Post Regional Autonomy Analysis*” dengan menggunakan Indeks Theil dan Indeks Williamson dengan variabel yang digunakan adalah pendapatan per kapita (periode tahun 1995-2005) untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar daerah, kapasitas fiskal daerah per kapita (periode tahun 1995-2005) merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan dalam pembiayaan fasilitas publik, dan rata-rata lama sekolah (periode tahun 1995-2008) sebagai variabel yang digunakan untuk mengetahui kinerja pelayanan publik di bidang pendidikan, kemudian membandingkan variabel-variabel tersebut pada masa sebelum dan sesudah dilaksanakannya otonomi daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan PDRB per kapita antar daerah semakin meningkat dari tahun 1995-2005, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah kurang berhasil dalam meningkatkan pemerataan pendapatan antar daerah. Salah satu penyebabnya adalah dengan terjadinya pemekaran terdapat beberapa daerah yang memiliki potensi pertambangan dapat menikmati pendapatan yang jauh lebih besar disbanding daerah yang tidak memiliki sumber daya pertambangan, selain itu munculnya daerah pemekaran ternyata juga meningkatkan tingkat korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah sehingga pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik. Namun,

dampak positif dari dilaksanakannya otonomi daerah adalah dengan menurunnya tingkat ketimpangan antar daerah dalam sektor pendidikan yang ditunjukkan dengan variabel Rata-rata Lama Sekolah. Hal ini dikarenakan sejak dilaksanakannya otonomi daerah, tanggung jawab dalam meningkatkan pendidikan mulai dari tingkat dasar menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah benar-benar berusaha meningkatkan pelayanan publik di bidang pendidikan dengan berbagai cara. Beberapa daerah telah memberikan fasilitas gratis bagi masyarakatnya untuk menempuh pendidikan dasar 9 tahun, selain itu pembangunan di bidang pendidikan menjadi tidak lagi “*Java-centered*” terbukti bahwa indeks rata-rata lama sekolah tertinggi justru diraih oleh daerah Sumatra bahkan lebih baik dari indeks rata-rata lama sekolah di daerah Jawa dan Bali. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah ternyata meskipun telah mampu mengurangi ketimpangan dalam hal pembangunan pelayanan publik terutama di bidang pendidikan namun ternyata masih belum mampu menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah di Indonesia.

Yoenanto SN dan Lana S, tahun 2007 menulis tentang “Analisis Disparitas Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Regional” yang dianalisis dengan menggunakan Indeks Theil dan Kurva Kuznets. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data periode tahun 1993-2005. Dengan menghitung nilai entropi total Theil dari kelompok eks. Karesidenan, BAKORLIN dan daerah kaya miskin yang kemudian didekomposisi ke dalam indeks ketidakmerataan antar dan intra kelompok serta analisis dinamis melalui *pooled data* ditemukan bahwa disparitas pendapatan kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah masih tergolong rendah yaitu berkisar antara 0,5995 - 0,6605 tetapi mempunyai kecenderungan yang terus naik dari tahun ke tahun.

Carlos Chrisyanto pada tahun 2006 meneliti tentang “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Antar Daerah di Indonesia” dengan menggunakan analisis Indeks Williamson dan Regresi Berganda dengan

menggunakan data pendapatan per kapita dan pengeluaran daerah yang digunakan untuk pembangunan selama masa sebelum dan sesudah krisis ekonomi. Data yang digunakan adalah data 30 provinsi tahun 1989-2003. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan antar daerah di Pulau Jawa yang disebabkan tingginya pendapatan perkapita DKI Jakarta sementara daerah di luar Pulau Jawa disebabkan oleh tingginya pendapatan per kapita di Kalimantan Timur. Dari hasil regresi menunjukkan bahwa ketimpangan daerah dengan faktor migas dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah pada saat 2 tahun sebelum dan pada saat terjadi krisis, sementara dengan faktor nonmigas dipengaruhi oleh pendapatan per kapita daerah dan pengeluaran pemerintah. Peningkatan alokasi pengeluaran pemda khusus untuk daerah miskin atau yang tidak kaya dengan migas akan memperkecil ketimpangan karena pengeluaran pemerintah sebagian besar dialokasikan kepada daerah kaya (DKI Jakarta) dan daerah yang kaya migas yaitu Kalimantan Timur dan Riau.

Akita tahun 2003 melakukan perhitungan dengan *one-stage* Theil dan dengan pengembangannya, yaitu dekomposisi *two-stage nested* Theil. Penelitian ini menggunakan data China dan Indonesia tahun 1990-1997. Hasil dengan menggunakan *two-stage* menunjukkan komponen intra provinsi menyumbangkan 64% kesenjangan di China dan 50% di Indonesia. Angka ini jauh lebih tinggi dari kesenjangan antar provinsi dan antar daerah. Hasil *one-stage* menunjukkan komponen intra daerah di Indonesia menyumbangkan 88% kesenjangan secara umum. Sedangkan di China lebih memiliki masalah dengan kesenjangan antar daerah. Akita menggunakan kabupaten bukan provinsi sebagai unit analisis untuk mengukur kesenjangan regional dalam PDB per kapita, oleh karena itu dapat menganalisis kesenjangan intra-provinsi serta kesenjangan antardaerah dan antara provinsi. Diharapkan dengan memperkecil unit analisis dapat menangkap penyebaran pendapatan pada tingkat terendah.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Penentuan metode yang digunakan merupakan langkah penting dalam suatu penelitian ilmiah, karena setiap masalah yang diteliti memerlukan metode yang sesuai agar dapat diperoleh hasil penelitian yang valid dan terukur.

3.1. Sumber data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan data runtut waktu (*time series*) yang pada umumnya diperoleh dari Buku Provinsi Banten Dalam Angka yang diterbitkan setiap tahunnya oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, dan data lainnya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara riset kepustakaan, yaitu melalui penelitian terhadap dokumen, jurnal maupun hasil penelitian yang lain, laporan statistik, buku-buku literatur, majalah artikel serta sumber – sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang digunakan untuk periode waktu tahun 2002 – 2010.

3.3. Definisi Operasional Variabel

Sesuai dengan model yang dibangun dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai variabel adalah PDRB per kapita, Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup.

1. PDRB Per kapita

Mengikuti hipotesis Neo-Klasik, PDRB per kapita merupakan variabel yang dapat menunjukkan tingkat pembangunan suatu negara (Sjafrizal,2008). Adapun cara mengukur PDRB per kapita suatu wilayah yaitu:

$$\text{PDRB perkapita} = \frac{\text{PDRB } i}{\text{jumlah Penduduk } i}$$

di mana :

PDRBi = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga

Konstan Provinsi Banten (Rupiah)

Jumlah Penduduki = Jumlah Penduduk Provinsi Banten (Jiwa)

2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran dalam pembangunan manusia dengan berdasarkan 3 indikator yaitu (1) Indikator Kesehatan dengan Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata – rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (BPS, 2008). Pada komponen AHH, menurut standar UNDP angka tertinggi sebagai batas untuk penghitungan indeks ini dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun. (2) indikator Pendidikan dengan Indeks Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (BPS, 2008). (3) Indeks Daya Beli Masyarakat yang menggambarkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

3. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai sebuah kondisi kurang sejahtera. Penelitian ini melihat kemiskinan dari *Human Poverty Index* yang mencakup penduduk yang tidak bertahan sampai usia 40 tahun, tingkat buta huruf, akses pada air bersih, akses pada pelayanan kesehatan, dan bayi dengan bobot badan rendah.

3.4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas pembangunan manusia melalui sektor pendapatan, pendidikan dan kesehatan di Provinsi Banten. Identifikasi disparitas terhadap ketiga hal tersebut akan dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Theil. Dengan demikian spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan kepada fungsi Theil.

Metode yang akan digunakan adalah Metode Analisa Indeks Williamson, Theil indeks yang di dekomposisi dengan satu tahap, tipologi klaasen, *pearson correlation*.

3.4.1 Indeks Williamson

Indeks Williamson (V_w) menghitung ketimpangan pembangunan manusia dengan menggunakan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Formula ini pada dasarnya sama dengan *Coefficient of Variation* (CV) biasa, yaitu standar deviasi dibagi dengan rata-rata.

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 (f_i/n)}}{\bar{y}}$$

Dimana y_i = PDRB perkapita/ IPM daerah i

\bar{Y} = PDRB perkapita/IPM rata – rata seluruh daerah

F_i = Jumlah penduduk daerah i

n = Jumlah penduduk seluruh daerah

Pengertian indeks ini adalah $0 < V_w < 1$, yaitu bila V_w mendekati 1 berarti sangat timpang, dan bila V_w mendekati 0 (nol) berarti sangat merata (ketimpangan yang terjadi kecil).

Menurut Sutarno (2003) Indeks Williamson hanya menjelaskan distribusi PDRB per kapita antarkabupaten di 1 provinsi tanpa menjelaskan seberapa besar PDRB per kapita yang didistribusikan tersebut dengan PDRB per kapita rata-rata daerah lain. Untuk mengetahui besarnya tingkat ketimpangan suatu daerah selain memakai indeks Williamson, dapat digunakan Indeks Theil. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Indeks Theil. Indeks entropi Theil pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri (Kuncoro; 2001: 87 dalam Sutarno 2003).

3.4.2 Indeks Theil

Dibandingkan dengan ukuran ketimpangan yang lain *Theil Index* memiliki kelebihan yaitu

1. dapat didekomposisi menjadi ketimpangan dalam kelompok itu sendiri (*Within-Group*) dan ketimpangan antar kelompok itu (*Between-Group*). Dengan demikian kita dapat mengamati dengan lebih jelas bagaimana fenomena ketimpangan terjadi dalam suatu distribusi pendapatan. Dapat saja ketimpangan itu terjadi dalam kelompok tersebut, atau dengan kelompok yang lain (antar kelompok/grup).
2. membuat perbandingan selama waktu tertentu.
3. dapat menyediakan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil. Hal ini untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu. Selain itu, juga menjadi manfaat karena dapat menggambarkan ketimpangan dengan lebih rinci.

Namun meskipun dalam melihat ketimpangan pendapatan *Index Theil* mampu memberikan gambaran kondisi ketimpangan yang ada, namun kelemahannya tidak mampu memecahkan permasalahan instrinsik yang ada dalam ketimpangan pendapatan regional (Akita,2001).

Dengan struktur hirarki 2 tahap yaitu wilayah kabupaten/ kota dalam provinsi, penelitian ini menggunakan *one-stage Theil decomposition method*.



Penelitian ini menggunakan rumus Indeks Theil:

$$\begin{aligned}
 T_p &= \sum_i \left(\frac{Y_i}{Y} \right) T_{pi} + \sum_i \left(\frac{Y_i}{Y} \right) \log \left(\frac{Y_i/Y}{N_i/N} \right) \\
 &= \sum_i \left(\frac{Y_i}{Y} \right) T_{pi} + T_{BR} \\
 &= T_{WR} + T_{BR}
 \end{aligned}$$

dimana :

Y_i = Total PDRB per kapita di wilayah i

N_i = Total populasi di wilayah i

Dan ukuran ketimpangan pendapatan antar wilayah adalah:

$$T_{BR} = \sum_i \left(\frac{Y_i}{Y} \right) \log \left(\frac{Y_i/Y}{N_i/N} \right)$$

Indeks Theil berkisar antara 0 sampai 1, dimana semakin kecil nilai indeks Theil berarti ketimpangan antar daerah semakin kecil, dan sebaliknya jika nilai indeks Theil mendekati 1 berarti ketimpangan semakin besar.

3.4.3 Tipologi Klaasen

Alat analisis *Klassen Typology* (Tipologi Klassen) digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen membagi daerah dengan melihat pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah tersebut. Dalam penelitian ini, tipologi klaasen merupakan salah bagian yang digunakan untuk melakukan analisis indeks theil sehingga didapatkan indeks theil menurut daerah maju dan daerah berkembang. Hal ini penting untuk melihat ketimpangan di antara kabupaten/kota di daerah maju, dan di antara kabupaten/kota di daerah berkembang, serta diantara daerah maju dan berkembang,

Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah kabupaten/kota dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. **daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh**, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi;
2. **daerah maju tapi tertekan**, daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi;
3. **daerah berkembang cepat**, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Banten;

4. **daerah relatif tertinggal** adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapat per kapita yang lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Banten.

Dikatakan “tinggi” apabila indikator di suatu kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten dan digolongkan “rendah” apabila indikator di suatu kabupaten/kota lebih rendah dibandingkan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten.

3.4.4 *Pearson Correlation*

Uji korelasi ini untuk melihat apakah ada hubungan antar 2 kuantitatif variabel kontinu. Koefisien *pearson correlation* (r) adalah ukuran untuk melihat seberapa kuat hubungan antar 2 variabel. Nilai koefisien *pearson correlation* (r) berkisar antar -1 sampai +1. Rumus untuk mencari nilai r :

$$r = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{n}}{\sqrt{\left(\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}\right) \left(\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n}\right)}}$$

Setelah mendapatkan nilai r , akan dilakukan uji signifikansi dari nilai r itu. Uji signifikansi menggunakan nilai *t-test* yang digunakan untuk melihat apakah koefisien korelasi signifikan berbeda dari nilai 0 sehingga terdapat cukup bukti untuk mengatakan ada hubungan antar 2 variabel. Dalam penelitian ini digunakan bantuan *software* Stata untuk mendapatkan nilai korelasinya. Dalam *pearson correlation*, terdapat *rule of thumb* nilai korelasi tersebut.

- >+0.70 : hubungan positif sangat kuat
- +0.40 - +0.69 : hubungan positif kuat
- +0.30 to +0.39 : hubungan positif moderat
- +0.20 to +0.29 : hubungan positif lemah
- +0.01 to +0.19 : tidak ada hubungan
- 0.01 to -0.19 : tidak ada hubungan
- 0.20 to -0.29 : hubungan negatif lemah

- 0.30 to -0.39 : hubungan negatif moderat
- 0.40 to -0.69 : hubungan negatif kuat
- <-0.70 : hubungan negatif sangat kuat



BAB 4

GAMBARAN UMUM PROVINSI BANTEN

4.1. Sejarah Provinsi Banten

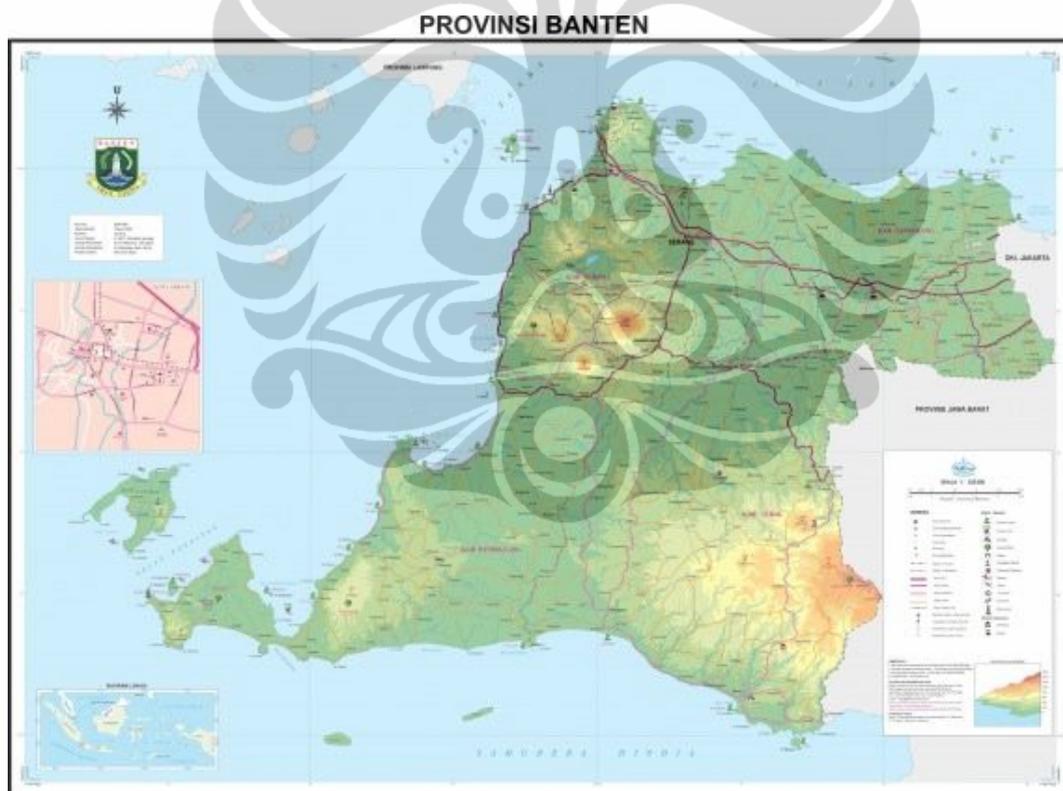
Banten sebagai nama suatu wilayah sudah dikenal dan diperkenalkan sejak abad ke 14. Mula-mula Banten merupakan pelabuhan yang sangat ramai disinggahi kapal dan dikunjungi pedagang dari berbagai wilayah hingga orang Eropa yang kemudian menjajah bangsa ini. Pada tahun 1330 orang sudah mengenal sebuah negara yang saat itu disebut Panten, yang kemudian wilayah ini dikuasai oleh Majapahit di bawah Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk. Pada masa-masa itu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Demak merupakan dua kekuatan terbesar di Nusantara. Tahun 1524-1525 para pedagang Islam berdatangan ke Banten dan saat itulah dimulai penyebaran agama Islam di Banten. Sekitar dua abad kemudian berdiri Kadipaten Banten di Surasowan pada 8 Oktober 1526. Pada tahun 1552 -1570 Maulana Hasanudin Panembahan Surosowan menjadi Sultan Banten pertama. Sejak itu dimulailah pemerintahan kesultanan di Banten dan diakhiri oleh Sultan Muhammad Rafiuddin (1813 - 1820) yang merupakan sultan ke dua puluh setelah sultan dan rakyat masa sebelumnya berperang melawan penjajah. Namun demikian, perjuangan rakyat Banten terus berlanjut hingga detik terakhir kaki penjajah berada di bumi Banten (Supandri, 2000).

Setelah memasuki masa kemerdekaan muncul keinginan rakyat Banten untuk membentuk sebuah provinsi. Niatan tersebut pertama kali mencuat di tahun 1953 yang kemudian pada 1963 terbentuk Panitia Provinsi Banten di Pendopo Kabupaten Serang. Dalam pertemuan antara Panitia Provinsi Banten dengan DPR-GR sepakat untuk memperjuangkan terbentuknya Provinsi Banten. Pada tanggal 25 Oktober 1970 Sidang Pleno Musyawarah Besar Banten mengesahkan Presidium Panitia Pusat Provinsi Banten. Namun ternyata perjuangan untuk membentuk Provinsi Banten dan terpisah dari Jawa Barat tidaklah mudah dan cepat. Selama masa Orde Baru keinginan tersebut belum bisa direalisasikan.

Pada Orde Reformasi perjuangan masyarakat Banten semakin gigih karena mulai terasa semilirnya angin demokrasi dan isu tentang otonomi daerah. Pada 18

Juli 1999 diadakan Deklarasi Rakyat Banten di Alun-alun Serang yang kemudian Badan Pekerja Komite Panitia Provinsi Banten menyusun Pedoman Dasar serta Rencana Kerja dan Rekomendasi Komite Pembentukan Provinsi Banten (PPB). Sejak itu mulai terbentuk Sub-sub Komite PPB di berbagai wilayah di Banten untuk memperkokoh dukungan terbentuknya Provinsi Banten. Akhirnya pada 4 Oktober 2000 Rapat Paripurna DPR-RI mengesahkan RUU Provinsi Banten menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2000 Presiden Abdurrahman Wahid mengesahkan UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten.

4.2 Kondisi Geografis dan Administratif



Gambar 4.1 Peta Provinsi Banten

Secara geografis Provinsi Banten memiliki luas wilayah 16.331,20 km² dan berada pada batas astronomis 10501'11" – 10607'12" Barat Timur dan 507'50" – 701'1" Lintang Selatan, mempunyai letak yang sangat strategis pada lintas

perdagangan internasional dan nasional. Posisi strategis ini ditunjang dengan keberadaan Indonesia yang memiliki alur laut kepulauan Indonesia yang salah satunya berada di wilayah Provinsi Banten. Indonesia dalam perdagangan internasional memiliki tiga alur laut kepulauan Indonesia yaitu Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Makasar. Sedangkan secara geografis Provinsi Banten memiliki keunikan dalam batas-batas wilayahnya. Keunikan ini dapat dianalisis dengan posisi strategis Banten yang memiliki batas laut yang dekat dengan perdagangan internasional di Asia yakni : Singapura, Malaysia, Cina, dan India serta wilayah daratannya yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta.

Wilayah Provinsi Banten memiliki bentang alam mulai dari puncak gunung sampai laut memiliki sumber daya alam cukup besar berupa lingkungan darat, laut, dan pulau-pulau kecil. Luas total wilayah Provinsi Banten 16.331,20 km² yang terdiri atas:

- wilayah darat (4 kabupaten dan 2 kota) seluas 8.651,20 km²,
- wilayah laut sejauh 12 mil, seluas ± 7.680 km² yang diukur dari garis pantai tegak lurus ke arah laut lepas.
- perairan kepulauan (dengan asumsi panjang pantai Provinsi Banten 400 km dan 1 mil laut = 1,6 km) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa,
 - sebelah timur dibatasi oleh Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat,
 - sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Hindia,
 - sebelah barat dibatasi oleh Selat Sunda.

Ekosistem wilayah Provinsi Banten memiliki karakteristik yang sama dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia seperti pada uraian di bawah ini :

- Lingkungan Pantai Utara yang merupakan ekosistem sawah irigasi teknis dan setengah teknis, merupakan kawasan pemukiman dan industri. Wilayah ini sebagian besar berada di Kabupaten dan Kota Tangerang serta Kabupaten Serang.
- Kawasan tengah Banten berupa irigasi terbatas dan kebun campur tetapi sebagian merupakan pemukiman pedesaan dan ketersediaan air mencukupi

dengan kuantitas yang stabil. Wilayah ini berada di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Serang.

- Kawasan Banten sekitar Gunung Halimun – Gunung Kendeng hingga Kecamatan Malingping, Leuwidamar, dan Bayah Kabupaten Lebak merupakan pegunungan yang relatif sulit untuk diakses, tetapi daerah ini menyimpan potensi sumber daya alam yang belum tergali secara efektif.
- Bagian barat Banten merupakan kawasan pertanian yang kaya akan potensi air masih perlu ditingkatkan seperti daerah Saketi, DAS Cidanau, dan lereng kompleks Gunung Akarsari sampai Pantai DAS Ciliman yang letaknya berada di Kabupaten Pandeglang dan Serang Bagian Barat.
- DAS Cibaliung – Malingping merupakan cekungan yang kaya air tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Wilayah ini merupakan perbukitan yang bergelombang dengan rona lingkungan kebun campur talun, hutan rakyat yang tidak terlalu produktif dan wilayah ini berada di Kabupaten Lebak;
- Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) merupakan kawasan konservasi Badak Jawa.

Secara administratif Provinsi Banten terbagi dalam 8 wilayah dengan 4 kabupaten (Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang) dan 4 kota (Tangerang, Cilegon, Serang, Tangerang Selatan) dengan 154 kecamatan, 1.273 desa dan 262 kelurahan.

Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Provinsi Banten Tahun 2010

Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1. Kab. Pandeglang	35	322	13	335
2. Kab. Lebak	28	340	5	345
3. Kab. Serang	29	246	28	274
4. Kab. Tangerang	28	314	0	314
5. Kota Tangerang	13	0	104	104
6. Kota Cilegon	8	0	43	43
7. Kota Serang	6	46	20	66
8. Kota Tangsel	7	5	49	54
Provinsi Banten	154	1.273	262	1.535

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2011.

1. Kabupaten Pandeglang

Secara geografis terletak antara 6°21' - 7°10' Lintang Selatan dan 104°48' - 106°11' Bujur Timur, memiliki luas wilayah 2.747 km² (274.689,91 ha), atau sebesar 29,98% dari luas Provinsi Banten dengan panjang pantai mencapai 307 km. Secara administratif dibagi menjadi 335 desa/kelurahan dan 35 kecamatan, dengan batas-batas administrasi:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Serang;
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lebak.

Secara geologi, wilayah Kabupaten Pandeglang termasuk kedalam zona Bogor yang merupakan jalur perbukitan. Sedangkan jika dilihat dari topografi daerah Kabupaten Pandeglang memiliki variasi ketinggian antara 0 - 1.778 m di atas permukaan laut (dpl). Sebagian besar topografi daerah Kabupaten Pandeglang adalah dataran rendah yang berada di daerah Tengah dan Selatan yang memiliki luas 85,07% dari luas keseluruhan Kabupaten Pandeglang. Kedua daerah ini ditandai dengan karakteristik utamanya adalah ketinggian gunung-gunungnya yang relatif rendah, seperti Gunung Payung (480 m), Gunung Honje (620 m), Gunung Tilu (562 m) dan Gunung Raksa (320 m). Daerah Utara memiliki luas 14,93 % dari luas Kabupaten Pandeglang yang merupakan dataran tinggi, yang ditandai dengan karakteristik utamanya adalah ketinggian gunung yang relatif tinggi, seperti Gunung Karang (1.778 m), Gunung Pulosari (1.346 m) dan Gunung Aseupan (1.174 m).

2. Kabupaten Lebak

Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah sebesar 3.044,72 km² atau 304.472 Ha atau sekitar 32% dari luas wilayah Propinsi Banten. Kabupaten Lebak adalah kabupaten terluas di Propinsi Banten. Secara administrasi Kabupaten Lebak memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Tangerang
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Sukabumi

- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia

Karena memiliki batas laut, Kabupaten Lebak memiliki wilayah laut seluas 588.745 km² dengan panjang pantai 91,42 km. Kabupaten Lebak terdiri dari 23 Kecamatan, terbagi ke dalam 295 desa dan 5 kelurahan. Secara geografis, letak Kabupaten Lebak berada pada 105° 205' – 106^{ob} 30' BT dan 6° 18' – 7° 00' LS. Sedangkan keadaan topografi kewilayahan cukup bervariasi, berada pada ketinggian 0 – 200 meter dpl di wilayah sepanjang pantai selatan, ketinggian 201 – 500 meter dpl di wilayah Lebak Tengah, dan ketinggian 501 – 1000 meter lebih di wilayah Lebak Timur dengan puncak Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun. Curah hujan rata-rata per tahun mencapai 2000 – 4000 mm. Suhu udara berkisar antara 24,5° C – 29,9° C.

3. Kabupaten Serang

Kabupaten Serang terletak di ujung barat bagian utara Pulau Jawa, dan merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa, berjarak ± 70 km dari Ibukota Jakarta. Secara geografis Kabupaten Serang terletak diantara 55°50' - 6°21' Lintang Selatan dan 105°7' 106°22' Bujur Timur. Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Serang, adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Tangerang
- Sebelah selatan: Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak
- Sebelah barat : Kota Cilegon dan Selat Sunda

Secara umum wilayah Kabupaten Serang berada pada ketinggian kurang dari 500 meter dpl dan tersebar pada semua wilayah. Kemiringan tanah atau lereng selain mempengaruhi bentuk wilayah juga mempengaruhi tingginya perkembangan erosi.

Secara fisik, Kabupaten Serang merupakan daerah yang sangat potensial dan amat diuntungkan. Posisi geografis dalam aksesibilitas keluar wilayah Kabupaten Serang cukup strategis karena dilalui oleh Jalan Tol Jakarta – Merak

yang merupakan akses utama menuju Sumatera melalui Pelabuhan penyeberangan Merak, dan sebagai daerah penyangga (*hinterland*) ibukota Negara.

Kegiatan industri merupakan salah satu sektor yang diunggulkan Kabupaten Serang. Dalam peningkatan perekonomiannya, dimana pusat kegiatan industri terdapat di Kawasan Bojonegara dan Serang Timur khususnya di Kawasan Cikande.

Sementara selain kawasan Cikande, yang menjadi prioritas dalam pengembangan potensi ekonomi adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bojonegara. KEK meliputi Kecamatan Bojonegara, Puloampel dan Kramatwatu. Arah pengembangan di kawasan ini adalah meliputi :

1. Pengembangan Pusat Pelabuhan Samudera
2. Pengembangan Jasa dan Perdagangan
3. Pengembangan Permukiman
4. Pengembangan Pertanian Lahan Kering dan Kehutanan

Lokasi Kabupaten Serang yang relatif jauh dari pelabuhan (Tanjung Priok) mengakibatkan Kabupaten Serang kurang mampu bersaing dengan kawasan industri lainnya seperti yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang dan Bekasi. Kondisi ini memberikan pemikiran, bahwa pengembangan pelabuhan di Bojonegara menjadi sangat penting karena keberadaanya akan menaikkan daya saing kawasan industri di Kabupaten Serang.

Selain sektor industri, Kabupaten Serang juga memberikan prioritas terhadap perkembangan kegiatan wisata yang ditunjukkan dengan potensi wisata pantai di kawasan pantai barat (Anyar-Cinangka). Selain potensi wisata tersebut, Kabupaten Serang juga memiliki potensi kawasan wisata alam pegunungan yaitu Cagar Alam Rawa Dano dan air panas Batu Kuwung.

4. Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang pasca terbentuknya Daerah Otonom Baru Kota Tangerang Selatan, terletak di bagian Timur Propinsi Banten pada koordinat 106°20'-106°44' Bujur Timur dan 5°58' - 6°21' Lintang Selatan, terdiri dari 29

Kecamatan, 246 desa dan 28 Kelurahan dengan luas 96.319 ha ditambah kawasan reklamasi pantai dengan luas lebih kurang 9.000 ha.

- Sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa (dengan garis pantai \pm 51 Km),
- Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak

Jarak antara Kabupaten Tangerang dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) sekitar 30 km, yang bisa ditempuh dengan waktu setengah jam. Keduanya dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan Jakarta-Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Kedudukan geografis yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu potensi Kabupaten Tangerang untuk berkembang menjadi daerah penyangga ibukota. Selain itu juga secara geografis menjadi pintu gerbang untuk hubungan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta (Bappeda Kabupaten Banten, 2008).

5. Kota Tangerang

Kota Tangerang terletak antara $6^{\circ}6'$ - $6^{\circ}13'$ Lintang Selatan dan $106^{\circ}36'$ - $106^{\circ}42'$ Bujur Timur. Batas administratif Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug, Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.
- Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.

Tangerang merupakan kota terbesar di Provinsi Banten serta ketiga terbesar di kawasan perkotaan Jabotabek setelah Jakarta.

Terdiri atas 13 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 104 kelurahan. Dahulu Kota Tangerang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tangerang, kemudian ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif dan akhirnya ditetapkan sebagai kotamadya pada tanggal 27 Februari 1993. Kota Tangerang merupakan pusat manufaktur dan industri di Pulau Jawa dan memiliki lebih dari 1000 pabrik terutama di wilayah Balaraja, Cisoka dan Cikupa. Didukung dengan adanya Bandara Internasional Soekarno Hatta, Kota Tangerang menjadi Gerbang utama bagi Indonesia dengan dunia internasional. Dalam sektor pariwisata di Kota Tangerang masih kurang berkembang dengan baik. Sebagai daerah *hinterland*, banyak wilayah Kota Tangerang menjadi pusat pemukiman yang sebagian besar penduduknya adalah para pekerja di DKI Jakarta.

6. Kota Cilegon

Cilegon berada di ujung barat laut Pulau Jawa, di tepi Selat Sunda. Kota ini dulunya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Serang, kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif dan sejak tanggal 27 April 1999 ditetapkan sebagai kotamadya (sebutan *kotamadya* diganti dengan *kota* sejak tahun 2001). Cilegon dikenal sebagai kota industri, dan menjadi pusat industri di kawasan Banten bagian barat.

Kota Cilegon merupakan salah satu kota yang berkembang pesat terutama di bidang industri. Berdasarkan RTRW nasional (PP No.47 Tahun 1997), Kota Cilegon ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang diidentifikasi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi dengan cakupan pelayanan meliputi beberapa kabupaten yang berada dalam pengaruh Kota Cilegon.

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Cilegon berada dibagian paling ujung sebelah Barat Pulau Jawa dan terletak pada posisi : 5°52'24" - 6°04'07" Lintang Selatan (LS), 105°54'05" - 106°05'11" Bujur Timur (BT). Secara administratif wilayah berdasarkan UU No.15 Tahun 1999 tentang terbentuknya

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon pada tanggal 27 April 1999, Kota Cilegon mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bojonegara (Kabupaten Serang),
- sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda,
- sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Anyer dan Kecamatan Mancak(Kabupaten Serang), dan
- sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kramatwatu (Kabupaten Serang).

Berdasarkan administrasi pemerintahan, Kota Cilegon memiliki luas wilayah 17.550 Ha terbagi atas 8 (delapan) kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No.15 Tahun 2002 tentang pembentukan 4 (empat) kecamatan baru, wilayah Kota Cilegon yang semula terdiri dari 4 (empat) kecamatan berubah menjadi 8 (delapan) Kecamatan, yaitu Kecamatan Cilegon, Kecamatan Grogol, Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Pulomerak, Kecamatan Citangkil, Kecamatan Cibeber, dan Kecamatan Jombang. Wilayah Kota Cilegon yang semula masih merupakan bagian dari Kabupaten Serang, terbagi atas 2 (dua) kelurahan dan 41 (empat puluh satu) desa. Kemudian berubah menjadi Kota Cilegon dengan 8 kecamatan dan 43 kelurahan berdasarkan Perda No 12 Tahun 2003 Tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan.

7. Kota Serang

Kota Serang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Banten yang juga merupakan Ibukota Provinsi Banten. Wilayah Kota Serang secara geografis terdiri dari daratan, perbukitan dan lautan. Apabila memakai koordinat system UTM (Universal Transfer Mercator) zone 48 wilayah kota serang terletak pada koordinat 618.000 m sampai dengan 638.600 m dari barat ke timur dan 9.337.725 m sampai dengan 9.312.475 m dari utara ke selatan. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari utara ke selatan adalah sekitar 21,7 km dan jarak terpanjang dari barat ke timur adalah sekitar 20 km. Batas wilayah Kota Serang mencakup yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Banten .
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.
- Sebelah barat berbatasan dengan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung dan Kecamatan Kramatwaktu Kabupaten Serang.
- Sebelah selatan berbatasan dengan KecamatanCikeusal. Kecamatan Petir dan KecamatanBaros Kabupaten Serang.

Kota Serang yang merupakan Ibukota Provinsi Banten terletak pada posisi yang sentral dan strategis karena berada di jalur utama penghubung lintas Jawa – Merak serta dilintasi jalur Kereta Api Lintas Jakarta – Merak. Jarak Kota Serang hanya lebih kurang 75 km ke Jakarta Ibukota Negara yang telah dihubungkan dengan jalan bebas hambatan (Jalan Tol Jakarta Merak). Luas wilayah Kota Serang tercatat 26.439 ha yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, 20 (dua puluh) kelurahan dan 46 (empat puluh enam) desa.

8. Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten dan secara administratif terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, 49 (empat puluh sembilan) kelurahan dan 5 (lima) desa dengan luas wilayah 147,19 km² atau 14.719 Ha. Kota Tangerang Selatan berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang di bagian utara, Provinsi DKI Jakarta & Kota Depok di bagian Timur, Kabupaten Bogor & Kota Depok di bagian selatan dan Kabupaten Tangerang di bagian barat serta dilintasi oleh Kali Angke, Kali Pesanggrahan dan Sungai Cisadane sebagai batas administrasi kota di sebelah barat. Letak geografis Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta pada sebelah utara dan timur memberikan peluang pada Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu daerah penyangga provinsi DKI Jakarta, selain itu Kota Tangerang juga merupakan daerah yang menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.

4.3. Kependudukan

Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota

KAB/ KOTA	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)			Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk	
	80-90	90-00	00-10	2010	2000	2010
Kab. Pandeglang	2.14	1.66	1.30	2.746,89	368.00	419.00
Kab. Lebak	2.49	1.66	1.58	3.426,56	301.00	351.00
Kab. Tangerang	5.00	4.20	3.80	1.011,86	1,935.00	2,801.00
Kab. Serang	2.54	2.88	1.44	1.734,28	702.00	809.00
Kota Tangerang	8.77	3.70	3.12	153,93	8,615.00	11,685.00
Kota Cilegon	4.85	3.70	2.44	175,50	1,681.00	2,134.00
Kota Serang	-	-	2.88	266,71	1,635.00	2,166.00
Kota Tangsel	-	-	4.63	147,19	5,597.00	8,766.00
BANTEN	4.04	3.10	2.78	9.662,92	838.00	1,100.00

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2011.

Jumlah penduduk Banten pada tahun 2010 mencapai 10.632.166 jiwa yang tersebar kedalam 8 kabupaten/kota. Jumlah penduduk laki-laki adalah 5.439.148 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 5.193.018 jiwa. Tingkat kepadatan Penduduk rata-rata Provinsi Banten pada tahun 2010 adalah 1.100 jiwa per km². Jika melihat tren laju pertumbuhan penduduk Provinsi Banten, maka terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk Banten tahun 2010 relatif menurun setelah pada tahun 80-90an Laju pertumbuhan penduduk Banten relatif tinggi, yaitu mencapai 4% per tahun. Lebih lanjut, data laju pertumbuhan penduduk, dan kepadatan penduduk per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kota Tangerang Selatan menjadi wilayah administratif yang paling tinggi laju pertumbuhan penduduknya dengan 4,63% per tahun. Diikuti Kabupaten Tangerang dengan 3,80% dan Kota Tangerang dengan 3.12%. Adapun wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk paling rendah adalah Kabupaten Pandeglang dengan 1,30% per tahun pada tahun 2000-2010, diikuti Kabupaten Serang dengan 1.44% dan Kabupaten Lebak 1.58%.

Dari sisi kepadatan penduduk per km², dapat terlihat bahwa terjadi ketidakmerataan persebaran penduduk di Provinsi Banten dengan rasio yang cukup signifikan. Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan adalah dua wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi, yaitu dengan 11.685 jiwa/km² dan 8.766 jiwa/km². Hal ini berbanding terbalik dengan tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang yang masing-masing hanya memiliki tingkat kepadatan penduduk kurang dari 500 jiwa/km². Posisi sebagai daerah penyangga DKI Jakarta dapat menjadi salah satu faktor mengapa pertumbuhan penduduk daerah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangsel cukup tinggi, yaitu menjadi daerah pilihan bagi masyarakat yang bekerja di DKI Jakarta untuk tinggal dan menetap di ketiga daerah tersebut, sehingga sangat wajar bila laju pertumbuhan penduduk dan tingkat kepadatan penduduknya lebih tinggi daripada daerah lainnya.

4.4. Kondisi Perekonomian

4.4.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Provinsi Banten sebagian besar didorong oleh industri pengolahan yang berlokasi di beberapa wilayah di Provinsi Banten. Hal ini terlihat dari porsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Banten yang didominasi oleh sektor industri pengolahan. Sesuai dengan tabel PDRB atas dasar harga konstan di bawah ini, terlihat bahwa industri pengolahan menyumbang Rp 33.779.343.000,00 pada tahun 2010 dari total PDRB Provinsi Banten yang

berjumlah Rp 76.307.757.590,00 Itu berarti industri pengolahan menyumbang hampir setengah dari total PDRB. Sejak tahun 2008, industri pengolahan menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan PDRB Provinsi Banten yang juga terus meningkat. Namun demikian, seperti yang telah dipaparkan pada bab pendahuluan, pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah bukan berarti sejalan dengan tingkat pemerataan ekonominya.

Tabel 4.3. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten, Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2008	2009	2010
1. Pertanian	5.408.861,73	5.641.900,50	5.974.381,61
2. Penggalan	79.151,12	90.195,51	97.765,08
3. Industri Pengolahan	32.225.075,20	32.707.531,26	33.779.343,16
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	2.805.792,50	2.922.549,08	3.280.340,37
5. Kontruksi	2.010.388,56	2.204.523,41	2.359.793,17
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	14.202.996,50	15.127.918,26	16.276.822,36
7. Transportasi dan Komunikasi	6.200.675,31	6.877.187,61	7.719.131,44
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	2.489.875,78	2.822.560,19	3.014.016,23
9. Jasa-jasa	3.380.093,59	3.636.754,80	3.805.764,27
Produk Domestik Regional Bruto	68.802.910,30	72.031.120,61	76.307.357,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2011

Sebagai sektor yang menonjol dan berperan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Banten, industri pengolahan menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Sebagian tenaga kerja tersebut bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Serang. Kondisi tersebut membuka kesempatan bagi ketiga daerah tersebut untuk lebih berkembang secara ekonomi dibandingkan dengan daerah lainnya.

Berbeda dengan Kabupaten dan Kota Tangerang serta Kota Serang, Kota Tangerang Selatan relatif maju pertumbuhan ekonomi wilayahnya bukan dikarenakan berlokasinya industri pengolahan di daerah tersebut. Namun karena investasi properti yang masuk dan berkembang disana sehingga secara signifikan menggerakkan roda perekonomian wilayahnya. Masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Banten memang memiliki ciri khas ekonominya masing-masing. Namun, jika melihat laju pertumbuhan PDRB masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Banten (lihat tabel), dapat lihat bahwa setiap kabupaten/kota menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang meningkat, khususnya pada tahun 2010.

Tabel dibawah memperlihatkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada tahun 2010 adalah 5,94 %. Laju Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 memang meningkat dari tahun 2009 yang hanya 4,69%, namun relatif menurun jika dibandingkan dengan tahun 2007 yang mencapai 6,04%.

Tabel 4.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Provinsi Banten ADH Konstan 2000 Menurut Kabupaten/ Kota (persen)

NO	KAB/ KOTA	2007	2008	2009	2010
1	Kab. Pandeglang	4.48	4.29	4.21	6.77
2	Kab. Lebak	4.90	4.06	4.10	4.15
3	Kab. Tangerang	6.48	5.33	4.41	6.71
4	Kab. Serang	4.71	3.95	3.18	4.15
5	Kota Tangerang	6.86	6.37	5.74	6.68
6	Kota Cilegon	5.48	5.02	4.83	5.26
7	Kota Serang	6.25	5.63	5.44	7.63
8	Kota Tangsel	7.84	9.39	8.49	8.70
	JumlahKab/Kota	6.18	5.65	5.08	6.30
	Provinsi Banten	6.04	5.77	4.69	5.94

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2011

4.4.2. Kemiskinan

Dari sisi kemiskinan, dibandingkan dengan tingkat nasional, persentase pertumbuhan penduduk miskin masih berada di bawah tingkat nasional. Pada awal terbentuknya Provinsi Banten pertumbuhan penduduk miskin di Banten pada tahun 2002 sebesar 9.22% dan menjadi 9.79% di tahun 2006, sementara pada tingkat nasional 17.75% kemudian tingkat pertumbuhan penduduk miskin semakin membaik sampai dengan tahun 2010 sebesar 7.02% sementara tingkat nasional 12.36%. Meskipun jumlah penduduk miskin di Banten sempat naik dari tahun 2002 sebesar 786.700 orang menjadi 904.280 pada tahun 2006, namun trennya mulai menurun pada tahun 2007 seiring dengan menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk miskin nasional, yang diperkirakan karena membaiknya perekonomian akibat dampak dari berkurangnya dampak kenaikan BBM pada Oktober 2005 (Kajian Ekonomi Regional Banten, 2007) dimana jumlah penduduk miskin di tahun 2007 sebesar 886.190 dan terus menurun menjadi 751.000 pada tahun 2010.

Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2002 – 2010

NO	Kab/ Kota	2002	2006	2007	2010
1	Pandeglang	157,300	170,250	175,500	127,800
2	Lebak	168,700	172,440	181,070	125,200
3	Tangerang	208,700	279,090	258,860	205,100
4	Serang	170,100	170,780	177,400	89,200
5	Tangerang	62,000	95,140	76,900	124,300
6	Cilegon	19,900	16,580	16,460	16,800
7	Serang	-	-	-	40,700
8	Tangsel	-	-	-	21,900
	Provinsi Banten	786,700	904,280	886,190	751,000

Sumber : BPS Provinsi Banten

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa sampai dengan tahun 2010 jumlah penduduk miskin paling banyak berada di Kabupaten Tangerang sebanyak 205.100 orang diikuti Kabupaten Pandeglang sebanyak 127.800 orang dan Kabupaten Lebak sebanyak 125.200, sementara jumlah penduduk miskin terendah

adalah di daerah Kota Cilegon sebanyak 16.800 orang. Hal ini dikarenakan Cilegon sebagai salah satu pusat perindustrian yang tentunya memberikan banyak peluang kerja bagi masyarakat sekitarnya. Kabupaten Tangerang meskipun jumlah penduduknya relatif yang terbanyak diantara kabupaten dan kota di Provinsi Banten, namun persentasenya dibanding dengan jumlah penduduknya masih cukup kecil, yaitu sebesar 7.18%. Sedangkan Pandeglang dan Lebak dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit dibanding Kabupaten Tangerang memiliki jumlah penduduk miskin dengan persentase yang cukup besar, yaitu 11.14% (Pandeglang) dan 10.38% (Lebak) di tahun 2010.

Tabel.4.6. Persentase Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2002 – 2010

NO	KAB/ KOTA	2002	2006	2007	2008	2009	2010
	Kabupaten						
1	Pandeglang	15.11	15.82	15.64	12.55	12.01	11.14
2	Lebak	16.16	14.55	14.43	12.05	10.63	10.38
3	Tangerang	7.00	8.28	7.18	7.41	6.55	7.18
4	Serang	9.80	9.55	9.47	6.48	5.80	6.34
	Kota						
5	Tangerang	4.38	6.41	4.92	6.83	6.42	6.88
6	Cilegon	6.42	4.99	4.71	3.95	4.14	4.46
7	Serang	-	-	-	-	6.19	7.03
8	Tangsel	-	-	-	-	-	1.67
	Provinsi Banten	9.22	9.79	9.07	8.15	7.46	7.02

Sumber : BPS Provinsi Banten

Walaupun tingkat kemiskinan menurun, permasalahan kemiskinan di propinsi Banten perlu mendapat perhatian yang ekstra karena jika tidak ditangani secara serius dapat mengarah pada kemiskinan struktural¹. Hal ini mengingat bahwa salah satu faktor mendasar yang menyebabkan kemiskinan di Banten cukup tinggi adalah rendahnya pendidikan sebagian masyarakat di Banten yang juga berpengaruh pada terbatasnya ketrampilan, sumber daya alam (*endowment*) yang relatif terbatas dan budaya masyarakat yang belum mengedepankan produktivitas dan daya saing (Kajian Ekonomi Regional Banten, 2007).

¹ Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan (Suyanto 1995 dalam Lusiana 2008)

4.4.3. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Banten sampai dengan tahun 2010 terus mengalami perkembangan yang positif, dimana tingkat pengangguran pada tahun 2008 sebesar 15.18% dan mengalami penurunan sampai dengan tahun 2010 menjadi 13.68%. Meskipun tren persentase pengangguran terus mengalami penurunan, jumlah riil pengangguran malah mengalami kenaikan, yaitu 652.462 orang pada tahun 2009 naik menjadi 726.377 orang. Pengangguran Banten masih lebih tinggi dibanding nasional serta menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa persentase tingkat pengangguran di Provinsi Banten sampai dengan tahun 2010 yang tertinggi adalah di wilayah Cilegon sebesar 19.84%, diikuti Kota Serang sebesar 17.11%, sementara yang terendah adalah Kabupaten Pandeglang pada tahun 2009 sebesar 10.98. Tahun 2010 yang terendah adalah Kota Tangerang Selatan sebesar 8.22%.

Tabel 4.7 Persentase tingkat pengangguran di Provinsi Banten tahun 2007-2010

NO	KAB/ KOTA	2007	2008	2009	2010
	Kabupaten				
1	Pandeglang	10.00	11.13	10.98	11.34
2	Lebak	12.40	10.68	13.42	13.35
3	Tangerang	15.40	15.23	15.86	14.01
4	Serang	17.10	16.49	14.45	16.19
	Kota				
5	Tangerang	20.40	18.62	15.57	14.09
6	Cilegon	20.80	18.65	18.26	19.84
7	Serang	-	-	17.55	17.11
8	Tangsel	-	-	-	8.22
	Provinsi Banten	15.80	15.18	14.97	13.68

Sumber: Kajian Ekonomi Regional 2007, Banten Dalam Angka 2011.

4.5 Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indikator utama dalam melihat kualitas hidup manusia. Seperti yang terlihat dalam tabel 4.8, IPM Provinsi Banten terus mengalami peningkatan sejak tahun 1999 sampai 2010. Secara nasional, IPM Banten menempati urutan ke 23, yaitu 70.48 pada tahun 2010.

Namun, dari ukuran masing- masing wilayah kabupaten/kota, dapat terlihat bahwa 3 wilayah nilai IPM tertinggi adalah Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang sejak tahun 1999 sampai 2010, ditambah dengan Tangerang Selatan sejak tahun 2009. Keempat wilayah kabupaten/ kota ini selalu memperoleh nilai IPM di atas nilai IPM Provinsi Banten, sementara Lebak masih menjadi yang terendah diikuti oleh Pandeglang dan Kabupaten Serang dengan nilai IPM masih dibawah angka 70.

Tabel. 4.8 Perkembangan IPM di Provinsi Banten Tahun 1999-2010

	1999	2002	2006	2007	2008	2009	2010
Kab. Pandeglang	61.20	63.20	66.90	67.39	67.75	67.99	68.29
Kab. Lebak	61.00	61.60	66.65	66.74	67.11	67.45	67.67
Kab. Tangerang	63.50	68.40	70.04	70.71	71.14	71.45	71.76
Kab. Serang	60.80	63.70	66.80	67.45	67.80	68.27	68.67
Kota Tangerang	68.30	72.20	74.11	74.40	74.70	74.89	75.17
Kota Cilegon	67.90	70.70	74.11	74.43	74.94	74.99	75.29
Kota Serang	-	-	-	-	69.43	69.99	70.61
Kota Tangsel	-	-	-	-	-	75.01	75.38
BANTEN	62.80	66.60	66.11	69.29	629.70	66.60	70.48

Sumber: Bappeda Provinsi Banten.

IPM terdiri atas beberapa indikator yaitu: Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Daya Beli .

Indeks Kesehatan dilihat dengan menggunakan indikator Angka Harapan Hidup yaitu rata – rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (BPS,2008).

Indeks Pendidikan dapat dilihat dengan menggunakan indikator Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (Years of Schooling/YOS). AMH Adalah angka persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya, sedangkan YOS yaitu menggambarkan jumlah tahun yan digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menalani pendidikan formal (BPS,2008).

Berdasarkan ketiga indeks tersebut, perkembangan IPM Provinsi Banten sejak tahun 1999 sampai 2010 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

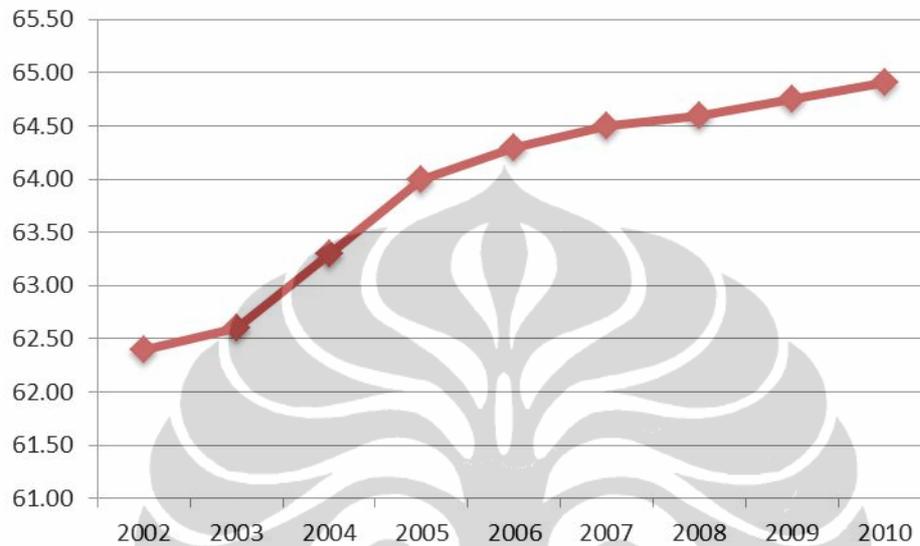
Tabel 4.9. Perkembangan Indikator Provinsi Banten Tahun 1999-2010

Tahun	AHH	AMH	RLS	IDB	IPM
1999	62.20	91.50	6.60	579.60	62.80
2000	62.40	92.10	6.80	617.80	63.80
2001	63.10	92.50	7.10	658.00	65.30
2002	62.40	93.80	7.90	608.70	66.60
2003	62.60	94.20	8.10	611.70	67.20
2004	63.30	94.00	7.90	618.00	67.90
2005	64.00	95.60	8.00	619.20	68.80
2006	64.30	95.60	8.10	620.00	69.10
2007	64.50	95.60	8.10	621.00	69.30
2008	64.60	95.60	8.10	625.52	69.70
2009	64.75	95.95	8.15	627.63	70.06
2010	64.90	96.20	8.32	629.70	70.48

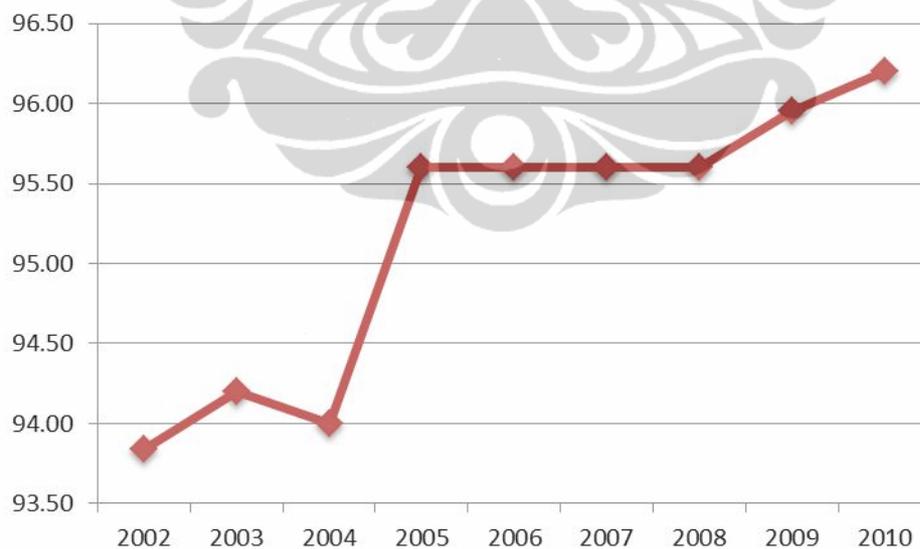
Sumber: Bappeda Provinsi Banten.

Meskipun tidak nampak kenaikan yang signifikan, namun dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang positif. Jika dilihat masing masing indeks maka akan tampak bahwa indeks kesehatan menunjukkan perkembangan/ tren yang positif sejak tahun 1999-2010, seperti tampak dalam grafik dibawah ini.

Meskipun tren AHH sempat menurun cukup drastis di tahun 2002 namun perkembangan AHH kembali meningkat menjadi 64.00 di tahun 2005 dan sampai dengan tahun 2010 menjadi 64.90.



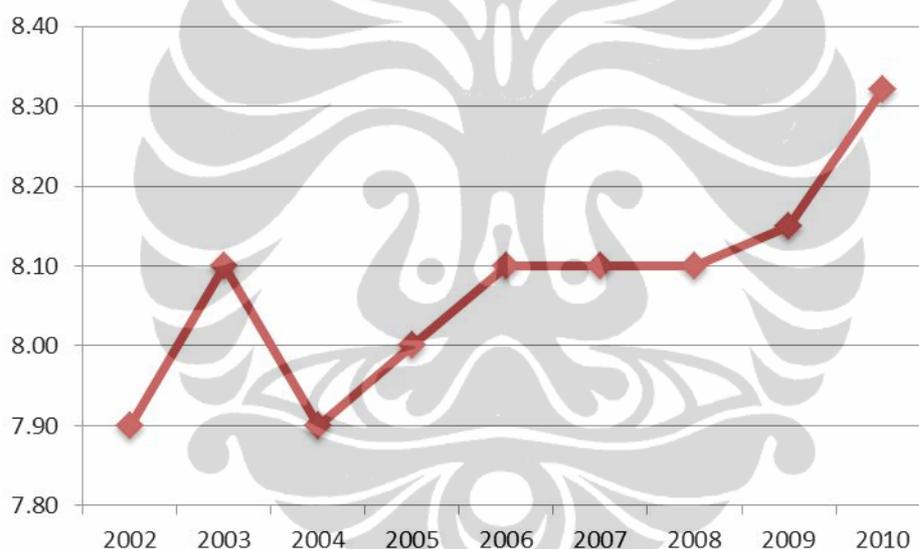
Grafik 4.1 Perkembangan Indeks Kesehatan (Angka Harapan Hidup)
Sumber: data BPS diolah.



Grafik 4.2. Perkembangan Indeks Angka Melek Huruf di Provinsi Banten

Tren perkembangan Indeks Pendidikan yang dilihat dengan indikator Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) akan tampak seperti grafik 4.2. Dari grafik 4.2 gambaran perkembangan Indeks Angka Melek Huruf di Provinsi Banten menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini menandakan bahwa pembangunan fasilitas pelayanan publik di bidang pendidikan terus membaik.

Sementara gambaran perkembangan Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang juga merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan Indeks Pemangunan Manusia dalam sektor pendidikan dapat dilihat pada grafik 4.3 dibawah ini.

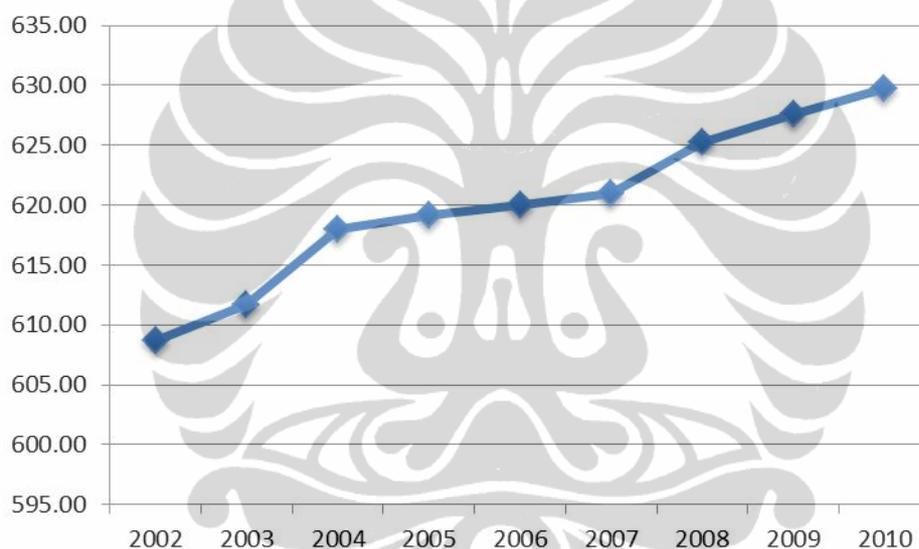


Grafik 4.3. Gambaran Perkembangan Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Banten

Jika melihat tren perkembangan indeks pendidikan yang ditunjukkan pada grafik diatas, indikator Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahunnya, atau dapat dikatakan bahwa tren perkembangannya positif. AMH sejak tahun 1999 sampai 2010 berada diatas 91.00 yaitu pada tahun 1999 91.50 dan meningkat terus menjadi 95.60 di tahun 2005 dan pada tahun 2010 mejadi 96.20.

Sementara jika dilihat dari Indeks Daya Beli (IDB) masyarakat atau *Purchasing Power Parity* (PPP) maka tren perkembangannya akan tampak seperti dibawah ini.

Secara keseluruhan tren indeks daya beli masyarakat terus meningkat, pada tahun 2003 menjadi 611.70 atau meningkat sedikit sekitar 0.6% dari tahun 2002 dan terus meningkat sampai dengan tahun 2010 menjadi 629.70 atau meningkat sekitar 3.57% dari tahun 2002. Meskipun peningkatannya terbilang lambat dari tahun ketahun, namun perkembangannya menunjukkan tren yang positif.



Grafik 4.4 Gambaran Perkembangan Indeks Daya Beli Masyarakat Di Provinsi Banten Tahun 1999-2010

BAB 5

ANALISIS HASIL

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penghitungan atas data – data yang telah diperoleh, dengan menggunakan alat analisis *Theil Index* dan *Williamson Index*. Variabel yang dihitung dengan menggunakan Theil Indeks adalah variabel PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yaitu untuk melihat ketimpangan dari segi ekonomi di Provinsi Banten. Sedangkan ketimpangan dari segi non-ekonomi menggunakan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

5.1. Hasil Perhitungan Indeks Williamson

Untuk melihat adanya ketimpangan pembangunan manusia, digunakan alat analisis Indeks Williamson yang menghitung Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. Indeks ini terdiri dari indeks kesehatan dengan menggunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), indeks pendidikan dengan indikator Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta indeks daya beli masyarakat dengan Indeks Daya Beli (IDB). Hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel 5.1. dibawah ini.

Tabel. 5.1. Perhitungan Indeks Williamson Provinsi Banten Tahun 2002-2010

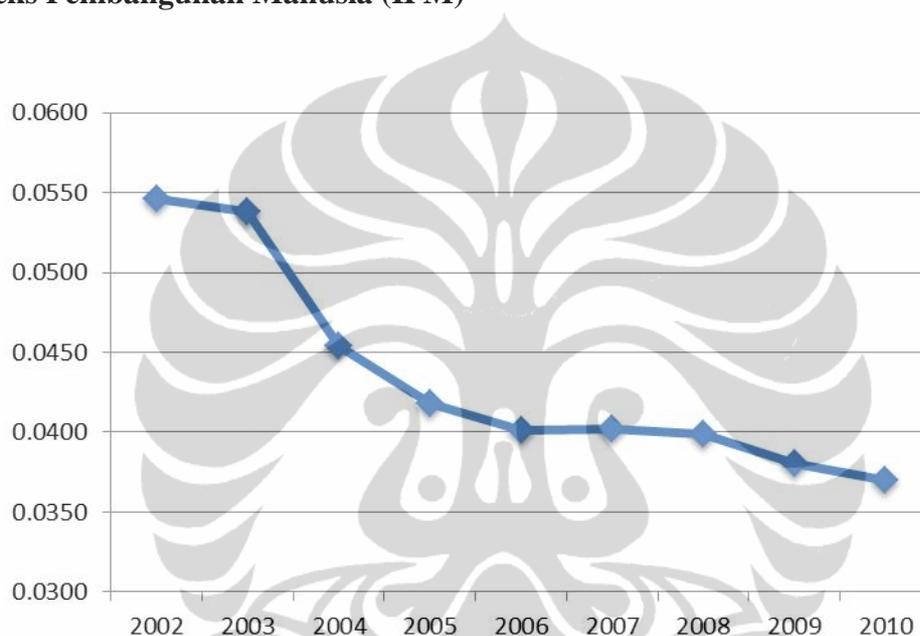
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
IPM	0.0546	0.0538	0.0454	0.042	0.0401	0.0402	0.0399	0.038	0.037
AHH	0.0408	0.0419	0.0379	0.036	0.0349	0.0327	0.0316	0.0297	0.0346
AMH	0.0233	0.0244	0.0171	0.013	0.0121	0.0145	0.0152	0.0133	0.0127
RLS	0.2057	0.1982	0.185	0.176	0.1663	0.1666	0.1668	0.1648	0.1567
IDB	0.0223	0.0217	0.0109	0.010	0.0111	0.0121	0.0121	0.0106	0.0111

Hasil perhitungan pada tabel 5.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2002, tahun awal berdiri Provinsi Banten, ketimpangan pembangunan manusia

berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia adalah 0.0546 dan semakin menurun hingga menjadi 0.037 di tahun 2010, ini berarti bahwa ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia antar daerah di Provinsi Banten tidak besar dan ketimpangan pembangunan manusia di Provinsi Banten semakin kecil.

Gambaran tren perkembangan dari data tabel diatas dapat dilihat seperti pada grafik-grafik dibawah ini.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Grafik 5.1 Gambaran Perkembangan Ketimpangan IPM di Provinsi Banten Tahun 2002-2010 dengan Perhitungan Indeks Williamson

Dengan melihat grafik diatas nampak bahwa perkembangan ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002 indeks ketimpangan sebesar 0.0546 menurun sampai 32% pada tahun 2010 yaitu dengan indeks ketimpangan sebesar 0.037. Ini menunjukkan bahwa kualitas penduduk di Provinsi Banten semakin baik dari tahun ke tahun, sehingga ketimpangan antarwilayah di Provinsi Banten semakin mengecil. Hal ini dikarenakan kemampuan Banten untuk mengalokasikan dana untuk menjalankan program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti Listrik Desa (LisDes), penyediaan fasilitas air bersih dan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK), program Bantuan Keuangan (*fresh money*),

serta program bantuan keterampilan dan peningkatan usaha mikro serta usaha kecil di pedesaan. Dengan program-program ini, kabupaten/kota yang semula tertinggal dapat mulai mengejar ketertinggalan pembangunan manusia.

Indikator Kesehatan

Dibawah ini adalah tabel yang menunjukkan tren Angka Harapan Hidup di Provinsi Banten.

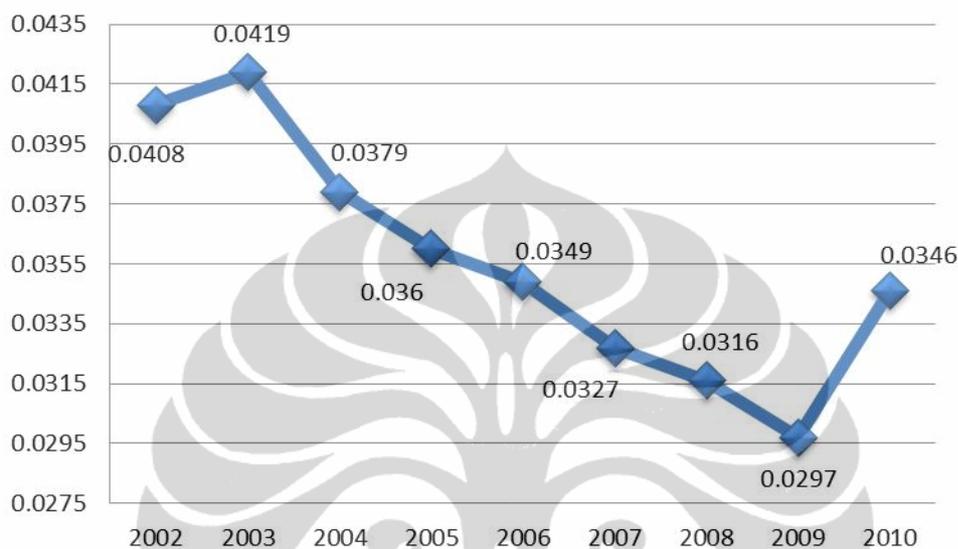
Tabel 5.2 Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2002-2010

Kabupaten/Kota	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. Pandeglang	61.6	62.0	62.4	62.7	62.8	63.09	63.28	63.52	63.77
2. Lebak	61.9	62.3	62.3	62.6	63.0	63.11	63.14	63.21	63.28
3. Tangerang	63.8	64.2	64.0	64.9	65.1	65.32	65.44	65.61	65.79
4. Serang	60.2	60.5	61.1	61.4	61.8	62.29	62.65	63.08	63.51
5. Kota Tangerang	67.2	67.5	68.0	68.1	68.2	68.23	68.29	68.33	68.37
6. Kota Cilegon	67.3	67.6	67.9	68.0	68.4	68.45	68.49	68.53	68.58
7. Kota Serang	64.12	64.62	65.13
8. Kota Tangerang Selatan	68.43	68.54
Provinsi Banten	62.4	62.6	63.3	64.0	64.3	64.5	64.6	64.75	64.90

Sumber: BPS Provinsi Banten

Rata-rata Angka Harapan Hidup di seluruh daerah dan seluruh tahun adalah 64.74 tahun. Hingga tahun 2010, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang tidak mencapai AHH rata-rata dan hanya mencapai angka 63.77, 63.28, dan 63.51. Kota Cilegon dan Tangerang selalu memiliki Angka Harapan Hidup tertinggi, begitu pula Kota Tangerang Selatan yang merupakan daerah pemekaran dari Kota Tangerang. Angka Harapan Hidup menunjukkan estimasi umur hingga seseorang meninggal. Tingginya nilai AHH berarti rendahnya *Infant Mortality Rate* (IMR) atau Angka Kematian Bayi (AKB). Berarti, IMR di Pandeglang, Lebak, dan Kabupaten Serang relatif tinggi

dibandingkan daerah lain. Tingginya IMR dapat disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan sarana prasarana kesehatan di 3 kabupaten tersebut sehingga kesehatan ibu hamil dan bayi tidak dapat dijaga dengan baik.



Grafik 5.2. Gambaran Perkembangan Ketimpangan AHH di Provinsi Banten Tahun 2002-2010 dengan Perhitungan Indeks Williamson

Pada grafik 5.2 tampak perkembangan ketimpangan Angka Harapan Hidup di Provinsi Banten sejak tahun 2002-2010. Pada tahun 2002 indeks ketimpangan AHH berada pada angka 0.0408 dan sempat meningkat sebesar 2,69% pada tahun 2003 yaitu menjadi 0.0419, pada tahun 2003-2009 indeks ketimpangan AHH semakin menurun menjadi 0.0297 di tahun 2009 namun kembali meningkat di tahun 2010 sebesar 0.0346. AHH tertinggi dicapai oleh Kota Cilegon pada tahun 2002 sebesar 67.30 tahun diikuti oleh Kota Tangerang 67.20 tahun dan Kabupaten Tangerang sebesar 63.80 tahun, dimana ketiga wilayah ini memiliki tingkat AHH diatas Provinsi Banten yang pada tahun 2002 sebesar 62.40 tahun. Sampai dengan tahun 2010 ketiganya masih mendominasi puncak pencapaian nilai AHH tertinggi dibanding wilayah lain di Provinsi Banten yaitu berturut turut Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan (sejak 2009), Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang dengan nilai AHH sebesar 68.58 tahun,

68.54 tahun, 68.37 tahun dan 65.79 tahun sementara nilai AHH Provinsi Banten pada tahun 2010 adalah 64.90 tahun.

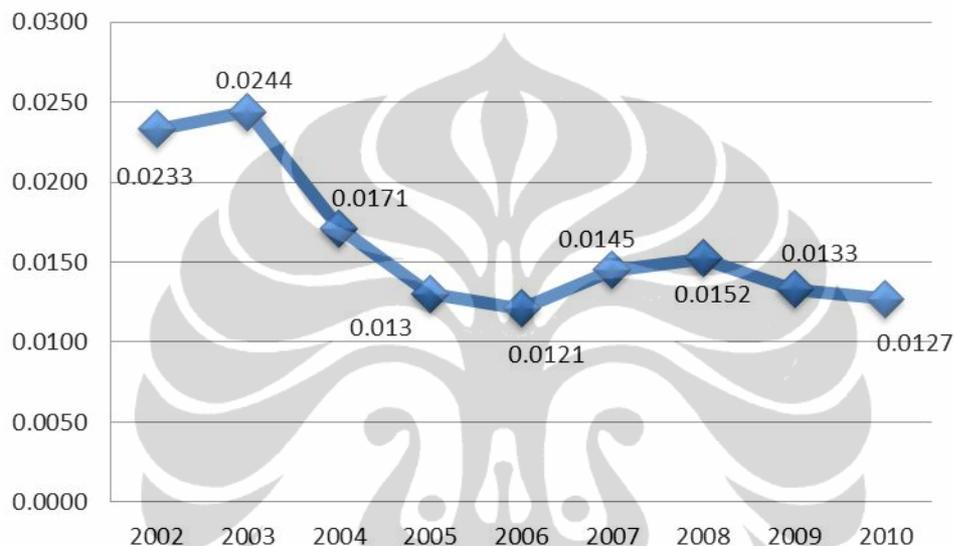
Keberhasilan peningkatan nilai AHH ini karena ditunjang dengan semakin meningkatnya pelayanan di bidang kesehatan, yaitu terlihat dari jumlah rumah sakit yang terus meningkat pada tahun 2008 sebanyak 41 buah, tahun 2009 menjadi 66 buah dan pada tahun 2010 menjadi 69 buah rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta. Sementara jumlah puskesmas pada tahun 2008 sebanyak 191 puskesmas, pada tahun 2009 sebanyak 194 puskesmas dan menjadi 208 puskesmas pada tahun 2010. Sementara jumlah dokter pada tahun 2008 sebanyak 2.052 orang menjadi 2.348 orang pada tahun 2009 dan menjadi 2.506 orang dokter pada tahun 2010. Dengan bertambahnya jumlah tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan dapat menjangkau masyarakat lebih luas maka jumlah dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan lebih merata sehingga nilai AHH menjadi semakin tinggi.

Indikator Pendidikan

Tabel 5.3 Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2002-2010

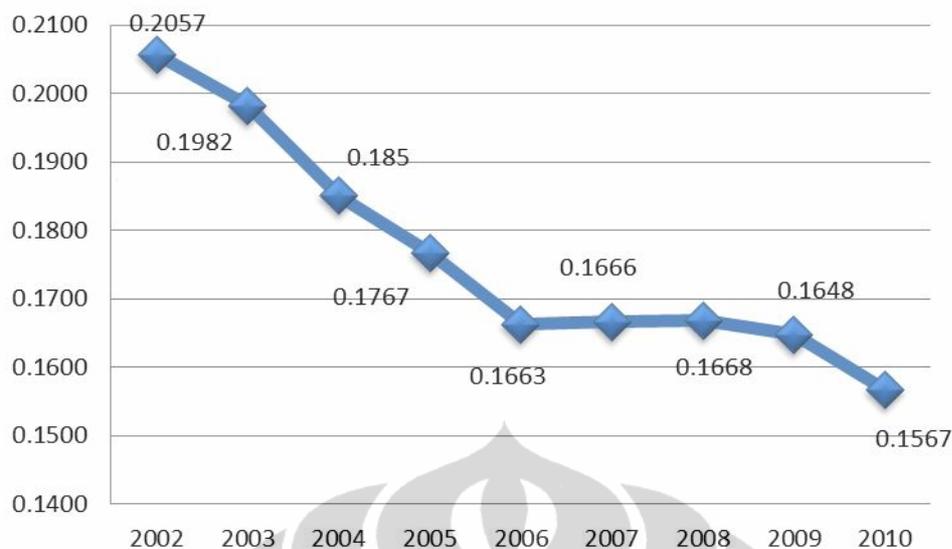
Kabupaten/Kota	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. Pandeglang	94.71	94.90	94.80	95.50	95.50	96.29	96.29	96.30	96.35
2. Lebak	90.19	91.40	93.90	94.10	94.10	94.10	94.10	94.55	94.60
3. Tangerang	93.74	93.70	94.00	94.70	94.70	95.34	95.34	95.66	95.78
4. Serang	91.95	92.90	93.80	94.60	95.50	95.54	94.58	94.93	95.23
5. Kota Tangerang	96.90	98.50	97.20	97.20	97.20	98.34	98.34	98.35	98.39
6. Kota Cilegon	98.49	98.60	98.70	98.70	98.70	98.70	98.70	98.71	98.72
7. Kota Serang	95.85	96.27	96.47
8. Kota Tangerang Selatan	98.14	98.15
Provinsi Banten	93.84	94.20	94.00	95.60	95.60	95.60	95.60	95.95	96.20

Tabel diatas adalah tabel yang menunjukkan tren Angka Melek Huruf di Provinsi Banten. Rata-rata AMH untuk seluruh tahun dan seluruh daerah adalah 95.8.%. Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang masih dibawah rata-rata tersebut dengan angka 94,6 dan 95.23. Artinya, pendidikan di dua kabupaten tersebut relatif rendah dibandingkan daerah lainnya.



Grafik 5.3 Gambaran Perkembangan Ketimpangan AMH di Provinsi Banten Tahun 2002-2010 dengan Perhitungan Indeks Williamson

Grafik 5.3 menunjukkan perkembangan ketimpangan Angka Melek Huruf (AMH) pada tahun 2002-2010. Nampak bahwa tren ketimpangan masih fluktuatif, hal ini ditunjukkan dengan gambar grafik yang belum stabil. Pada tahun 2002 ketimpangan AMH berada pada level 0.0233 dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 0.0244 namun kemudian turun sampai dengan tahun 2006 menjadi 0.0121, dan kembali meningkat sampai dengan tahun 2008 menjadi 0.0152, kemudian sampai dengan tahun 2010 indeks ketimpangan menurun menjadi 0.0127 atau sebesar 4.5% dari tahun 2008.



Grafik 5.4. Gambaran Perkembangan Ketimpangan RLS di Provinsi Banten Tahun 2002-2010 dengan Perhitungan Indeks Williamson

Grafik 5.4 menunjukkan gambaran perkembangan ketimpangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Banten sejak tahun 2002 hingga 2010. Nampak bahwa tren perkembangan RLS menurun, pada tahun 2002 level ketimpangan RLS berada pada angka 0.2057 dan pada tahun 2010 menjadi 0.1567 atau menurun sebesar 23.82 persen. Indeks Pendidikan dengan indikator rata-rata lama sekolah (15 tahun keatas) pada tahun 2002 adalah 7.9, kemudian meningkat menjadi 8.1 pada tahun 2006 dan menjadi 8.32 pada tahun 2010. Selain itu jika dilihat menurut kabupaten/ kota di Provinsi Banten dapat dijelaskan bahwa di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Serang tingkat pendidikan yang ditamatkan didominasi oleh tingkat SD/ sederajat, 41,48% di Kabupaten Pandeglang, 45.95% di Kabupaten Lebak, 37.49% di Kabupaten Tangerang, 26.86% di Kabupaten Serang, dan 30.92% di Kota Serang. Sementara di Kota Tangerang, Cilegon, dan Tangerang Selatan didominasi oleh SLTA, yaitu 36.10%, 33.12%, dan 34.18%. Sementara indeks Rata-rata Lama Sekolah di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Cilegon sejak tahun 2002 hingga tahun 2010 selalu berada diatas angka Provinsi Banten, begitu juga Kota Tangerang Selatan sejak tahun 2009 hingga 2010 berada diatas angka Provinsi Banten.

Dibawah ini adalah tabel yang menunjukkan tren Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Banten. Tabel dibawah menunjukkan bahwa Kota Tangerang Selatan adalah Kota dengan rata-rata lama sekolah terlama yaitu sebanyak 10,15 Tahun Pada 2010 8,15 tahun pada 2009, dan 8,10 tahun selama 2008. Adapun rata-rata lama sekolah terendah ditempati oleh Kabupaten Lebak dengan 6,24 tahun pda 2010, 6,22 pada 2009, dan 6,2 tahun pada 2008. Secara keseluruhan jika diamati, hanya ada tiga kota yang telah memenuhi standar minimum lama sekolah pemerintah, yaitu selama 9 Tahun, yaitu Kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan. Sisanya belum memenuhi ketentuan minimum lama sekolah yang ditetapkan Pemerintah.

Tabel 5.4. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Provinsi Banten Berdasarkan Kabupaten/Kota Pada Tahun 2008-2010

Kabupaten/Kota	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. Pandeglang	5.90	5.90	6.30	6.40	6.40	6.38	6.38	6.44	6.47
2. Lebak	5.30	5.50	6.10	6.20	6.20	6.20	6.20	6.22	6.24
3. Tangerang	8.60	8.60	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90	8.93	8.94
4. Serang	6.80	6.90	6.50	6.60	7.00	7.00	7.00	7.04	7.05
5. Kota Tangerang	10.10	10.20	9.80	9.80	9.80	9.80	9.82	9.95	9.98
6. Kota Cilegon	9.60	9.70	9.40	9.50	9.60	9.64	9.64	9.66	9.67
7. Kota Serang	7.01	7.25	7.51
8. Kota Tangerang Selatan	9.95	10.15
Provinsi Banten	7.90	8.10	7.90	8.00	8.10	8.10	8.10	8.15	8.32

Sumber: BPS Provinsi Banten

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dari sisi pendidikan yang ditunjukkan oleh rata-rata lama sekolah di Provinsi Banten, terjadi kesenjangan yang cukup signifikan. Hanya tiga kota yang memenuhi ketentuan minimum lama sekolah, sedangkan kabupaten/kota lainnya masih belum memenuhi ketentuan minimum tersebut.

Dari tabel 5.5 dapat dilihat bahwa ada kecenderungan penurunan rasio murid guru di jenjang pendidikan TK, SD, dan SLTA. Kecenderungan penurunan ini mengindikasikan bahwa semakin berkualitasnya pendidikan karena jumlah murid yang harus dididik oleh 1 guru semakin berkurang. Idealnya, rasio murid guru ini maksimal 25. Turunnya jumlah murid yang harus dididik ini disebabkan waktu yang diberikan oleh 1 guru kepada murid semakin berkualitas. Penyebab dari tren naiknya rasio murid guru diseluruh jenjang pendidikan pada tahun 2010 adalah meningkatnya jumlah murid tetapi justru diiringi dengan penurunan jumlah guru⁸.

Tabel 5.5 Rasio Murid-Guru Provinsi Banten Tahun 2008-2010

Pendidikan	2008	2009	2010
TK	12.954	8.608	8.695
SD	22.162	21.427	21.937
SLTP	14.247	14.744	14.920
SLTA	12.305	11.734	12.190

Sumber: BPS Provinsi Banten, telah diolah kembali

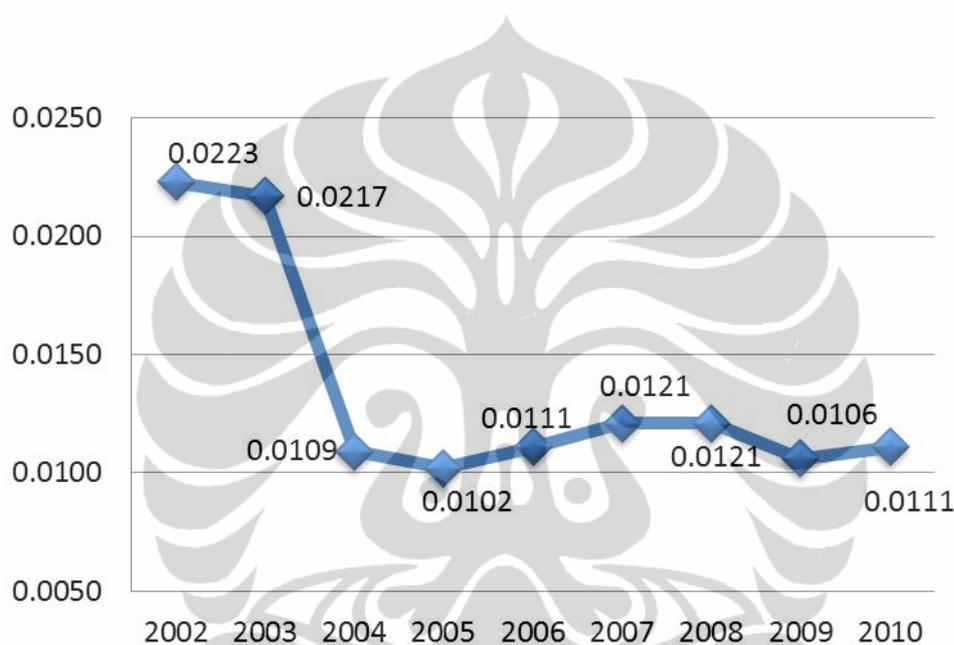
Jika melihat tren ketimpangan indeks pendidikan (AMH dan RLS) yang menunjukkan penurunan dari tahun 2002 hingga 2010 dapat dikatakan bahwa pembangunan pendidikan di Provinsi Banten cukup berhasil. Meskipun indeks AMH atau Angka Melek Huruf belum tercapai 100%, yang berarti bahwa masih terdapat penduduk yang mengalami buta huruf, namun jumlahnya terus berkurang yaitu 6.157% pada tahun 2002 dan menjadi 3.798% pada tahun 2010.

Indikator Daya Beli

Pada gambar grafik 5.5 tren ketimpangan Indeks Daya Beli (IDB) cenderung menurun sejak tahun 2002-2010. Pada tahun 2002 ketimpangan IDB berada pada level 0.0223 menurun drastis di tahun 2004 menjadi 0.0109 atau sebesar 51.12%, dan kemudian pada tahun 2007 indeks ketimpangan IDB kembali meningkat menjadi 0.0121 atau sebesar 11% dari tahun 2004. Kemudian pada

⁸ Ditunjukkan dari data dalam Banten Dalam Angka 2011

tahun 2010 indeks ketimpangan IDB turun sebesar 8.26% dari tahun 2004 dan menjadi 0.111. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Banten semakin merata. Dengan angka ketimpangan yang rendah, daya beli masyarakat yang merata mampu menunjang pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Peningkatan ketimpangan 2010 dari tahun 2009 merupakan akibat setelah melemahnya kondisi perekonomian Banten yang dilihat dari penurunan pertumbuhan dan nilai ekspor.



Grafik 5.5 Gambaran Perkembangan Ketimpangan IDB di Provinsi Banten Tahun 2002-2010 dengan Perhitungan Indeks Williamson

5.2. Hasil Perhitungan Indeks Theil

Untuk mengetahui ketimpangan ekonomi, digunakan perhitungan dengan Indeks Theil, dengan menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan menggunakan PDRB diharapkan dapat mengetahui tingkat ketimpangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Banten.

Dengan menggunakan perhitungan Indeks Theil maka kita dapat mengetahui ketimpangan di Provinsi Banten, baik ketimpangan dalam wilayah/kelompok maupun ketimpangan antar wilayah/kelompok.

Dalam penelitian ini dilakukan perhitungan dengan menggunakan beberapa kelompok, yaitu kelompok Kabupaten dan kelompok Kota, kelompok daerah Utara dan Selatan, kelompok daerah maju dan berkembang/tidak maju/tertinggal. Masing- masing akan dihitung dengan menggunakan Indeks Theil sehingga dapat diketahui pula kelompok manakah yang paling timpang diantara yang lain

5.2.1. Kelompok Kabupaten/Kota

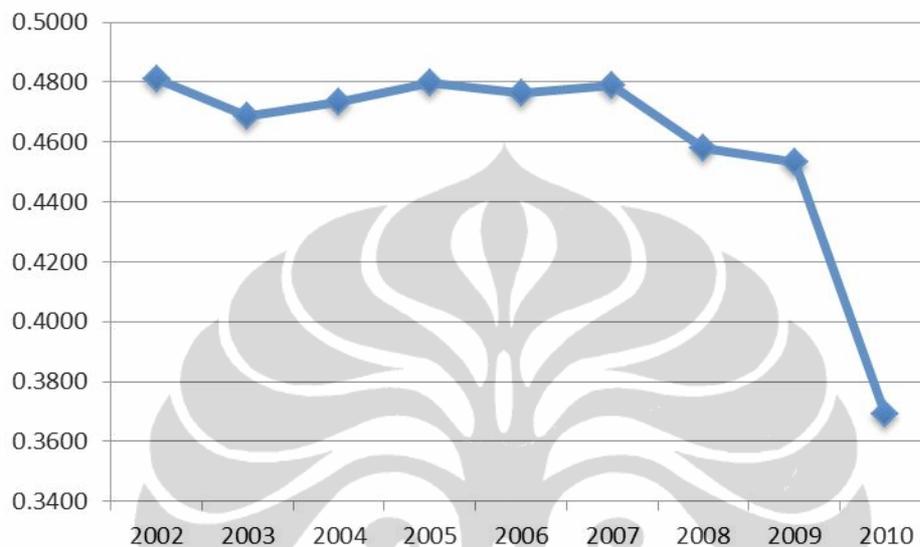
Secara administratif Provinsi Banten terdiri atas 4 kabupaten dan 4 kota, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang dengan luas wilayah setiap kabupaten mencapai lebih dari 1.000 km², sementara wilayah kota memiliki luas masing-masing tidak lebih dari 270 km² yaitu Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan. Adanya perbedaan luas wilayah yang sangat besar antara wilayah kabupaten dengan wilayah kota tentu akan memberikan dampak yang berbeda pua terhadap proses pembangunan di masing-masing wilayah tersebut. Dari perhitungan *Theil Index* didapat hasil seperti berikut ini.

Tabel 5.6 Hasil Perhitungan Indeks Theil Berdasarkan Kelompok Kabupaten-Kota di Provinsi Banten Tahun 2002-2010

Tahun	Theil Total	+/-
2002	0.4812	
2003	0.4687	-2.59
2004	0.4732	0.96
2005	0.4796	1.35
2006	0.4762	-0.70
2007	0.4789	0.58
2008	0.4579	-4.38
2009	0.4532	-1.04
2010	0.3690	-18.58

Tabel 5.6 menunjukkan nilai indeks theil Provinsi Banten sejak tahun 2002 hingga 2010. Pada tahun 2002 nilai indeks theil sebesar 0.4812 turun 2.59% menjadi 0.4687 pada tahun 2003. Meskipun sempat naik lagi pada tahun 2005 menjadi 0.4796 namun nilai indeks theil di provinsi Banten masih berkisar pada

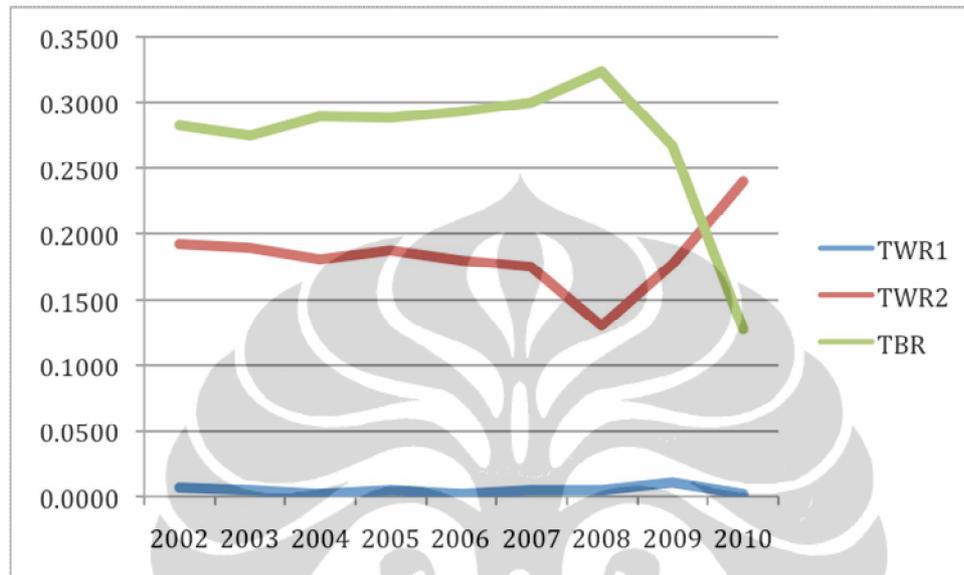
level 0.4 dan cenderung semakin menurun sampai dengan tahun 2010 menjadi 0.3690. Perkembangan nilai indeks theil ini dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini.



Grafik. 5.6 Gambaran Perkembangan Indeks Theil Total di Provinsi Banten Tahun 2002-2010

Perkembangan indeks theil total di Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar grafik diatas, sejak tahun 2002 hingga 2010 perkembangannya cenderung menurun. Ini berarti bahwa ketimpangan ekonomi yang dilihat dengan indikator PDRB semakin mengecil. Ini juga berarti bahwa nilai PDRB di wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Banten semakin meningkat dan semakin merata, sehingga dapat juga dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten juga semakin membaik. Penurunan ketimpangan ini disebabkan oleh peningkatan PDRB per kapita di kabupaten lebih cepat daripada peningkatan PDRB per kapita di kota sehingga wilayah kabupaten dapat mengejar ketertinggalan PDRB per kapita. Meskipun nilai PDRB Provinsi Banten masih didominasi oleh Kota Cilegon dan Kota Tangerang, masing-masing memberikan sumbangan kontribusi sebesar 49% dan 23%, namun secara total ketimpangan semakin menurun.

Sementara nilai Theil dalam wilayah/kelompok (*Theil Within*) dibanding nilai Theil antar wilayah/kelompok (*Theil Between*) dapat menunjukkan dengan lebih jelas bagaimana ketimpangan dalam kelompok dan antar kelompok.



Grafik 5.7 Gambaran Perkembangan Indeks *Theil Within* dan *Theil Between* di Provinsi Banten Tahun 2002-2010

Pada grafik 5.7. terlihat bahwa nilai Indeks *Theil Within* lebih kecil dibanding Indeks *Theil Between*. Indeks *Theil Within* di dalam wilayah/kelompok 1 yaitu wilayah yang terdiri dari 4 kabupaten (Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang) lebih kecil dibanding Indeks *Theil Within* di dalam wilayah/kelompok 2 yaitu yang terdiri dari 4 kota (Tangerang, Cilegon, Serang dan Tangsel).

Pada kelompok 1 (wilayah 4 kabupaten) nilai Indeks Theil tahun 2002 adalah 0.0062 dan terus menurun menjadi 0.0018 pada tahun 2010, ini berarti ketimpangan antar kabupaten dalam wilayah 1 sangat kecil bahkan nyaris tidak ada. Sementara pada kelompok 2 nilai indeks theil tahun 2002 sebesar 0.19 dan justru meningkat pada tahun 2010 menjadi 0.24 berarti ketimpangan cenderung semakin meningkat seiring dengan dilakukannya pemekaran dengan bertambahnya wilayah kota yaitu Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan dimana data mulai tahun 2009 termasuk Kota Serang sedangkan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010. Hal ini ternyata mempengaruhi indeks

ketimpangan dalam wilayah 2 (4 kota) yang meningkat sejak tahun 2008 0.13 menjadi 0.18 pada tahun 2009 dan 0.24 pada tahun 2010.

5.2.2. Kelompok Utara dan Selatan

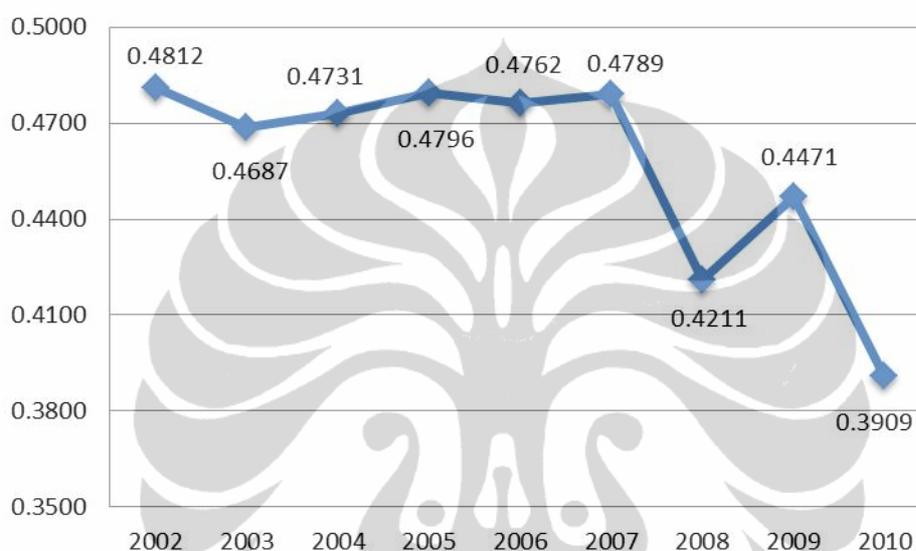
Pembagian wilayah untuk daerah utara dan selatan dimaksudkan karena adanya perbedaan kondisi antara daerah tersebut. Daerah Banten bagian utara dikenal lebih banyak diperuntukkan bagi perkembangan sektor industri, sementara bagi daerah selatan lebih banyak digunakan untuk sektor pertanian. Daerah utara terdiri dari Kabupaten Tangerang dan Serang, Kota Cilegon, Tangerang, Serang dan Tangerang Selatan, sementara Banten daerah selatan adalah Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Nilai Indeks Theil *Within*, Theil *Between* dan Theil Total menurut kelompok daerah utara-selatan dapat dilihat dalam tabel 5.5 dibawah ini.

Tabel. 5.7 Nilai Indeks Theil di Provinsi Banten tahun 2002-2010 Berdasarkan Pengelompokan Wilayah Utara-Selatan

	TWR1	TWR2	TBR	Total
2002	0.0001	0.4568	0.0243	0.4812
2003	0.0000	0.4450	0.0236	0.4687
2004	0.0000	0.4442	0.0290	0.4731
2005	0.0001	0.4520	0.0275	0.4796
2006	0.0002	0.4471	0.0290	0.4762
2007	0.0003	0.4488	0.0298	0.4789
2008	0.0004	0.3876	0.0331	0.4211
2009	0.0005	0.4143	0.0323	0.4471
2010	0.0001	0.3651	0.0256	0.3909

Pada tabel 5.7 diatas nilai TWR1 lebih kecil dibanding TWR2, artinya bahwa ketimpangan dalam wilayah 1 lebih kecil dibanding ketimpangan dalam wilayah 2. Wilayah 2 yang merupakan Banten Utara sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan oleh sektor industri, sehingga jumlah penduduknya lebih besar dan pendapatan daerahnya juga lebih tinggi dibanding wilayah selatan karena itu wajar jika ketimpangan di wilayah ini lebih tinggi.

Dibandingkan nilai indeks theil antar kelompok (TBR) maka nilai TWR2 juga lebih besar. Pada tahun 2002 TWR2 sebesar 0.4568 sementara TBR sebesar 0.0243, pada tahun 2010 nilai TWR2 turun dilevel 0.36 sementara TBR justru mengalami sedikit kenaikan yaitu menjadi 0.0256. Gambaran perkembangan nilai indeks theil dalam kelompok utara selatan ini dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Grafik. 5.8 Gambaran Perkembangan Indeks Theil Total di Provinsi Banten Berdasarkan Kelompok Daerah Utara dan Selatan tahun 2002-2010

Nilai indeks theil secara total menunjukkan tren yang menurun, dari tahun 2002 sebesar 0.4812 menjadi 0.421 pada tahun 2008 dan pada tahun 2010 turun sampai sebesar 18.75%. hal ini juga menunjukkan bahwa pembangunan di Provinsi Banten dapat dikatakan telah berhasil menurunkan ketimpangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Banten.

5.2.3. Kelompok Maju dan Bukan Maju

Analisis selanjutnya adalah penghitungan Indeks Theil dengan didasarkan pada kelompok daerah yang maju dengan daerah bukan maju (berkembang/tertinggal) dengan membandingkan nilai PDRB per kapita masing-masing daerah dengan PDRB per kapita Provinsi Banten.

Daerah dengan nilai PDRB per kapita yang lebih tinggi dari level Provinsi Banten maka daerah tersebut merupakan kelompok daerah maju yaitu Kota Cilegon dan Kota Tangerang, sebaliknya jika nilai PDRB per kapita lebih kecil dari level provinsi maka dikelompokkan kedalam daerah bukan maju. Hasil penghitungannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 5.8 Nilai Indeks Theil di Provinsi Banten tahun 2002-2010 Berdasarkan Pengelompokan Daerah Maju-Bukan Maju

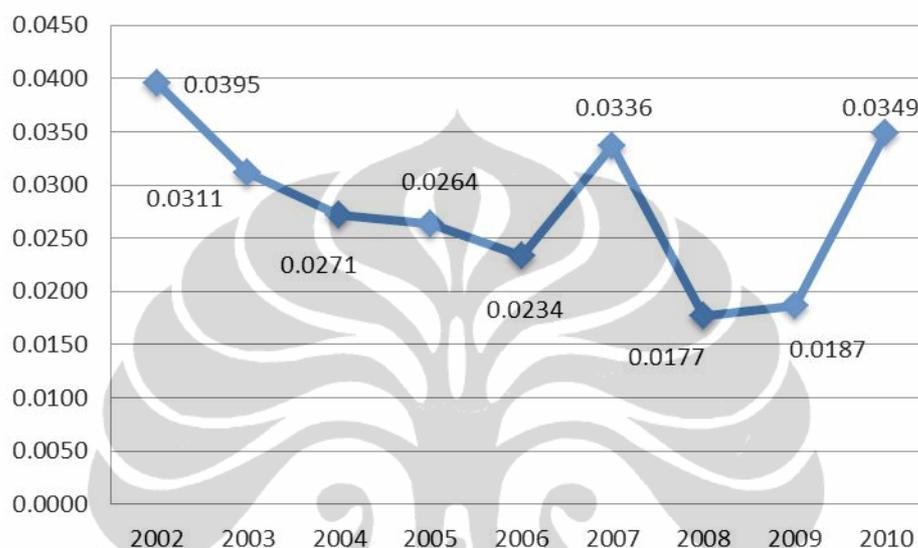
	TWR1	TWR2	TBR	Total
2002	0.0062	0.1923	0.2826	0.4812
2003	0.0047	0.1892	0.2748	0.4687
2004	0.0034	0.1800	0.2897	0.4732
2005	0.0040	0.1872	0.2883	0.4796
2006	0.0037	0.1792	0.2933	0.4762
2007	0.0044	0.1743	0.3002	0.4789
2008	-0.0230	0.1600	0.2488	0.3858
2009	0.0324	0.1609	0.2599	0.4532
2010	0.0128	0.1651	0.1911	0.3690

Pada tabel 5.8 diatas dapat dilihat bahwa TWR1 (Theil *Within* Regional 1/ daerah bukan maju) memiliki nilai indeks theil yang lebih kecil dibanding TWR2 (Theil *Within* regional 2/daerah maju). Namun pada TWR1 nilai indeks cenderung meningkat pada tahun 2002 sebesar 0.0062 menjadi 0.0128 pada tahun 2010. Sementara TWR2 pada tahun 2002 memiliki nilai indeks sebesar 0.192 dan terus menurun pada tahun 2010 menjadi 0.1651, artinya bahwa ketimpangan di wilayah 1 (bukan daerah maju) cenderung semakin meningkat dibanding pada wilayah 2 (daerah maju) yang cenderung semakin menurun.

Sementara nilai Theil *Between* pada analisis ini juga menunjukkan perkembangan yang baik, yaitu semakin menurun. Pada tahun 2002 sebesar 0.2826 menjadi 0.1911 pada tahun 2010 atau turun sebesar 32.38%. Sedangkan nilai Theil Total pada tahun 2002 sebesar 0.48 menurun menjadi 0.37 pada tahun 2010 atau turun sebesar 23.32%. Kota Cilegon masih menjadi urutan yang

pertama dalam nilai IDB berada diatas level provinsi, diikuti Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, sementara Kabupaten Pandeglang dan Lebak merupakan wilayah dengan IDB yang terendah.

5.2.4. Ketimpangan Kemiskinan



Grafik 5.9. Gambaran Perkembangan Ketimpangan Kemiskinan di Provinsi Banten dengan Perhitungan Indeks Theil

Ketimpangan kemiskinan tidak mengalami perubahan yang berarti. Diawali dari 0.0395 pada tahun 2002 dan hanya menjadi 0.0349 pada tahun 2010. Terjadi 2 kali kenaikan ketimpangan (kemiskinan semakin timpang) pada tahun 2007 dan 2010. Angka indeks theil untuk ketimpangan kemiskinan yang rendah menunjukkan pemerataan kemiskinan di semua wilayah di Provinsi Banten. Sehingga dapat dikatakan ada kesamaan kemiskinan di setiap kabupaten kota.

Salah satu penyebab dari tingginya ketimpangan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak adalah masih tingginya pekerja yang tidak dibayar. Sebanyak 14,22% pekerja di Pandeglang dan 19.97% pekerja di Lebak adalah pekerja tidak dibayar. Di Lebak, status pekerjaan utama ini merupakan tertinggi kedua setelah status dibantu buruh tidak tetap. Hal ini menunjukkan seberapa besar dan meratanya status pekerja tidak dibayar ini di Kabuptena Lebak. di Pandeglang, mayoritas pekerjaannya adalah pekerja bebas, dimana tidak ada kepastian pekerjaan dan berarti tidak ada kepastian pendapatan tiap harinya. Oleh

karena itu, ketimpangan kemiskinan di Banten masih tinggi. Hal ini yang menjadikan kedua kabupaten ini menjadi daerah yang paling tertinggal di antara yang lain.

Tabel 5.9 Persentase Penduduk Usia 15 tahun keatas yang Bekerja di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2010 (dalam %)

Kabupaten/Kota	Berusaha sendiri	dibantu buruh tidak tetap	dibantu buruh tetap	buruh/karyawan	pekerja bebas	pekerja tidak dibayar
Pandeglang	22.17	21.79	1.93	13.43	26.46	14.22
Lebak	13.97	29.88	1.74	16.27	18.17	19.97
Serang	30.08	7.93	1.78	52.42	4.61	3.18
Tangerang	28.06	15.20	3.16	30.78	11.84	10.96
Tangerang	21.41	8.55	2.40	61.80	3.81	2.03
Cilegon	22.64	11.07	4.02	48.25	7.90	6.11
Serang	25.92	12.39	4.86	42.07	6.63	8.12
Tangerang Selatan	25.23	6.70	1.36	63.82	1.43	1.47
Banten	24.62	12.94	2.26	44.24	8.91	7.04

Sumber: Banten Dalam Angka 2011

Selain itu, rendahnya upah minimum di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak menunjukkan rendahnya produktivitas di dua kabupaten tersebut. Hal ini menyebabkan tidak menariknya 2 daerah ini untuk ditempati oleh orang-orang berpendidikan dan berkeahlian lebih tinggi dari daerah lain baik dari Provinsi Banten atau dari provinsi lain. Dan akibatnya, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak tetap tertinggal.

Tabel 5.10 Upah Minimum Kabupaten/Kota per Bulan di Provinsi Banten Tahun 2007-2011 (dalam Rp)

Kab/kota	2007	2008	2009	2010	2011
Pangdeglang	792,750	840,000	918,950	964,500	1,015,000
Lebak	786,000	842,000	918,000	959,500	1,007,500
Serang	882,500	953,850	1,055,000	1,117,245	1,285,000
Tangerang	869,000	927,500	1,030,000	1,101,000	1,189,600
Tangerang	882,500	958,782	1,064,500	1,118,009	1,290,000
Cilegon	905,000	971,400	1,099,000	1,174,000	1,224,000
Serang		927,500	1,030,000	1,050,000	1,156,000
Tangerang Selatan					1,290,000
Banten	746,500	837,000	917,500	955,300	1,000,000

Sumber: Banten Dalam Angka 2011

5.3. Hubungan Ketimpangan IPM, Ketimpangan AMH, Ketimpangan AHH, Ketimpangan RLS, Ketimpangan IDB, dan Ketimpangan Pendapatan.

Untuk mengetahui hubungan antara nilai ketimpangan, digunakan metode *pearson correlation*. Keempat indeks dari variabel pembentuk IPM memiliki nilai diatas +0.7. Artinya, keempat variabel memiliki hubungan sangat kuat dengan Indeks Pembangunan Manusia. Angka Melek Huruf dengan 0.9607, Rata-rata Lama Sekolah dengan 0.9829, Indeks Daya Beli dengan 0.9182, dan Angka harapan Hidup 0.8965. dari keempat indeks ini, ketimpangan Rata-rata Lama Sekolah yang paling berhubungan dengan Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini disebabkan karena pendidikan adalah kunci awal untuk membangun manusia. Peningkatan lama sekolah berarti semakin banyak yang bersekolah dan peningkatan pendidikan yang ditamatkan masyarakat. Dari pendidikan yang baiklah kesehatan dan pendapatan dapat meningkat.

Tabel 5.11. *Pearson Correlation* Indeks Williamson IPM

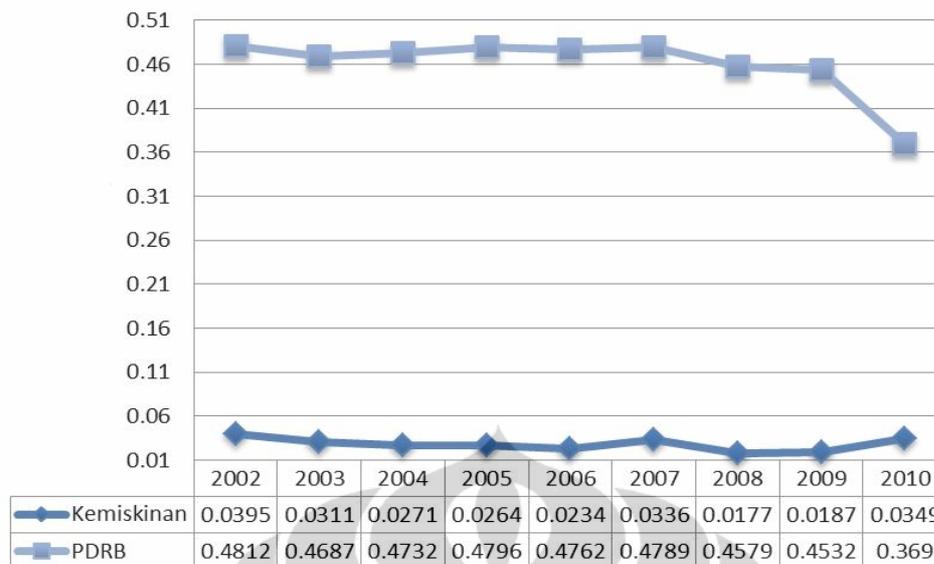
	IPM	AMH	RLS	IDB	AHH	Theil Total
IPM	1	0.9607	0.9829	0.9182	0.8965	0.4496

Peningkatan RLS yang kemudian menyebabkan peningkatan AMH dan IDB, dalam jangka panjang, juga akan meningkatkan IPM. Ketika seseorang semakin terdidik sehingga semakin memiliki kemampuan untuk konsumsi, tingkat kesejahteraan seseorang dapat meningkat.

Indeks Theil total menurut kabupaten/kota memiliki hubungan positif yang kuat dengan ketimpangan IPM. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan memang berhubungan dengan ketimpangan pembangunan manusia. Konsumsi berasal dari pendapatan. Ketika pendapatan timpang, konsumsi masyarakat, konsumsi kebutuhan primer seperti pangan, sandang, dan papan juga kebutuhan-kebutuhan investasi seperti pendidikan dan kesehatan, juga akan timpang. Hubungannya yang tidak sekuat AMH, RLS, IDB, dan AHH disebabkan karena pendapatan tidak secara langsung dapat membangun manusia. Pendapatan, melalui AMH, RLS, IDB, dan AHH baru bisa meningkatkan IPM

5.4. Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan

Ketimpangan PDRB lebih tinggi daripada ketimpangan kemiskinan. Sampai tahun 2009, indeks theil untuk PDRB dan kemiskinan memiliki tren yang sama, yakni cenderung menurun. Namun, pada tahun 2010, ketimpangan pendapatan menurun sedangkan ketimpangan kemiskinan justru meningkat.



Grafik 5.10. Indeks Theil Total PDRB dan Kemiskinan di Provinsi Banten, Tahun 2002-2010.

Ketimpangan sosial yang terjadi di Banten juga dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin yang terdapat pada delapan kabupaten/kota di Banten, seperti yang terlihat pada tabel 5.12. Berdasarkan tabel 5.12, persebaran penduduk miskin paling banyak terdapat di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Pada tahun 2008, 2009, dan 2010, Kabupaten Pandeglang memiliki presentase jumlah penduduk miskin sebanyak 12,55 persen, 12,01 persen dan 11,14 persen. Adapun pada Kabupaten Lebak mencapai 12,05 persen (2008), 10,63 persen (2009), dan 10,18 persen (2010). Jika dilihat tren dari tahun ke tahun memang keduanya menunjukkan tren menurun, namun jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya presentase penduduk miskin di kedua daerah tersebut termasuk yang tertinggi dibanding wilayah lainnya, sementara nilai PDRB di kedua daerah tersebut termasuk yang terendah.

Keadaan ini menunjukkan bahwa kondisi ketimpangan ekonomi di Provinsi Banten lebih disebabkan oleh ketidakmerataan pendapatan antar wilayah, yang dikarenakan adanya pemusatan kegiatan perekonomian di beberapa wilayah tertentu. Namun pola jumlah penduduk miskin yang ada tidak serta merta mengikuti tren ketimpangan pendapatan, melainkan masih tersebar merata di seluruh wilayah Provinsi Banten.

Tabel 5.12. Persentase Penduduk Miskin berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2008-2010

KAB/ KOTA	2008	2009	2010
Kab			
Pandeglang	12.55	12.01	11.14
Lebak	12.05	10.63	10.38
Tangerang	7.41	6.55	7.18
Serang	6.48	5.80	6.34
Kota			
Tangerang	6.83	6.42	6.88
Cilegon	3.95	4.14	4.46
Serang	-	6.19	7.03
Tangsel	-	-	1.67
Banten	8.15	7.46	7.02

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten 2011

Koefisien korelasi indeks Theil Total menurut kabupaten kota dengan indeks theil Kemiskinan adalah -0.133439881 . Artinya, ketimpangan kemiskinan dan pendapatan tidak memiliki hubungan, peningkatan ketimpangan kemiskinan tidak disebabkan oleh peningkatan ketimpangan pendapatan, ataupun sebaliknya. Hal ini disebabkan karena kemiskinan adalah sebuah proses dimana peningkatan pendapatan tidak secara linear dapat menurunkan kemiskinan.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara administratif Provinsi Banten terbagi dalam 8 wilayah dengan 4 kabupaten (Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang) dan 4 kota (Tangerang, Cilegon, Serang, Tangerang Selatan) dengan 154 kecamatan, 1.273 desa dan 262 kelurahan.

Sejak awal dibentuknya hingga saat ini, data menunjukkan bahwa pembangunan di Provinsi Banten dapat dikatakan telah berhasil. Hal ini dibuktikan dengan tren perkembangan ketimpangan PDRB Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia (dan komponen pembentuknya) menunjukkan kecenderungan yang menurun sejak tahun 2002-2010. Tujuan dilakukannya pemekaran untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di Provinsi Banten telah cukup berhasil, meskipun ketimpangan masih tetap ada.

Dari sisi kemiskinan, dibandingkan dengan tingkat nasional, persentase pertumbuhan penduduk miskin masih berada di bawah tingkat nasional (tahun 2002 Banten 9.22% dan nasional 17.75%). Faktor mendasar yang menyebabkan kemiskinan di Banten cukup tinggi adalah rendahnya pendidikan sebagian masyarakat di Banten yang juga berpengaruh pada terbatasnya ketrampilan, sumber daya alam (*endowment*) yang relatif terbatas dan budaya masyarakat yang belum mengedepankan produktivitas dan daya saing (Kajian Ekonomi Regional Banten, 2007).

Dari segi Ketimpangan PDRB Per Kapita, Indeks Theil Menunjukkan perkembangan yang positif, sejak tahun 2002-2010 kecenderungannya terus menurun. Hal ini juga didukung dengan data kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Banten sampai dengan tahun 2010 terus mengalami perkembangan yang positif, dimana tingkat pengangguran pada tahun 2008 sebesar 15.18% dan mengalami penurunan sampai dengan tahun 2010 menjadi 13.68%.

Meskipun tidak nampak kenaikan yang signifikan, namun dari tahun ke tahun indikator-indikator pembangunan manusia menunjukkan perkembangan yang positif. Meskipun tren AHH sempat menurun cukup drastis di tahun 2002 namun perkembangan AHH kembali meningkat menjadi 64.00 di tahun 2005 dan sampai dengan tahun 2010 menjadi 64.90. Indikator Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahunnya. Ini menandakan bahwa pembangunan fasilitas pelayanan publik di bidang pendidikan terus membaik. Secara keseluruhan tren indeks daya beli masyarakat terus meningkat, pada tahun 2003 menjadi 611.70 atau meningkat sedikit sekitar 0.6% dari tahun 2002 dan terus meningkat sampai dengan tahun 2010 menjadi 629.70 atau meningkat sekitar 3.57% dari tahun 2002.

Indeks Williamson menghitung ketimpangan pembangunan manusia dengan menggunakan variabel Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri dari indeks kesehatan dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), indeks pendidikan dengan indikator Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Indeks Daya Beli (IDB). Semua variabel menunjukkan gambaran perkembangan yang positif dan cenderung membaik, dimana nilai indeks Williamson semakin menurun, ini artinya bahwa ketimpangan pembangunan manusia semakin mengecil. Walau demikian, ketimpangan masih terjadi. Hal ini disebabkan Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang tingkat pendidikan yang ditamatkan didominasi oleh tingkat SD/ sederajat, 41,48% di Kabupaten Pandeglang, 45.95% di Kabupaten Lebak, 37.49% di Kabupaten Tangerang, 26.86% di Kabupaten Serang, dan 30.92% di Kota Serang. Sementara di Kota Tangerang, Cilegon, dan Tangerang Selatan didominasi oleh SLTA, yaitu 36.10%, 33.12%, dan 34.18%. Sementara indeks Rata-rata Lama Sekolah di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Cilegon sejak tahun 2002 hingga tahun 2010 selalu berada diatas angka Provinsi Banten, begitu juga Kota Tangerang Selatan sejak tahun 2009 hingga 2010 berada diatas angka Provinsi Banten.

Indeks Theil menghitung ketimpangan pembangunan dari segi ekonomi dengan menggunakan variabel PDRB per kapita berdasarkan kelompok

Kabupaten-Kota Hasilnya adalah Indeks Theil Total menunjukkan kecenderungan semakin menurun, yang artinya bahwa ketimpangan di Provinsi Banten semakin menurun. Meskipun kecenderungan ketimpangan berdasarkan perhitungan dengan menggunakan analisis Indeks Williamson dan Indeks Theil menunjukkan tren yang positif, namun harus diperhatikan juga bahwa beberapa daerah masih mendominasi kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan di Provinsi Banten, seperti Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan. Hal ini harus segera dibenahi dengan meningkatkan sektor industri di wilayah Banten Selatan agar tidak semakin tertinggal, sehingga kontribusi terhadap PDRB Provinsi Banten dapat semakin merata.

Berdasarkan hasil analisis theil dengan mengelompokkan wilayah Banten Utara dan Banten Selatan, masih nampak terjadi ketimpangan antar kelompok wilayah utara dan selatan. Sedangkan dengan mengelompokkan wilayah berdasarkan wilayah administratifnya, indeks theil dalam kelompok 2 yang terdiri dari 4 kota di Provinsi Banten terjadi kecenderungan ketimpangan yang semakin menurun. Hal ini selain disebabkan karena kegiatan perekonomian yang semakin membaik, juga karena adanya pemekaran wilayah yaitu Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi.

Pemekaran daerah merupakan sebuah kebijakan yang berdampak positif terbukti dari penurunan ketimpangan di semua variabel. Walaupun demikian, ketimpangan pendapatan masih tinggi. Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang masih menjadi daerah yang relatif tertinggal karena mayoritas pekerjaannya adalah pekerja yang tidak dibayar dan pekerja bebas serta upah minimum kabupaten yang masih rendah.

Selain karena posisi yang strategis sebagai daerah industri dan juga *hinterland* bagi Jakarta, wilayah Tangerang menjadi tempat tujuan bagi para pencari kerja dan daerah pemukiman bagi penduduk yang bekerja di Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat meningkatkan kesempatan kerja di wilayah Banten lainnya (seperti Kabupaten Pangdeglang dan Kabupaten Lebak) agar

terjadi mobilisasi penduduk yang lebih baik sehingga terjadi pemerataan penduduk yang dapat terus mendorong menurunkan ketimpangan.

Kecenderungan ketimpangan yang semakin menurun harus diikuti dengan peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan dalam pelayanan publik, agar ketimpangan dapat terus diminimalkan sehingga pembangunan pelayanan publik benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar,

Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik (jalan, listrik, gedung sekolah, sarana kesehatan, dll) diharapkan akan mampu memperlancar proses pembangunan dan meningkatkan kualitas SDM. SDM yang berkualitas dan memiliki ketrampilan dan tubuh yang sehat akan mampu meningkatkan produktifitasnya dan mendukung keberhasilan pembangunan.

Ketimpangan RLS memiliki korelasi yang paling kuat dengan ketimpangan IPM. Oleh karena itu, prioritas pembangunan dalam hal pendidikan dasar dan menengah harus lebih diperhatikan, terutama di daerah yang masih didominasi lulusan Sekolah Dasar (SD), yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Serang. Yaitu dengan membangun sarana dan prasarana sekolah dasar dan menengah, meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi guru sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I. (2011). *Lanskap Masalah Pembangunan Indoneisa: Catatan dari Senayan*. Kalimantan Selatan: Program Magister Sains Administrasi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat (MSAP-UNLAM).
- Akita, T. (2003). Decomposing Regional Income Inequality in China and Indonesia Using two-stage Nested Theil Decomposition Method. *The Annals of Regional Science, Springer-Verlag*.
- Amalia, L. (2007). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
BPS Provinsi Banten
Bappeda Provinsi Banten
- Boutayeb, A. &. (2006). Health Indicators And Human Development In The Arab Region. *International Journal Of Health Geographics, 5:61*.
- Chrisyanto, C. (2006). *Faktor–faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar daerah di Indonesia*. Jakarta: MPKP FE–UI.
- Etharina. (2004). *Ketimpangan antar Daerah di Indonesia : Dimensi Spasial dan Sektoral*. Jakarta: MPKP FE – UI.
- Harmadi, S. H. (n.d.). Regional Inequality in Indonesia: Pre and Post Regional Autonomy Analysis.
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Kuncoro, M. (2004). *Transformasi dan Ketimpangan ekonomi di DIY*. Kompas.
- Lusiana, N. D. (2008). *Analisis Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Lampung Tahun 1996 - 2005*. Depok: Universitas Indonesia.
- Mccann, P. (2001). *Urban And Regional Economics*. Oxford Publisher.
- Partowidagdo, W. (2010). *Mengenal Pembangunan dan Analisis Kebijakan*. Bandung: Program Pascasarjana Studi Pembangunan ITB.
- Sidik, M. (2002). Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori Dan Aplikasinya Di Indonesia).
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional :Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- Subandi. (2011). *Ekonomi Pembangunan, cetakan I*. Bandung: Alfabeta .
- Sutarno, &. M. (2003). Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Kecamatan Di Kabupaten Banyumas, 1993-2000. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8 No. 2, 97 – 110*.
- Utami, D. R. (2007). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Depok: Universitas Indonesia.
- Yoenanto, N. S. (2007). Analisis *Disparitas* Pendapatan Kabupaten / Kota di Provinsi Jateng dan Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi. .

- . Edisi 03-04/Th.XII/ Juli–September 2007. Majalah Triwulanan Perencanaan Pembangunan. Korpri Unit Bapennas. Jakarta.
- . Edisi 01/Th.XII/ Oktober–Desember 2006. Majalah Triwulanan Perencanaan Pembangunan. Korpri Unit Bapennas. Jakarta.
- . Edisi 02/Th.X/ Januari-Maret 2005. Majalah Triwulanan Perencanaan Pembangunan. Korpri Unit Bapennas. Jakarta.
- . Edisi 03, Th.IX. Juni 2004. Majalah Triwulanan Perencanaan Pembangunan. Korpri Unit Bapennas. Jakarta.



LAMPIRAN

Jumlah Penduduk Di Provinsi Banten Menurut Kabupaten/Kota

Kab/ Kota	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
PANDEGLANG	1,040,871	1,050,700	1,100,911	1,106,788	1,124,600	1,085,042	1,092,527	1,099,746	1,149,610
LEBAK	1,044,047	1,055,400	1,132,899	1,139,043	1,162,200	1,210,149	1,234,459	1,258,893	1,204,095
TANGERANG	2,983,384	3,252,100	3,194,282	3,324,949	3,372,600	3,473,271	3,574,048	3,676,684	2,834,376
SERANG	1,735,560	1,811,900	1,834,514	1,866,512	1,882,700	1,808,464	1,826,146	1,345,557	1,402,818
TANGERANG	1,416,840	1,556,700	1,488,666	1,537,244	1,543,100	1,508,414	1,531,666	1,554,827	1,798,601
CILEGON	309,097	319,600	331,872	334,408	339,100	338,027	343,599	349,162	374,559
SERANG	-				-	-	-	497,910	577,785
TANGSEL	-				-	-	-		1,290,322
BANTEN	8,529,799.00	9,046,400	9,083,144	9,308,944	9,424,300	9,423,367	9,602,445	9,782,779	10,632,166

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Banten

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
PANDEGLANG	1,210,330.00	2,934,000.00	2,914,800.00	3,162,720.00	3,289,460.00	3,380,020.00	3,500,790.00	3,624,270.00	3,701,780.00
LEBAK	1,073,330.00	2,705,560.00	2,714,180.00	2,843,440.00	2,867,500.00	2,940,990.00	3,000,160.00	3,062,642.00	3,334,917.00
TANGERANG	1,546,950.00	4,591,710.00	4,670,090.00	4,961,020.00	5,221,190.00	5,409,730.00	5,584,230.00	4,727,654.00	6,544,339.00
SERANG	1,616,460.00	4,165,610.00	4,159,300.00	4,519,580.00	4,678,970.00	4,856,980.00	4,981,560.00	5,091,527.00	5,086,270.00
TANGERANG	4,790,200.00	13,299,340.00	13,555,560.00	14,267,400.00	15,478,360.00	16,245,620.00	17,018,720.00	17,727,075.00	16,347,625.00
CILEGON	10,147,310.00	26,046,120.00	26,953,600.00	29,011,470.00	30,068,850.00	31,118,640.00	32,151,780.00	33,166,834.00	32,545,085.00
SERANG	-	-	-	-	-	-	5,135,480.00	5,363,825.00	4,975,197.00
TANGSEL	-	-	-	-	-	-	-	-	4,168,275.00